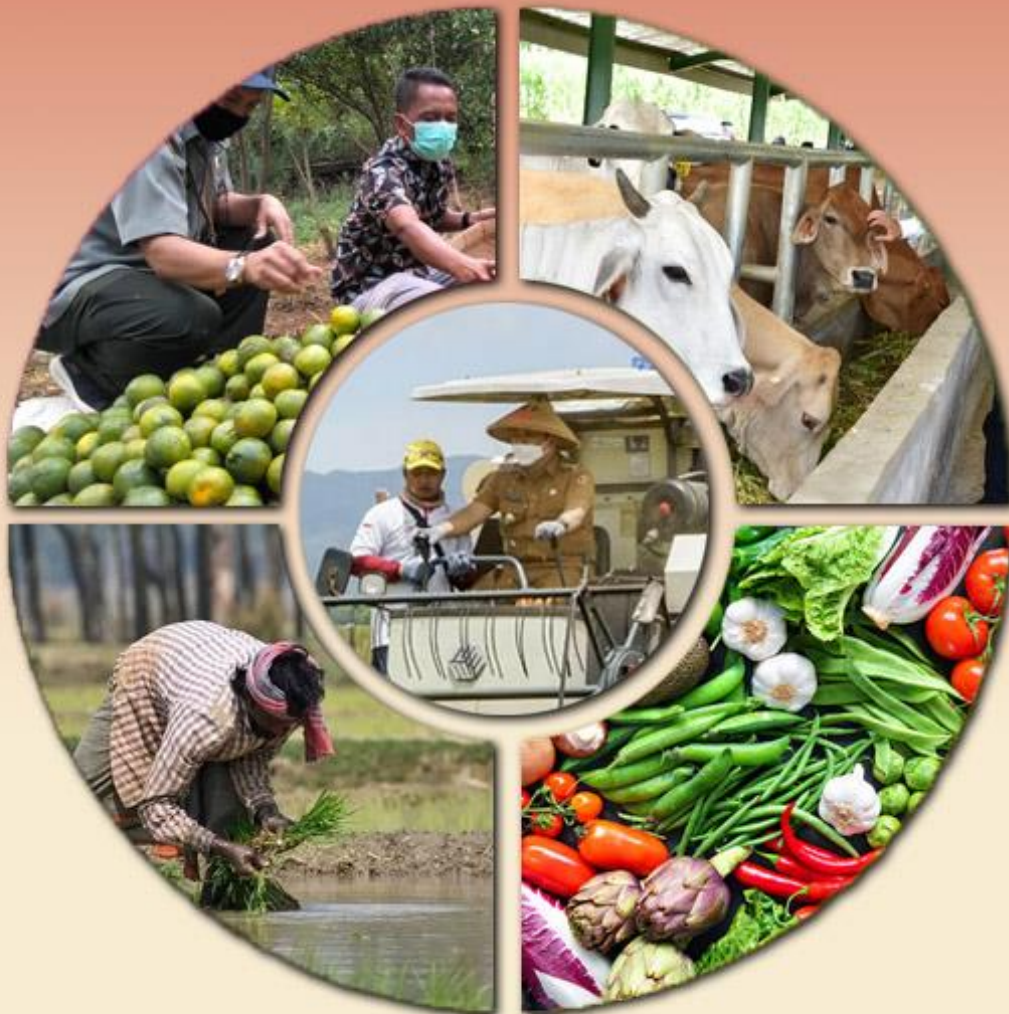




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



PERIODE 06 SEPTEMBER 2023



Title	Produksi Tembakau Garangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Koran Jakarta/Anis Efizudin	

» Produksi Tembakau Garangan



ANTARA/ANIS EFIZUDIN

» Warga menyelesaikan proses pembuatan tembakau Garangan di Desa Setieng, Kejajar, Wonosobo, Jateng, Selasa (4/9). Tembakau Garangan merupakan tembakau khas Wonosobo yang diproses dengan cara dirajang tipis, dipadatkan dan dibakar menggunakan kayu bakar selanjutnya dijemur beberapa hari, harga jualnya berkisar 100-500 ribu rupiah per rigen (lima lembar tembakau) tergantung kualitas.

Title	Sinergi Pengusaha-Petani Harus Saling Menguntungkan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Sektor Pertanian | Pengelolaan Pascapanen Perlu Ditingkatkan

Sinergi Pengusaha-Petani Harus Saling Menguntungkan

Kerja sama secara mutualisme antara petani dan perusahaan besar penting dilakukan demi meningkatkan daya saing produsen pangan.

JAKARTA – Pelaku usaha skala besar harus menggendong petani untuk meningkatkan daya saing produsen pangan dan memperkuat ketahanan pangan. Meski demikian, kemitraan pengusaha besar dan petani harus saling menguntungkan.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menilai kerja sama petani dengan perusahaan besar itu penting dilakukan demi meningkatkan daya saing produsen pangan. Namun, dia menekankan agar kerja sama harus saling menguntungkan, tidak hanya perusahaan besar saja.

“Perusahaan besar dapat membantu dan bermitra dengan petani dalam konteks edukasi, adopsi teknologi tepat guna, pengolahan dan pema-

saran hasil pertanian,” ucap Awan pada *Koran Jakarta*, Selasa (5/9).

Awan merespons pernyataan Ketua Asean-BAC, Arsjad Rasjid, yang mendorong perusahaan besar untuk memberdayakan petani. Awan mengakui praktik kerja sama ini memang sudah diterapkan di sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Namun, perlu ditingkatkan kemitraan yang memperkuat kelembagaan dan organisasi/koperasi tani, tidak secara parsial secara individu atau kelompok tani dalam skala terbatas.

Diakui Awan, selama ini ada kemitraan yang lebih menguntungkan perusahaan besar seperti di sektor perkebunan. “Cara seperti ini semestinya dihentikan. Kerja sama harus

saling menguntungkan,” tandas dia.

Koordinator Nasional Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan, di sektor pertanian, integrasi rantai pasokan harus fokus pada hubungan langsung antara petani skala kecil dan konsumen akhir atau pengolah.

“Inisiatif seperti koperasi petani, model pertanian cerdas iklim yang didukung masyarakat, dan pasar lokal mengurangi perantara dan emisi, sehingga meningkatkan pendapatan petani,” ucapnya.

Dia melanjutkan peningkatan pengelolaan pascapanen, seperti peningkatan fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan transportasi yang menggunakan energi terbarukan, meminimalkan kerugian, menjaga kualitas produk, dan berkontribusi pada pengurangan emisi di sektor pertanian.

“Pengolahan yang bernilai tambah, melalui kemitraan dengan UKM khusus, menciptakan produk bernilai lebih tinggi,

meningkatkan ketahanan petani skala kecil terhadap fluktuasi pasar,” papar Said.

Beberapa hal yang perlu dipastikan ketika pendekatan inklusifitas didorong di sektor pertanian tentu saja inklusivitas soal ini menjadi penting dalam pembangunan pertanian ke depan.

Dalam konteks Asia Tenggara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani skala kecil tentu saja pembelaan pada petani skala kecil menjadi penting.

Pacu Daya Saing

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, memandang ide kerja sama tersebut sangat baik. “Jika terwujud itu bisa jadi perbaikan di sistem pangan kita produksi distribusi dan konsumsi,” ungkap Qomar.

Dia berpandangan mungkin kerja sama seperti itu bisa mempercepat daya saing UMKM petani. Tetapi, tentu

juga dia mengingatkan kerja sama harus memperhatikan juga apakah perusahaan besar ini berpihak kepada petani atau sebaliknya.

“Mungkin dia melakukan pelanggaran terhadap hak petani. Sebab, jika benar demikian bisa saja perusahaan itu hanya mau mengambil keuntungan saja dari petani,” tandas Qomar.

Seperti diketahui, Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) 2023 di bawah Kepemimpinan Indonesia Asean pada 2023 mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Program warisan kita Inclusive Closed-Loop Model for Agricultural Products di mana perusahaan besar membantu petani supaya mereka jadi mentornya,” kata Ketua Asean-BAC, Arsjad Rasjid, kepada wartawan di sela-sela acara Asean Business and Investment Summit 2023 di Jakarta, Senin (4/9). ■ **ers/E-10**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Bantuan Pangan Siap Bergulir	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Dwi Rachmawati	

| STABILISASI HARGA TELUR |

Bantuan Pangan Siap Bergulir

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan program bantuan pangan berupa telur dan ayam untuk menstabilkan harga kedua komoditas itu setelah anjlok cukup dalam di pasaran.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan program bantuan pangan telur dan daging ayam kepada keluarga rentan *stunting*.

Menurutnya, bantuan telur dan daging ayam cukup ampuh menjaga harga jual di tingkat peternak dan membantu gizi masyarakat.

“Kami juga menyampaikan cara agar menaikkan harga [telur dan daging ayam] kembali di tingkat peternak dengan bantuan pangan sekaligus juga membantu tujuh provinsi yang bisa disalurkan ayam dan telur,” katanya di

Komisi IV DPR, Senin (4/9).

Dia menjelaskan penurunan harga telur sesuai dengan tren tahun lalu terjadi pada periode Agustus hingga Oktober.

Jatuhnya harga telur dan daging ayam diduga akibat rendahnya permintaan.

Oleh karena itu, pemerintah mencetuskan upaya penyerapan hasil peternak oleh *stakeholder* pangan, termasuk BUMN.

“Ini [bantuan pangan] yang akan mengerjakan ID Food, sama seperti yang sudah dikerjakan 4—5 bulan terakhir bersama peternak kecil,” ujar Arief.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Musbar Mesdi meminta pemerintah perlu mengantisipasi

anjloknya harga telur di peternak. Menurutnya, kondisi peternak mandiri akan makin terdesak di tengah anjloknya harga jual dan gempuran harga pakan yang terus melonjak.

Dia melaporkan ada kerugian hingga Rp4.000 per kilogram yang harus ditanggung para peternak telur ayam.

Kerugian tersebut berasal dari harga jual telur di kandang berada di level terendah Rp20.000 per kilogram, sementara biaya produksi telah mencapai Rp24.000 per kilogram. Saat ini, harga jagung pakan yang melambung hingga mendekati Rp7.000 per kilogram.

“Kalau tidak segera [diatasi], maka kehadiran peternak layer mandiri akan segera digantikan oleh pelaku usaha yang berkapital [modal] kuat untuk mengisi kekosongan suplai,” ujar Musbar. (Dwi Rachmawati)

Title	Jurus ASEAN Terus Maju Takkan Tergerus Zaman	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	14	
Author	DAY	

Concord IV Usulan Indonesia Disahkan Hari Ini

Jurus ASEAN Terus Maju Takkan Tergerus Zaman

Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN merekomendasikan ASEAN Concord IV untuk disahkan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43, Selasa (5/9) hari ini. Ini salah satu jurus bagi Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara itu untuk tetap maju dan tak tergerus zaman.

KEPUTUSAN ini dicapai dalam pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council Meeting/ACC) yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Senin (4/9). Susunan ASEAN Concord IV merupakan masukan dari Indonesia.

Dokumen ini akan menjadi fondasi penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045, memperkuat ASEAN agar dapat mengatasi berbagai tantangan masa depan. Penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045 mulai dikerjakan tahun ini oleh High-Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Community's Vision 2045 di bawah keketuaan bersama Indonesia dan Malaysia. Visi tersebut akan disahkan pada 2025.

"Tantangan yang kita hadapi saat ini sudah besar. Namun tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin besar. Apakah ASEAN bisa terus maju atau tidak, tergantung kita semua," ujar Menlu Retno Marsudi di Sekretariat ASEAN, Senin (4/9).

ASEAN, lanjutnya, harus bersedia mengambil keputusan berani, agar bisa terus maju dan tetap relevan. Perbedaan antar



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, di Jakarta, Senin, 4 September 2023.

anggota, tidak boleh menghalangi kemajuan ASEAN.

Sebagai informasi, para Menlu ASEAN melakukan tiga pertemuan untuk mempersiapkan KTT ASEAN ke-43 dan KTT lainnya agar lebih matang. Ketiga pertemuan tersebut mencakup ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Political Security Community (APSC) Council, dan ACC. Dalam pertemuan ini, Myanmar kembali absen.

Pembahasan ASEAN Concord IV dihadiri Menlu Brunei Darussalam Dato Seri Erywan Pehin Yusof, Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Menlu Malaysia Dato Seri Diraja Zambry Abd. Kadir, Menlu Filipina Enrique Manalo, dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan.

Hadir pula Wakil Menlu Vietnam Do Hung Viet, Menlu Timor Leste Bendito dos Santos Freitas, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Houn, Menlu Serbia Ivica Dacic, Wakil Menlu Panama Vladimir Franco, Wakil Menlu Kuwait Shaikh Jarrah Jaber Alahmad Aljaber Alsabah.

Perdana Menteri Cook Islands Mark Brown, Menlu Bangladesh A.K. Abdul Momen, Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association (IORA) Salman Al Farisi, Deputi Sekjen Pacific Island Forum (PIF) Esala Nayasi, juga hadir.

Di kesempatan yang sama, ASEAN juga berhasil meningkatkan kerja sama dengan PIF melalui nota kesepahaman (MoU) antar-sekretariat di beberapa area prioritas. Antara lain maritim,

konektivitas, SDGs, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan manajemen bencana.

Penandatanganan MoU dilakukan Sekjen ASEAN, Kao Kim Houn; Sekjen IORA Salman Al Farisi dan Deputi Sekjen PIF Esala Nayasi. Acara itu disaksikan Menlu RI, Menlu Bangladesh selaku Ketua IORA, dan Menlu Cook Islands selaku Ketua PIF.

IORA adalah organisasi internasional yang beranggotakan 23 negara di sekitar Samudera Hindia, termasuk Indonesia. Sementara PIF beranggotakan 18 negara Pasifik, dan Indonesia ikut serta sebagai mitra wicara.

"Negara-negara di Samudera Hindia dan Pasifik adalah bagian tak terpisahkan dari kawasan Indo-Pasifik. Kita berbagi kawasan yang sama. Apa pun yang terjadi

di kawasan ini akan mempengaruhi kita semua," ujar Retno.

3 Anggota Baru TAC

Masih dalam pertemuan menjelang KTT ASEAN, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama/ Treaty of Amity and Cooperation (TAC) mendapat tiga anggota baru. Yaitu Serbia, Panama, dan Kuwait.

TAC adalah pakta kerja sama dan non-agresi antara negara-negara ASEAN dan para mitranya. Tujuan perjanjian itu untuk mempromosikan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Menlu Retno berharap, TAC bisa menyatukan ASEAN dan negara mitra wicara untuk mendorong kerja sama konkret dalam mengatasi tantangan bersama, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, hingga proliferasi kejahatan trans-nasional.

Senin (4/9) lalu, penandatanganan bergabung dengan TAC dilakukan Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic, Wakil Menteri Luar Negeri Panama Vladimir Franco, dan Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al Ahmad al Sabah.

Arab Saudi telah menandatangani TAC di sela-sela ASEAN Ministerial ke-56 di Jakarta Juli lalu. Dengan demikian, tahun ini total ada empat negara baru bergabung dalam TAC.

Seluruh negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (5 negara) telah menandatangani TAC. Yaitu China (2003), Rusia (2004), Prancis (2007), Amerika Serikat (2009), dan Inggris (2012). Sementara dari anggota G20, hanya dua negara yang belum bergabung, yaitu Italia dan Meksiko. ■ DAY

Title	Top, Inflasi Indonesia Terendah di Antara Negara G20...	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	3	
Author	Rakyat Merdeka	

Presiden Puji Kinerja TPIP & TPID

Top, Inflasi Indonesia Terendah di Antara Negara G20...

Kinerja pengendalian inflasi di Tanah Air membanggakan. Tak hanya terkendali, angkanya terendah di antara negara anggota G20. Untuk menjaga capaian positif ini, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

PRESIDEN Jokowi mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi di Tanah Air.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik pusat dan daerah, kepada gubernur, bupati dan wali kota yang sudah bersam-sama mengendalikan inflasi," ucap Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang bertajuk, 'Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan, yang diselenggarakan secara *hybrid* di Istana Negara, Kamis (31/8).

Seperti diketahui, inflasi Juli 2023 sebesar 3,08 persen (*year on year/yoy*). Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan sejumlah negara G20 seperti Argentina, Turki, India, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Keberhasilan pengendalian inflasi tersebut, menurut Jokowi, tidak terlepas dari sinergi antara otoritas moneter dan fiskal. Serta, tim pengendali inflasi yang langsung turun melakukan pengecekan di lapangan dan diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Presiden menyebut, ada beberapa upaya untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan jurus menaikkan suku bunga. Namun, menurutnya, hal ini tidak akan berdampak

jika ternyata di lapangan pasokan pangan kurang memadai. Alhasil, harga suatu komoditas berpotensi naik.

Begitu juga dengan kebijakan moneter lainnya. Kebijakan moneter tidak bekerja optimal jika jalan banyak yang rusak, sehingga menyebabkan distribusi pasokan terganggu.

"Jadi ini (hasil) kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," kata Jokowi.

Presiden menginstruksikan TPIP dan TPID untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh GNPIP.

Rakornas ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Pimpinan Lembaga Negara, seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan 5 (lima) langkah kebijakan dalam pengendalian inflasi di tengah tantangan yang masih mengemuka.

Pertama, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar, guna me-



PIMPIN RAKORNAS: Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

ngurangi gejala harga komoditas pangan, terutama beras. Dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.

Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Terutama untuk memperkuat kerja sama antar-daerah. Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Dan kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi demi menjaga ekspektasi inflasi.

Buah Sinergisitas
Perry Warjiyo mengungkapkan,

kan, keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan inflasi merupakan hasil dari sinergi dan inovasi bauran kebijakan.

"Kalau negara lain, obat inflasi cuma satu, yaitu suku bunga Bank Sentral yang naik. Tapi kalau di Indonesia, sinergi yang sangat kuat," tegas Perry.

Perry menyebutkan, pada akhir 2022 inflasi Indonesia sempat menyentuh angka 5,51 persen yoy sebelum akhirnya turun menjadi 3,08 persen yoy pada Juli 2023.

"Ini termasuk salah satu (inflasi) yang terendah di dunia," ungkap Perry.

Perry menjelaskan, sejauh ini Bank Sentral telah melakukan penyesuaian suku bunga untuk menjangkar ekspektasi inflasi.

Selain kebijakan suku bunga, lanjut Perry, BI juga terus

melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah untuk membatasi dampak inflasi barang impor serta mengeluarkan bauran kebijakan untuk upaya stabilisasi dan mendorong pertumbuhan.

Selain itu, BI terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal pengendalian inflasi. Termasuk dengan meningkatkan peran 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dalam meningkatkan efektivitas GNPIP yang telah dicanangkan sejak pertengahan tahun 2022.

BI memperkirakan inflasi tahun 2024 terus terkendali dan menurun pada kisaran 2,5 plus minus 1 persen.

"Inilah ciri khas Indonesia, mengapa bisa berhasil menjaga inflasi. Karena adanya kebijakan moneter, fiskal, juga bauran kebijakan keduanya," tandas Perry. ****

Di sela Rakornas Pengendalian Inflasi, Presiden Jokowi juga menyerahkan penghargaan TPID Award kepada 15 daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sepanjang 2022.

DAERAH PERAIH TPID AWARD 2022:

1. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Sumatera: Kabupaten Tanah Datar.
2. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Tasikmalaya.
3. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Kalimantan: Kabupaten Landak.
4. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Sulawesi: Kabupaten Minahasa.
5. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kabupaten Sabu Raijua.
6. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Sumatera: Kota Palembang.
7. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Banyuwangi.
8. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Kalimantan: Kota Tarakan.
9. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Sulawesi: Kabupaten Bone.
10. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kota Kupang.
11. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Sumatera: Provinsi Bengkulu.
12. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali: Provinsi DKI Jakarta.
13. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Kalimantan: Provinsi Kalimantan Selatan.
14. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Sulawesi: Provinsi Sulawesi Selatan.
15. TPID Provinsi Terbaik 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Harga Beras SPHP Disesuaikan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Tri Listiyarini	

Harga Beras SPHP Disesuaikan

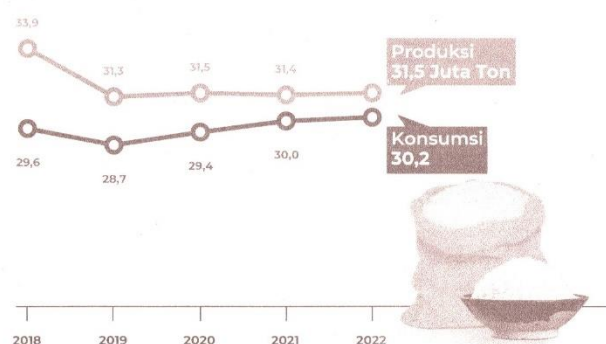
JAKARTA, ID—Pemerintah menaikkan harga beras SPHP menjadi Rp 10.900 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 9.450 per kg mulai 1 September 2023. Penaikan hampir Rp 1.500 per kg itu dilakukan guna menyesuaikan dengan harga beras di pasaran yang saat ini sudah di atas Rp 12 ribu per kg. Kesenjangan harga yang terlalu jauh antara beras SPHP yang dijual Perum Bulog dalam kerangka operasi pasar dengan beras umum dikhawatirkan akan memicu penyalahgunaan.

Oleh Tri Listiyarini

Beras SPHP merupakan beras yang dijual Perum Bulog untuk kegiatan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras itu dikemas dalam karung plastik berukuran 5 kg dengan merk SPHP. Menurut informasi dari Perum Bulog, penyaluran beras SPHP per 5 September 2023 telah mencapai 750 ribu ton dan akan terus dilakukan untuk mengintervensi harga yang terus meningkat di pasaran. Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menargetkan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun ini mencapai 1,2 juta ton.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, harga Af (pengambilan) di gudang Bulog yang semula Rp 8.300 per kg sudah disesuaikan menjadi Rp 9.950 per kg, sehingga untuk kemasan 5 kg menjadi Rp 49.700. Sedangkan harga di tingkat konsumen, yang semula Rp 9.450 per kg menjadi Rp 10.900 per kg, sehingga untuk kemasan 5 kg menjadi Rp 54.500. "Ini sudah disampaikan ke Perum Bulog dan harusnya seluruh Indonesia (sudah). Kami sudah bersurat juga ke seluruh gubernur bahwa beras Bulog menjadi Rp 10.900 per kg, tidak Rp 9.450

Produksi dan Konsumsi Beras Indonesia, 2018-2022



SUMBER: BPS, BERITASATU RESEARCH

per kg," ungkap Arief saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta yang dipantau *Investor Daily*, Selasa (05/09/2023).

Dengan penyesuaian itu, kata Arief, apabila masih ditemukan beras SPHP Perum Bulog bisa jadi karena masih ada kemasan yang bertuliskan harga eceran tertinggi (HET) lama. Beras SPHP merupakan beras medium namun isinya

sejatinya adalah beras premium karena penugasan importasi pemerintah kepada Bulog adalah untuk beras dengan tingkat kepecahan (*broken*) 5%. "Itu beras medium tapi isinya premium karena importasi kita 5% (kepecahan). Kalau Bapak atau Ibu menemukan harga di bawah itu (Rp 10.900 per kg) sebenarnya enggak. Teknisnya karungnya sudah dicap (harga lama). Bu Febby dan Pak Yamto

(direksi Bulog) silakan membantu soal label harga, ini mesti diubah," papar Arief.

Dihubungi *Investor Daily* secara terpisah, Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya membenarkan penyesuaian harga beras SPHP tersebut. "Ketentuan kenaikan itu per 1 September 2023. Latar belakangnya karena menyesuaikan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dalam

negeri yang sudah naik sebelumnya," tutur Tomi. Pemerintah memberlakukan HPP gabah dan beras baru melalui Peraturan Bapanas (Perbadan) No 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras per 24 Maret 2023, di antaranya HPP gabah kering panen (GKP) dipetani Rp 5.000 per kg. Bersamaan dengan itu, dirilis juga Perbadan No 7 Tahun 2023 tentang HET Beras, di antaranya HET beras medium di Jawa Rp 10.900 per kg dan premium Rp 13.900 per kg.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, apabila beras SPHP dijual Rp 47-48 ribu per 5 kg itu terlalu murah dan dikhawatirkan memicu penyalahgunaan. Apabila beras SPHP yang cenderung murah dibeli pedagang dari Bulog, bisa saja kemudian dibuang dari pengadaan lain (di luar Bulog), diganti plastiknya, dan dijual Rp 60 ribu per 5 kg. "Karena itu, sebaiknya, beras SPHP dinaikkan menjadi sekitar Rp 50 ribu per 5 kg mengingat saat ini harga beras di pasaran sudah Rp 13.200-13.500 per kg," kata dia. Apalagi, beras SPHP saat ini dibeli oleh masyarakat umum (di luar keluarga penerima manfaat/KPM dalam program bantuan pangan beras) yang sebagian besar tidak mampu.

Pinjaman untuk CPP

Dalam RDP dengan Komisi IV DPR tersebut, Bapanas juga melaporkan realisasi anggaran tahun anggaran (TA) 2022 yang mencapai Rp 241,5 miliar

atau 87,08%, itu sudah maksimal mengingat efektif baru dilaksanakan pada semester II-2022. Capaian itu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersamaan dengan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Dalam RAPBN TA 2024, anggaran Bapanas ditetapkan Rp 441,6 miliar. "Pada TA 2024, kami juga melaporkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang akan dialihkan dari BA999.08 Kementerian Keuangan ke BA125 Bapanas Rp 19,56 triliun. Kami turut mengusulkan platform pinjaman kepada Kementerian Keuangan guna penguatan CPP senilai Rp 28,69 triliun," jelas Arief.

Arief juga menyampaikan, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional periode Januari-Desember 2023, per 28 Agustus 2023, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan diproyeksikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. "Kami proyeksikan 12 komoditas pangan aman sampai akhir tahun. Kami juga sedang berproses untuk penguatan CPP dengan target stok 5-10% dari kebutuhan nasional. Kami sampaikan pula, cadangan beras pemerintah provinsi hingga minggu keempat Agustus 2023 mencapai 6.437,9 ton, kami terus mendorong pemerintah daerah melakukan penguatan," ujar Arief.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pemerintah Perlu Fokus Tata Kebijakan Migor	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	

Pemerintah Perlu Fokus Tata Kebijakan Migor

JAKARTA, ID—Pemerintah perlu fokus menata kebijakan minyak goreng (migor) nasional guna potensi berulangnya kelangkaan atau lonjakan harga komoditas itu pada masa mendatang. Salah satu kebijakan yang bisa dijalankan adalah memberikan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan migor domestik, khususnya bagi masyarakat menengah-bawah yang kebutuhannya sekitar 50% dari total konsumsi nasional, kepada BUMN, yakni PTPN, ID Food, atau Perum Bulog.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi masalah migor di Indonesia. Dia menekankan bahwa antisipasi yang baik diperlukan untuk menghindari potensi berulangnya kelangkaan atau lonjakan harga migor pada masa depan. "Masalah migor ini rawan akan terjadi lagi. Jadi, pemerintah harus berhati-hati jangan sampai salah langkah. Indonesia adalah produsen minyak sawit (*crude palm oil*/CPO) terbesar, mestinya masalah seperti itu dapat diantisipasi," ujar Tungkot. Idealnya, semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlu belajar dari kasus sebelumnya dan berusaha memperbaiki situasi serta lebih fokus menyiapkan regulasi dan tata kelola pasar migor yang baik.

Untuk memenuhi kebutuhan migor domestik misalnya, lanjut Tungkot, khususnya migor bagi masyarakat menengah-bawah sebaiknya menjadi tanggung jawab BUMN, yakni PTPN, ID Food, atau Bulog. Contoh, kapasitas pabrik migor PTPN saat ini sudah mencapai 1,6 juta ton kiloliter (kl) dan berpotensi terus bertambah. Dengan kebijakan itu, apabila dinilai perlu memberlakukan harga eceran tertinggi

(HET) migor domestik, pemerintah dapat menugaskan BUMN untuk memenuhinya, selisih harga ekspor dengan HET yang ditetapkan ditutup dari dana sawit. Melalui cara demikian, korporasi migor swasta dapat leluasa mengeksport tanpa ada kewajiban *domestic market obligation* (DMO), BUMN dapat menjaga ketersediaan migor domestik (migor untuk rakyat). Pada 1971-1990, Indonesia sempat mengadopsi kebijakan semacam itu dan berhasil. "Kebijakan itu bisa menyelesaikan dilema atau *trade off* migor untuk ekspor vs migor untuk rakyat, hal itu tak terulang lagi. Pengaturannya perlu regulasi selevel peraturan presiden," ujar Tungkot.

Dilema atau *trade off* migor untuk ekspor vs migor untuk rakyat muncul karena harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit, yang terus naik signifikan. Berdasarkan data Bank Dunia (2022), harga minyak kedelai naik dari US\$ 748 per ton pada Januari 2019 menjadi US\$ 1.957 per ton pada Maret 2022. Pada periode sama, harga minyak sawit meningkat dari US\$ 537 per ton menjadi US\$ 1.823 per ton. Peningkatan harga CPO dunia tersebut menyebabkan peningkatan harga migor di pasar domestik. Kenaikan harga itu akhirnya akan menciptakan dilema antara mengeksport (untuk mencari devisa) atau mengamankan kebutuhan domestik. "Dilema tersebut jika tidak dipecahkan berpotensi menimbulkan persoalan politik dan hukum seperti yang terjadi tahun lalu. Solusi untuk dilema itu adalah pembagian tanggung jawab. Korporasi swasta yang menghasilkan migor sebaiknya jangan dibebani tanggung jawab untuk menjamin penyediaan migor domestik. Bebaskan ekspor untuk memperoleh devisa dari pasar dunia," jelas Tungkot. **(ti)**

Title	Akhir Musim Panen Melon	
Date	6 September 2023	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	Kompas/Rahana Patria Gupta	

Akhir Musim Panen Melon



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petani di Sidoarjo, Jawa Timur, memanen melon, Senin (4/9/2023). Cuaca yang terlalu panas pada musim kemarau ini membuat petani melon setempat mulai mengakhiri musim panen. Tanah yang terlalu keras dinilai membuat melon berukuran kecil. Melon juga banyak yang busuk.

Title	Dari Seruyan Meniti Jalan Pasar Global Sawit Berkelanjutan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Kompas	
Page	11	
Author	Runik Sri Astuti	

Dari Seruyan Meniti Jalan Pasar Global Sawit Berkelanjutan

Industri sawit menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Oleh karena itu, sertifikasi sawit berkelanjutan diakselerasi guna menjawab persoalan lingkungan dan tantangan perdagangan global.

Runik Sri Astuti

Regulasi komoditas bebas deforestasi (European Union Deforestation-Free Regulation/EUDR) menjadi salah satu isu perdagangan global saat ini. Kebijakan yang berlaku sejak Juni 2023 itu mensyaratkan penjualan produk sawit harus melewati uji tuntas guna memastikan tak berasal dari lahan hasil penggundulan, pembakaran, ataupun perambahan hutan.

Ikhtiar yang dilakukan di antaranya mendorong sertifikasi sawit berkelanjutan berdasarkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, sertifikasi dengan pendekatan konvensional yang saat ini berjalan dinilai kurang efektif dan efisien dari segi proses ataupun biayanya.

Pendekatan ini berbasis perusahaan dan petani swadaya sebagai penerima sertifikat, sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Proses pengurusan sertifikat dilakukan pemohon dan biayanya ditanggung sendiri oleh penerima manfaat.

Agar lebih efektif dan efisien, sejak 2015 dikembangkan konsep sertifikasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi atau kewilayahan (*jurisdictional approach/JA*). Proyek percontohan sertifikasi JA ini ada Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah; Negara Bagian Sabah, Malaysia; dan Ekuador.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu produsen sawit di Indonesia, tetapi

bukan yang terbesar. Produksi sawitnya hanya 62.310 ton pada 2020, jauh dibandingkan dengan Kabupaten Rokan Hulu yang produksinya mencapai 690.942 ton pada 2021.

Akan tetapi, komoditas sawit ini menjadi penopang utama ekonomi Seruyan, selain komoditas kayu bulat. Adapun kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar kedua adalah industri pengolahan dengan komoditas utama sawit dan kayu bulat. Artinya, sawit beserta produk hasil olahannya tetap tulang punggung ekonomi Seruyan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Seruyan Albidinnor mengatakan, sawit menggerakkan ekonomi dari desa hingga kota karena memiliki efek ganda yang jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas kayu bulat. Hal itu karena sawit membuka mata rantai usaha lain, seperti penyuplai bahan kebutuhan pokok, pupuk, benih, tenaga kerja, dan alat produksi pertanian.

"Karena itu, penting sekali menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit. Ada tiga jenis perkebunan sawit, yakni yang dikelola oleh petani swadaya, petani plasma, dan perusahaan. Total ada 32 perusahaan sawit yang beroperasi saat ini," ujar Albidinnor pada acara *working group* RSPO, Senin (28/8/2023), di Bali.

Upaya menjaga keberlangsungan sawit, diakuinya, bukanlah perkara mudah. Di tataran hulu, konflik antara petani dan perusahaan sawit kerap terjadi. Pemicunya masalah legalitas lahan garapan. Se-

suai dengan ketentuan perundangan, perusahaan sawit wajib memberikan 20 persen lahannya untuk kebun petani swadaya. Namun, tidak banyak perusahaan yang mengimplementasikan hal itu.

Jumlah petani swadaya saat ini mencapai 20.000 orang, yang terdapat oleh penyuluh pertanian lapangan sekitar 15.000 orang. Luas lahan garapan rata-rata 1-2 hektar per petani. Lokasi lahan garapan terpecah, bahkan kerap beririsan dengan lahan konsesi dan hutan konservasi.

Untuk mengakselerasi sertifikasi yurisdiksi di Seruyan dilakukan pendataan jumlah petani, luas lahan yang digarap, dan sebarannya. Data itu penting untuk memetakan wilayah perkebunan sawit secara menyeluruh, baik yang dikelola petani swadaya, petani plasma, maupun perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Seruyan juga merampungkan regulasi berupa peraturan bupati tentang pendataan konflik usaha perkebunan di tingkat desa. Ada pula peraturan daerah tentang perkebunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.

Albidinnor mengatakan, bagi Seruyan, pengelolaan sawit secara berkelanjutan tidak hanya penting untuk menjaga bentang alam dan keberlangsungan usaha. Hal itu juga berimplikasi pada kepastian produk sawitnya bisa diterima di pasar global sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi petani.

Tantangan legalitas lahan

Chairman Kaleka, Bernadi-

us Steni Sugiarto, mengatakan, tantangan terbesar sertifikasi berkelanjutan adalah ketidakjelasan legalitas lahan garapan karena bersinggungan dengan kawasan hutan dan kawasan kebun yang dikelola perusahaan sawit. Karena itulah, perlu kolaborasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pertanian.

"Selain itu, sumber daya petani perlu ditingkatkan agar lebih banyak yang tergabung dalam organisasi petani. Hal itu berdampak pada akses terhadap program pemerintah, seperti pinjaman modal budidaya dan bantuan lain," kata Steni.

Berdasarkan data Kaleka, total penerima sertifikasi RSPO di Seruyan 624 petani, sementara 619 petani lainnya masih proses pengurusan. Jumlah itu sangat kecil dan butuh waktu lama untuk menuntaskannya melalui pendekatan konvensional.

Steni optimistis sertifikasi yurisdiksi bisa memangkas proses pengurusan karena dilakukan secara kolektif. Selain itu, meringankan beban petani karena biaya sertifikasinya berpeluang ditanggung bersama oleh perusahaan sawit dan pemerintah daerah setempat.

Permasalahannya, RSPO belum menerima pendekatan yurisdiksi (JA) sebagai salah satu sistem sertifikasi sawit berkelanjutan. Chief Executive Officer (CEO) RSPO Joseph D'Cruz mengatakan, sertifikasi perkebunan sawit menggunakan, terutama bagi petani

swadaya, karena membuka peluang masuk pasar global dan memasarkan produknya dengan harga lebih kompetitif.

Namun, sertifikasi bukanlah barang murah karena prosesnya yang memang tidak mudah. Sertifikasi yurisdiksi dianggap sebagai solusi, tetapi tantangan besar karena melibatkan banyak pihak. Mulai dari petani swadaya, organisasi petani, perusahaan perkebunan, perusahaan pengolah sawit, LSM, hingga pemerintah.

"Yang juga harus dipikirkan, kalau di dalam satu yurisdiksi terdapat satu pelanggan, jadi itu menjadi obligasi (tanggung jawab) siapa," kata Joseph.

Pihaknya masih terus mengkaji proyek percontohan penerapan sertifikasi yurisdiksi di Indonesia, Malaysia, dan Ekuador. Hasil kajian itu menjadi kerangka acuan dalam menyusun standar sertifikasi yurisdiksi yang bisa diterapkan di semua anggota RSPO.

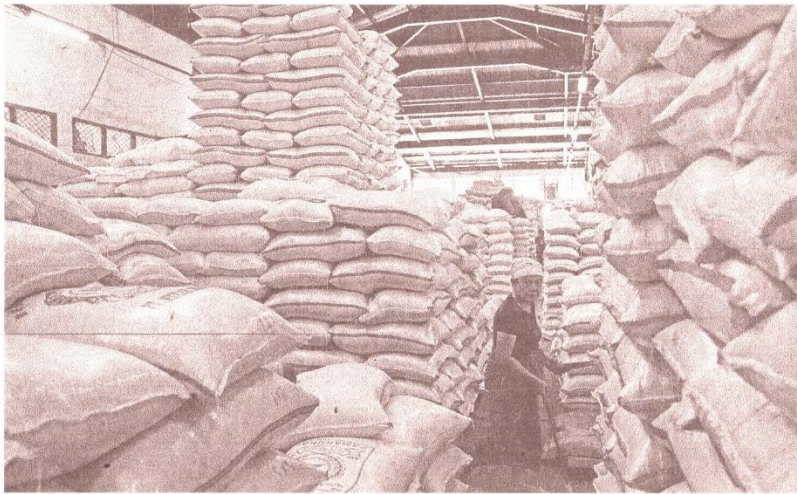
Joseph mengakui, proses menuju sertifikasi yurisdiksi masih panjang karena banyak hal yang harus dibahas sebelum diumumkan ke semua anggota RSPO. Namun, dia optimistis akan ada jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut.

Seruyan bisa jadi hanya sentra kecil perkebunan sawit di Tanah Air. Namun, dengan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, daerah ini bisa berkontribusi besar dalam membangun peta jalan menuju pasar global sawit berkelanjutan yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Lumbung Beras Darurat ASEAN+3	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Kompas	
Page	9	
Author	HEN	



Pekerja sedang menyapu lantai di pergudangan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (5/9/2023). Kekeringan akibat El Nino dapat menggerus produksi serta mengerek harga gabah dan beras. Kementerian Pertanian memperkirakan, dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang 380.000 ton. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. Sementara itu, Badan Pangan Nasional mencatat, harga rata-rata nasional beras medium di tingkat pedagang eceran per 5 September 2023 mencapai Rp 12.520 per kilogram dan beras premium Rp 14.260 per kilogram. Pemerintah menargetkan ketersediaan beras nasional sebanyak 46,84 juta ton pada 2024.

Lumbung Beras Darurat ASEAN+3

Indonesia bersama ASEAN+3 berkomitmen memperkuat lumbung beras darurat kawasan ASEAN+3. Di sisi lain, Indonesia masih terseok-seok membangun cadangan beras pemerintah di Perum Bulog.

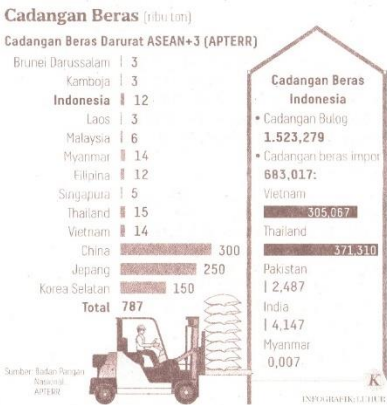
Tantangan ketahanan pangan semakin kompleks. Tantangan itu tak hanya terkait kenaikan harga, tetapi juga proteksi pangan, bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, dan perang. Di tengah situasi itu, Indonesia yang terseok-seok membangun cadangan beras pemerintah masih berkomitmen memperkuat lumbung beras darurat ASEAN+3. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, ketahanan pangan global sedang tidak baik-bekas saja. Kerawanan pangan bisa terjadi akibat perubahan iklim, kenaikan harga, dan konflik geopolitik.

"ASEAN membutuhkan strategi taktis di tengah kondisi itu. Kerja sama solid antar-negara diperlukan guna membentuk ketahanan pangan kawasan dan mencegah kerawanan pangan," ujarnya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Bisnis dan Investasi ASEAN di Jakarta, Minggu (5/9/2023).

Menurut Arief, Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun ini berhasil menginisiasi Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi di Masa Kritis. Sasarannya adalah integrasi produksi, rantai pasok, dan logistik pangan kawasan.

Di sektor perberasan, misalnya, komitmen penyediaan dan pengalokasian Cadangan Beras Darurat Asean+3 (APTERR) perlu diperkuat. "Melalui APTERR, Indonesia berkomitmen menyediakan 12.000 ton beras yang siap didistribusikan ke negara yang butuh," katanya.

APTERR merupakan skema kerja sama regional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di kawasan ASEAN+3 atau negara-negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan. APTERR ditanda-



ngani di Jakarta pada 7 Oktober 2011 dan mulai berlaku 12 Juli 2012.

Cadangan beras darurat yang harus dimiliki ASEAN+3 sebanyak 787.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 87.000 ton dari negara-negara anggota ASEAN dan 700.000 ton dari China, Jepang, dan Korea Selatan. Kuota beras setiap negara untuk APTERR berbeda-beda. Kuota RI, misalnya, sebanyak 12.000 ton, sedangkan Thailand dan China masing-masing 15.000 ton dan 300.000 ton.

Cadangan beras itu disimpan di tiap-tiap negara anggota karena APTERR belum memiliki lumbung pangan. Negara anggota yang telah menyalurkan bantuan beras ke negara lain harus mengisi lagi cadangan sesuai komitmen awal setiap tahun.

APTERR menggunakan cadangan beras itu dalam kondisi darurat, seperti bencana hidrometeorologi dan kemanusiaan, serta lonjakan harga pangan yang memicu krisis

pangan. "Tahun ini, kami juga berfokus pada dampak La Nina dan El Nino. Keduanya cenderung menimbulkan dampak signifikan terhadap produksi dan praktik pertanian, iklim, mata pencarian, dan perekonomian. Lebih khusus lagi, fenomena tersebut berdampak pada penanaman padi di kawasan ASEAN+3 di mana beras merupakan makanan pokok bagi jutaan orang," kata Manajer Umum Sekretariat APTERR Choomjet Karnjanakesorn pada 30 Agustus 2023.

Cadangan beras RI

Di tengah berbagai kondisi perberasan dan fenomena cuaca di ASEAN+3, Indonesia tengah berlibaku dengan kekeringan panjang akibat El Nino. Dampak El Nino di Indonesia telah menyebabkan kenaikan harga gabah dan beras, serta akan menggerus produksi beras nasional hingga 1,2 juta ton.

Dalam Rapat Dengar Pendapat NFA dengan Komisi IV

Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (4/9), Arief menuturkan, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog saat ini tinggal 1,523 juta ton. CBP itu bakal berkurang sebanyak 640.000 ton untuk bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama tiga bulan.

Namun, Bulog berkomitmen menyediakan stok beras sebanyak 1,2 juta ton pada awal 2024. Hal itu akan dilakukan dengan cara menyerap gabah atau beras di dalam negeri dan mengupayakan impor beras dari negara lain.

Tembiayaannya berasal dari program dana murah atau subsidi bunga yang digulirkan Kementerian Keuangan. Dengan subsidi itu, Bulog bisa memperoleh pinjaman ke bank-bank milik negara dengan bunga 2,5-4 persen," tuturnya.

Hingga akhir 2023, Bulog bakal kesulitan berapap gabah atau beras di dalam negeri karena produksi beras pada 2023 diperkirakan turun. Padahal, konsumsi beras nasional pada 2023 juga lebih tinggi 1,15 persen dibandingkan pada 2022. Kementerian Pertanian memperkirakan, dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang sebanyak 380.000 ton beras. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton.

NFA menyebutkan, defisit beras sudah terjadi pada Juli dan Agustus 2023. Defisit tersebut diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Kendati begitu, neraca produksi-konsumsi beras periode Januari-Oktober 2023 diperkirakan surplus 2,44 juta ton. Surplus beras itu turun 28,02 persen dibandingkan periode sama 2022. Faktor lain yang bakal menghambat Bulog menambah CBP adalah tingginya harga gabah kering panen di tingkat petani. (HEN)

Title	Tangani Dampak Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Kompas	
Page	6	
Author	Kompas	

Tangani Dampak Kekeringan



awah puso dan harga beras bergerak naik akibat kekeringan di sejumlah daerah. Pemerintah perlu membantu masyarakat yang terkena dampak.

Harian ini beberapa kali melaporkan terjadi kekeringan di sejumlah wilayah akibat fenomena iklim El Nino. Dalam edisi Selasa (5/9/2023), *Kompas* melaporkan sawah puso di beberapa daerah. Sementara itu, harga beras kualitas rendah dan medium bergerak naik di sejumlah kota, antara lain di Makassar dan Jakarta.

Kekeringan akibat El Nino berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, bahkan politik masyarakat. Perlu pula diperhatikan, Indonesia sedang memasuki tahun politik dan akan mengadakan pemilihan umum pada Februari 2024. Akses terhadap pangan, air, dan energi menjadi isu penting bagi masyarakat. El Nino hanya bagian dari perubahan lebih besar: perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan dan banjir secara bersamaan di satu wilayah. Kita harus melakukan pengelolaan air di tingkat nasional dan lokal.

Pemerintah sudah mengantisipasi dampak El Nino. BMKG sejak awal 2023 mengingatkan terjadinya kekeringan, tetapi pada saat bersamaan wilayah yang bersisian juga dapat mengalami curah hujan tinggi dengan akibat banjir.

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan serta berupaya mengendalikan harga pangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memperbaiki jaringan irigasi, membuat waduk dan embung. Kementerian Dalam Negeri rutin rapat dengan pemerintah daerah untuk memantau dampak kekeringan dan langkah-langkah mengatasi.

Upaya warga mencari air untuk keperluan manusia, ternak, dan tanaman tak selalu berhasil karena air tanah mengering, seperti juga embung dan bendungan. Dampak lain, penurunan kualitas sanitasi yang memengaruhi kesehatan warga.

Pangan dan pakan harus tersedia serta mudah diakses. Kita bisa memanfaatkan kerja sama pangan ASEAN. Sementara itu, warga harus menghemat air, mendiversifikasi tanaman pangan dan konsumsi pangan, serta mengatur pola tanam sesuai dengan informasi iklim. Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus menyediakan air bagi warga dengan membuat sumur dalam atau mengirim air sekaligus siaga menghadapi banjir.

Dalam jangka menengah dan panjang pemerintah melakukan proses adaptasi dan mitigasi, termasuk rekayasa sosial warga agar siap menghadapi perubahan iklim.

Perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus lebih cepat menghasilkan benih-benih tanaman tahan kekeringan, tahan salinitas tinggi, mampu beradaptasi di lahan pasang-surut dengan produktivitas tinggi, dan menyediakan teknologi pangan nonberas mudah dan menarik dikonsumsi serta bergizi lengkap di tingkat lokal.

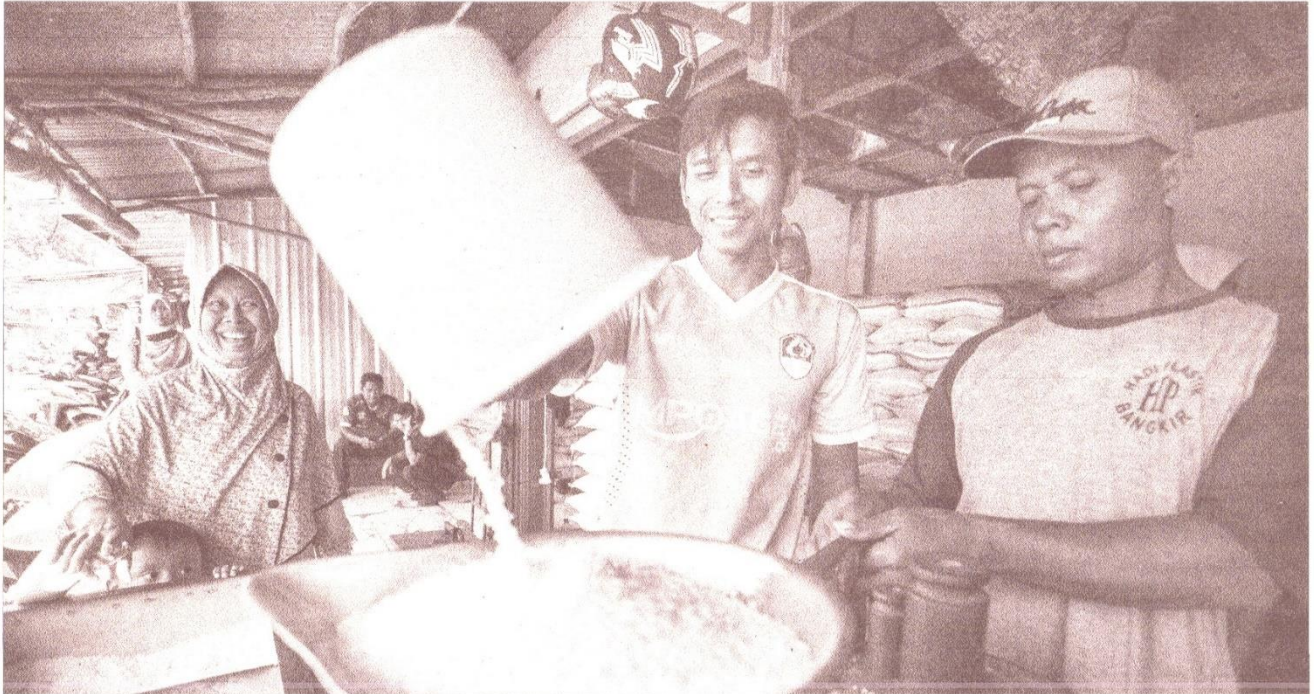
Kita semua perlu menyadari perubahan iklim adalah persoalan kompleks. Kita ingin para calon presiden dan anggota legislatif yang akan mengikuti Pemilu 2024 menyadari hal ini dan mampu melahirkan strategi serta kebijakan multidimensi yang menjamin akses yang adil bagi semua.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN**

Title	Harga Beras Naik	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	13	
Author	Koran Kontand/Dedhez Anggara	

Harga Beras Naik



ANTARA/Dedhez Anggara

Pedagang beras melayani pembeli di Pasar Indramayu, Jawa Barat, Selasa (5/9). Menurut pedagang di pasar tersebut, harga beras sejak dua pekan terakhir mengalami kenaikan dari harga Rp 10.500 kilogram (kg) menjadi Rp 11.500 per kg untuk beras medium, dan beras premium dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.000 per kg. Harga melonjak karena berkurangnya pasokan beras, sejalan dengan gagal panen di sejumlah daerah akibat musim kemarau.

Title	Kinerja Membaik, ID Food Berhasil Tekan Kerugian	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	13	
Author	Sabrina Rhamadanty	

Kinerja Membaik, ID Food Berhasil Tekan Kerugian

Perusahaan akan melakukan perampingan jumlah anak usaha

Sabrina Rhamdanty

JAKARTA. Kinerja Holding BUMN Pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau Id Food sampai dengan bulan Juli 2023 makin membaik. Perusahaan ini bisa menekan rugi bersih sebesar 71%, yakni menjadi Rp 61 miliar dibandingkan rugi bersih pada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 210 miliar.

Perseroan juga membukukan pertumbuhan laba kotor sebesar 177%, dari yang sebelumnya minus sebesar Rp 823 miliar pada 2021 dan minus Rp 297 miliar di 2022.

"Perbaikan kinerja ditopang adanya pertumbuhan pendapatan dan laba kotor, dan adanya efisiensi beban usaha," ujar Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan saat dihubungi KONTAN, Selasa (5/9).

Total aset konsolidasi Id Food juga mengalami peningkatan per Juli 2023, yaitu sebesar Rp 30,4 triliun. Aset ini lebih besar 5,92% dibandingkan dengan aset di tahun 2022 lalu yang berjumlah Rp 28,7 triliun.

Terkait target hingga akhir 2023, Id Food telah menetapkan

kan empat target kinerja keuangan. *Pertama*, adalah peningkatan pendapatan sebesar 9,5% menjadi Rp 17,2 triliun, dari sebelumnya Rp 15,7 triliun. *Kedua*, target peningkatan *gross profit* sebesar 48% menjadi Rp 2,665 triliun, dari realisasi sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun.

Ketiga, peningkatan *net profit* 209% menjadi Rp 326 miliar, dari realisasi sebelumnya yang minus Rp 298 miliar.

Keempat, peningkatan EBITDA atau perolehan laba perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar 178%, dari realisasi sebelumnya Rp 375 miliar menjadi Rp 1,046 triliun.

Frans menyebut, untuk meraih target-target tersebut, perseroan akan menerapkan lima strategi bisnis. Yakni, dengan terus mengembangkan kemitraan lokal dan global, memperluas pasar dan pengembangan model bisnis serta produk baru, melakukan penguatan sentralisasi *shared services*.

"Kami juga akan revitalisasi budaya perusahaan dan menciptakan *brand image* Id Food sebagai *top of mind*," jelas dia.

Perusahaan juga sedang

melakukan efisiensi. Salah satunya adalah melakukan *streamlining* atau *re-grouping* 16 anak perusahaan menjadi tujuh anak perusahaan saja.

Regrouping ini dilakukan karena sebagian anak perusahaan tidak sesuai dengan fokus utama perusahaan. Contohnya, ada beberapa anak usaha yang fokus pada produksi kelapa sawit dan teh. "Kami berharap sebagian bisa di-*regroup* agar di 2027 nanti hanya ada tujuh anak perusahaan saja," ujarnya.

Menurutnya, program integrasi BUMN klaster pangan telah menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan pangan semenjak bergabung pada tahun 2021. Contohnya *streamlining* bisnis anggota klaster

pangan dengan diselesaikannya merger PT BGR Logistik Indonesia (BGR) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PTI). Di mana keduanya berfokus pada bisnis yang sama, yaitu *trading* dan logistik.

Kurangi impor gula

Selanjutnya, Id Food bersama anak perusahaan telah menyiapkan beberapa program guna mengurangi impor komoditas pangan. Salah satunya adalah perluasan lahan tebu, dari sebelumnya 56.562 hektare (ha) menjadi 75.603 ha di tahun 2028.

Langkah ini adalah salah satu terobosan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gula. Se-

lain itu, perusahaan juga akan melakukan pengembangan varietas tebu unggulan tahan kekeringan yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

Selain itu, perseroan akan melakukan inovasi irigasi *bomb sprayer*, serta revitalisasi peralatan pengolahan untuk efisiensi *output* produksi. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino.

Di mana gula sebagai salah satu komoditas yang dikelola oleh Id Food turut terdampak El Nino. "Komoditas gula ini secara nasional terdampak El Nino, sehingga mengalami penurunan produksi 20% hingga 30%," jelas Frans.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Mewaspada Beras	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	15	
Author	Khomarul Hidayat	

Mewaspada Beras

Khomarul Hidayat

Walaupun inflasi secara umum masih terkendali, lain cerita dengan harga beras. Harga kebutuhan pokok rakyat Indonesia ini justru belakangan terus merembet naik. Bahkan makin jauh dari harga eceran tertinggi (HET).

Sekadar mengambil contoh, beras medium, merujuk data Badan Pangan Nasional, Selasa (5/9), harganya sudah Rp 12.520 per kg. Sementara HET beras medium hanya Rp 10.900 per kg. Sepanjang Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi harga beras eceran mencapai 1,43%. Sementara kalau dihitung dari awal tahun, harga beras sudah naik 7,99%.

Masih menurut BPS, mayoritas kota di Indonesia yakni sebanyak 86 kota dari 90 kota mencatat kenaikan harga beras. Biaya kenaikan harga beras adalah kemarau panjang atau El Nino. Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut El-Nino berpotensi menyebabkan kekeringan sekitar 870.000 hektare (ha) lahan padi. Dari luas lahan itu, potensi gagal panen bisa setara 1,2 juta ton beras.

Lazimnya hukum ekonomi, suplai yang tersendat pasti akan membuat harga beras naik. Padahal, beras adalah komoditas strategis yang harus dijaga stabilitas harganya.

Maklum, kenaikan harga beras

efek dominonya bisa kemana-mana. Tak hanya menyulut inflasi, lonjakan harga beras juga amat sensitif secara sosial maupun politik. Selama ini, impor beras adalah jalan tercepat untuk memenuhi dan mengamankan pasokan beras di dalam negeri. Namun repotnya, impor beras kini juga jadi tantangan.

Lantaran adanya El Nino, negara-negara yang biasanya menjadi peng-ekspor beras seperti India, Kamboja dan Bangladesh mementingkan kebutuhan pangan dalam negerinya ketimbang melakukan ekspor. Mereka pun membatasi ekspor.

Bukan hanya beras. Sejumlah negara juga sudah membatasi ekspor pangan lain seperti daging, jagung, terigu dan lainnya. Nah, kalau keadaan ini terus berlangsung lama, jelas akan jadi persoalan besar bagi Indonesia. Sebab, andai pasokan bahan pangan ini tak teratasi, khawatirnya krisis pangan akan menjadi ancaman nyata bagi Indonesia di masa mendatang. Dalam jangka pendek, kendala pasokan saat ini mungkin masih diatasi karena Indonesia sudah mengantongi kesepakatan impor dengan sejumlah negara.

Cuma dalam jangka panjang, ketergantungan pada impor bahan pangan sudah seharusnya berangsur dikurangi dan mulai mengandalkan pasokan pangan dari dalam negeri. Itu cara paling baik menghindari risiko krisis pangan.

Title	Produk Tembakau Alternatif di Indonesia
Date	6 September 2023
Media	Koran Kontan
Page	15
Author	Koran Kontan



Kementerian Pertanian

Produk Tembakau Alternatif di Indonesia

Penggunaan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau dipanaskan dan kantong nikotin semakin dikenal di Indonesia. Diperkirakan ada 3 juta pengguna aktif produk tembakau alternatif di negara ini.

Penggunaannya dipandang sebagai bantuan potensial bagi mereka yang ingin berhenti merokok, dan pada akhirnya, sebagai cara untuk membantu mengatasi epidemi dan prevalensi merokok di Indonesia, yang memiliki lebih dari 60 juta perokok.

Data dari Inggris menunjukkan bahwa sejak 2017 ada 50.000 perokok yang berhenti merokok setelah menggunakan produk tembakau alternatif. Bahkan analisis sistematis dari 78 studi penelitian yang dilakukan di Eropa menemukan bahwa orang lebih cenderung berhenti merokok setidaknya enam bulan setelah menggunakan produk tembakau alternatif dibandingkan metode lain.

Lalu penelitian dari badan kesehatan Prancis yang menunjukkan produk tembakau alternatif telah membantu 700.000 orang berhenti merokok antara tahun 2010-2017. Dimana ada 12-13 juta perokok di Prancis, ini berarti keberhasilan orang berhenti merokok melalui penggunaan produk tembakau alternatif mencapai 0,7% per tahun.

Jika pendekatan ini diterapkan di Indonesia, dengan 60 juta perokok, produk tembakau alternatif berpotensi membantu 420.000 orang berhenti merokok setiap tahun. Mereka bisa menjalani hidup lebih sehat dan terhindar dari kematian dini akibat penyakit terkait rokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke dan diabetes.

Terlepas dari potensinya yang jelas untuk mengatasi epidemi tembakau, ada kekhawatiran yang berkembang tentang efek kesehatan dari produk tembakau alternatif. Indonesia dan Malaysia mengizinkan penggunaan produk tembakau alternatif, negara lain seperti Singapura dan Kamboja telah melarang produk ini, menariknya Filipina telah menerapkan peraturan yang suportif. Jadi apa yang terjadi? Saya percaya bahwa ada dua alasan utama untuk pandangan yang berlawanan ini.

Pertama, ada tiga kesalahan persepsi umum tentang bahaya dan risiko penggunaan produk tembakau alternatif versus potensi manfaatnya. Kesalahpahaman nomor satu: produk tembakau alternatif sama berbahayanya dengan rokok konvensional. Padahal produk tembakau alternatif tak



Tikki Pangestu,
Former Director, Research Policy
& Cooperation WHO

menghasilkan asap tetapi uap.

Anak muda

Meskipun produk tembakau alternatif mengandung nikotin yang adiktif, dan karena itu tidak sepenuhnya bebas risiko, ada bukti kuat berdasarkan kajian ilmiah bahwa produk ini memiliki risiko 90% hingga 95% lebih rendah ketimbang asap rokok.

Penelitian terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengonfirmasi temuan ini. Namun terus ada penolakan terhadap fakta ini. Hal itu disertai titik buta dalam menilai argumen risiko atau manfaat, yaitu risiko kesehatan yang lebih rendah dalam penggunaan produk tembakau alternatif versus rokok konvensional yang meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan merokok.

Lalu ada anggapan produk tembakau alternatif dapat menyebabkan cedera paru-paru yang serius. Produk ini dikaitkan dengan penyakit paru-paru di AS pada 2019. Namun, berdasarkan analisis yang ada, kasus disebabkan produk yang mengandung kanabis yang diperoleh secara ilegal, serta vitamin E asetat (VEA) dalam jumlah signifikan.

VEA diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebab penyakit tersebut. Setelah ditemukan penyebabnya, jumlah kasus ini pun berkurang. Meskipun ada hubungan epidemiologis yang kuat antara VEA dan cedera paru-paru, pasti ada zat dan kontaminan lain yang ada dalam cairan produk temba-

kau alternatif yang dapat menyebabkan patologi yang diamati.

Namun, hal ini tidak mengurangi bukti yang menunjukkan bahwa cedera paru-paru yang diamati pada sebagian besar kasus, tidak disebabkan oleh produk tembakau alternatif itu sendiri, tetapi dengan konsumsi cairan yang terkontaminasi kanabis.

Kesalahpahaman nomor tiga: produk tembakau alternatif dipandang sebagai pintu gerbang bagi kaum muda untuk ke produk tembakau lainnya. Di Indonesia dan Malaysia, prevalensi rokok elektrik di kalangan remaja berusia antara 10-19 tahun cukup tinggi. Kendati demikian, dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, penggunaan produk tembakau alternatif di kalangan remaja sejak 2014 telah berhasil menurunkan prevalensi merokok hingga empat kali lipat di periode yang sama.

Sehingga, data ini menunjukkan hubungan terbalik antara penggunaan produk tembakau alternatif dan konsumsi rokok konvensional.

salah satu faktor utama dalam pembentukan kebijakan dan peraturan di banyak negara, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengambil sikap anti terhadap produk tembakau alternatif. Bahkan pada Conference of the Parties (COP-10) yang dilaksanakan November 2023 mendatang, WHO dan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) akan mempromosikan larangan produk tembakau alternatif.

Di Indonesia, sikap WHO telah mendorong Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemkes) mempertimbangkan peraturan yang lebih keras untuk membatasi akses ke perangkat produk tembakau alternatif, serta menyamakannya dengan rokok konvensional.

Kemkes mengabaikan bukti dan manfaat potensial produk tembakau alternatif sesuai riset-riset yang ada. Sebaliknya, Kemkes mengutip bukti secara selektif untuk mendukung kebijakan anti-produk tembakau alternatif yang ketat.

Kedepan, saya berharap pandangan terpolarisasi terkait produk tembakau alternatif akan direkonsiliasi berdasarkan pendekatan regulasi yang masuk akal, alih-alih melarangnya. Peraturan terkait produk tembakau alternatif harus didasarkan pada bukti ilmiah sehingga memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat untuk mengurangi prevalensi merokok di Indonesia. Seperti dinyatakan Profesor John Britton, Direktur Pusat Studi Tembakau dan Alkohol Inggris, "Mereka yang mengutip prinsip kehati-hatian sebagai pembenaran untuk mencegah atau melarang produk tembakau alternatif mengabaikan fakta bahwa bagi sebagian besar pengguna, kontraproduktifnya adalah kematian dini akibat merokok. Merokok membunuh. Begitu juga dengan menolak kesempatan perokok untuk berhenti."

Masa depan akan bergantung pada dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan berdasarkan kepercayaan, serta keberadaan penelitian lokal berkualitas guna mengatasi banyak kesalahan persepsi sehingga kita dapat bersama-sama bergerak menuju masyarakat yang lebih sehat sebagai bagian dari Visi Indonesia 2045. ■



nal. Jadi, anggapan bahwa produk tembakau alternatif adalah pintu gerbang ke produk tembakau lainnya masih bisa diperdebatkan, serta tergantung dengan karakteristik dan populasinya.

Dialog terbuka

Kedua, saya percaya bahwa sikap organisasi internasional yang berpengaruh terhadap isu produk tembakau alternatif telah menjadi

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN**

Title	400 Ribu Ton Beras bakal Perkuat Cadangan Pemerintah	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	10	
Author	Ant/E-3	

400 Ribu Ton Beras bakal Perkuat Cadangan Pemerintah

KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,52 juta ton saat ini dan akan didatangkan kembali sebanyak 400 ribu ton hingga akhir tahun untuk memastikan ketahanan pangan.

"Insya Allah aman (stok cadangan beras), kami jaga," kata Arief di Jakarta, kemarin.

Arief mengatakan CBP yang mencapai 1,52 juta ton tersebut dapat dipastikan memenuhi kebutuhan pangan nasional, terlebih terdapat tambahan beras impor 400 ribu ton hingga akhir tahun.

Ia menjelaskan Bapanas sejak awal 2023 merencanakan pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog. Hal itu menurut dia bertujuan menjaga stabilitas pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan.

Arief menambahkan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi saat ini bukan

karena tidak adanya stok, melainkan karena produksi dalam negeri yang memang belum mencukupi. "Kalau beras, itu kuncinya ada diproduksi, bahkan penggiling padi saat ini sangat perlu pasokan karena memang tidak ada bahannya," katanya.

Menurut dia, Bapanas mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mendistribusikan bantuan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tiap-tiap KPM mendapatkan sebanyak 10 kilogram beras selama tiga bulan. "Ada 640 ribu ton beras yang didistribusikan untuk bantuan sesuai perintah Presiden," tutur Kepala Bapanas Arief.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (4/9), Bapanas menyatakan bahwa ketersediaan 12 komoditas diproyeksikan

aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir Desember 2023.

Adapun ke-12 komoditas itu, termasuk beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi-kerbau, dan gula konsumsi juga diprediksi aman dengan catatan membutuhkan pasokan impor.

Kepala Bapanas Arief menambahkan BUMN pangan bersama Bapanas sedang berprogres dalam penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP), baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun pemberian penjaminan pemerintah.

Menurut dia, stok level tiap-tiap komoditas ditargetkan dapat mencapai 5-10% dari kebutuhan atau *marketshare* nasional untuk dapat melakukan intervensi, termasuk stabilisasi harga pasar. (Ant/E-3)

Title	Usaha Penggilingan Bertahan Jual Beras Eceran	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	7	
Author	UL/AD/BB/MR/HS/N-1	

Usaha Penggilingan Bertahan Jual Beras Eceran

USAHA penggilingan gabah Sri Rejeki, Desa Wangkelang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, bertahan dengan menjual beras eceran di tengah harga beras mahal. Kini harga jual beras mulai Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per kg.

Icih, pengelola penggilingan Sri Rejeki, mengaku sudah dua bulan ini penggilingannya tidak lagi memasok beras ke pasar karena gabah susah dicari.

"Harga gabah saat ini sudah sangat tinggi. Padahal, bi-

asanya kami bisa menggiling hingga 2 ton per hari," kata Icih, kemarin.

Kini penggilingannya menjual beras secara eceran. "Berasnya kami ambil dari penggilingan lain," tutur Icih.

Perum Bulog Banyumas, Jawa Tengah, telah menggelontorkan ratusan ton beras ke pasar-pasar tradisional lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau operasi pasar. Namun, harga beras medium masih tinggi, yakni Rp13 ribu per kg.

Harga beras di Kota Sukabumi, Jawa Barat, pun masih berfluktuasi dengan kecenderungan naik. Dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan (DKP3) setempat pun berupaya mengendalikan harga agar bisa stabil.

Kepala DKP3 Kota Sukabumi, Adrian Hariadi, menuturkan upaya pengendalian harga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menggelar pangan murah.

Dalam mengatasi beras

yang mahal dan tidak terbeli oleh warga tidak mampu, Bupati Garut Rudy Gunawan berencana memberikan bantuan beras. Dari hasil sidak di pasar, harga beras premium dijual Rp17 ribu per kg dan beras medium Rp13.500 per kg.

"Situasi ini sangat membebankan bagi masyarakat di Garut karena potensi inflasi dan kesulitan membeli beras. Pemerintah daerah berencana mendistribusikan 100 ton beras secara gratis kepada keluarga terdampak kemarau

panjang," ujar Rudy, kemarin.

Di tengah lonjakan harga beras, harga ayam potong justru anjlok di Kota Sigli, Aceh. Biasanya harga ayam potong Rp23 ribu per ekor, tetapi kini turun Rp19 ribu per ekor. Kendati harga turun, daya beli masyarakat juga turun.

Di saat harga beras naik, muncul berkah bagi petani buah tin atau ara di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Permintaan buah yang berasal dari wilayah gurun itu secara daring meningkat tajam. (UL/AD/BB/MR/HS/N-1)

Title	Australia Barat Gelar Misi Dagang ke RI	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	9	
Author	Pikiran Rakyat	

Australia Barat Gelar Misi Dagang ke RI

JAKARTA, (PR).-

Pemimpin Australia Barat (Western Australia/WA) Roger Cook melaksanakan misi perdagangan bersejarah ke Indonesia. Misi ini diikuti lebih dari 130 perwakilan dunia usaha dan pemerintah. Ini juga menjadi misi luar negeri pertama Roger Cook sebagai Premier Australia Barat.

"Misi dagang bersejarah ke Indonesia ini adalah misi luar negeri pertama saya sebagai Premier. Misi ini akan memainkan peran penting dalam masa depan Australia Barat dan khususnya rencana untuk mendiversifikasi perekonomian kami," kata Roger dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/9/2023) sore, seperti dilaporkan kontributor "PR" **Satrio Widiyanto**.

Misi ini juga melibatkan tiga anggota kabinet Cook, yaitu David Templeman, Menteri Kebudayaan dan Seni, Olahraga dan Rekreasi, Pendidikan Internasional, dan Warisan; Bill Johnston, Menteri Pertambangan dan Perminyakan, Energi, Industri Hidrogen, dan Hubungan Industri; serta Jackie Jarvis, Menteri Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Bisnis Kecil.

"Ini adalah kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan para pelaku industri di seluruh Indonesia, salah satu tetangga terdekat dan paling berharga bagi kami. Indonesia adalah mitra yang diakui dan dipercaya dan oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari cara-cara baru untuk memperdalam hubungan kita – yang memberikan peluang investasi dan lapangan kerja lokal bagi warga Western Australia," ujar Cook.

Ditambahkan, besarnya skala delegasi ini menunjukkan betapa seriusnya kami memandang hubungan ini, itulah sebabnya tiga anggota penting Kabinet saya akan bergabung dengan saya dalam misi ini, untuk mewakili sebanyak mungkin kepentingan Australia Barat.

Promosi

Indonesia Connect Roadshow menyediakan platform untuk mempromosikan Western Australia sebagai mitra yang diakui dan terpercaya, serta peluang bagi bisnis di negara itu untuk terlibat dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya.

Roadshow dimulai di Jakarta dengan ASEAN Business and Investment Summit yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ini mewakili peluang penting bagi para delegasi untuk meningkatkan profil Australia Barat. Mempromosikan peluang kolaborasi di sektor energi. Pertemuan ini juga mencakup pidato Premier Australia Barat yang akan membahas hubungan penting Australia Barat dengan kawasan ASEAN.

Energy Roundtable dengan Kadin tersebut diselenggarakan di sela-sela ASEAN Business and Investment Summit. Persamuhan tersebut akan berfokus pada pengembangan rantai pasokan industri mineral dan baterai yang bernilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan di kedua wilayah.***

Tittle	El Nino, La Nina, dan Ancaman bagi Dunia	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Inilah Koran	
Page	1 Part 1	
Author	Jafar m sidik/ing	

El Nino, La Nina, dan Ancaman bagi Dunia

PERUBAHAN cuaca menjadi lebih panas itu membuat wilayah-wilayah tropis terancam kekeringan.

Belakangan masa ini nyaris tak ada satu hari tanpa berita cuaca ekstrem. Panas menyengat dan badai-badai dahsyat pemicu angin kencang, melanda banyak tempat di dunia.

Akibatnya, sejumlah tempat di dunia, termasuk Eropa, dihantam kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat.

Situasi sama terjadi di Benua Amerika, khususnya Amerika Serikat dan Kanada, sampai jauh ke Hawaii, di mana kebakaran lahan terhebat di Amerika Serikat dalam hampir seabad terakhir

terjadi di sana.

Yang membuat panas kali ini membuat dunia semakin was-was adalah datangnya lagi El Nino, setelah tiga tahun absen. Badan Oseanografi dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA), bahkan memperkirakan El Nino kali ini kemungkinan baru berhenti Februari 2024.

Mengutip keterangan Climate.gov, El Nino adalah pemanasan permukaan laut atau suhu permukaan laut di atas rata-rata (SST) di Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur.

Saat fenomena ini terjadi, curah hujan cenderung berkurang di Indonesia. Sebaliknya, curah hujan meningkat di wilayah tropis Samudera Pasifik.



ANTARA FOTO

Pada periode ini, angin permukaan tingkat rendah yang biasanya bertiup dari timur ke barat sepanjang garis khatulistiwa (angin timur), melemah untuk kemudian bertiup dari barat ke timur (angin barat).

Sebaliknya, La Nina adalah pendinginan permukaan laut atau suhu permukaan laut di bawah rata-rata (SST) di Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur.

Dalam fenomena ini, kalau di Indonesia, curah hujan

cenderung meningkat, justru di wilayah tropis tengah Samudera Pasifik, curah hujan menurun. Angin timur normal di sepanjang khatulistiwa menjadi semakin kuat.

El Nino biasanya terjadi manakala suhu permukaan laut di Pasifik timur tropis naik paling sedikit 0,5 derajat Celcius di atas rata-rata iklim dalam jangka panjang.

Fenomena ini biasanya terjadi dalam dua tahun hingga tujuh tahun sekali, tapi gangguannya pada pola cuaca normal sungguh dahsyat, salah satunya adalah mengacaukan siklus tanam pertanian, sehingga merusak ketahanan pangan di banyak wilayah dunia.

» Bersambung ke Hal 11

Title	El Nino, La Nina, dan Ancaman bagi Dunia	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Inilah Koran	
Page	1 Part 2	
Author	Jafar m sidik/ing	

... El Nino, La Nina, dan Ancaman bagi Dunia

> Sambungan hal 1

Tahun 2023 diyakini banyak kalangan pakar sebagai tahun paling panas, dan keadaan ini diprediksi berlanjut sampai 2024 yang disebut-sebut juga bakal lebih panas lagi, mendekati 1,4 derajat C di atas suhu sebelum era revolusi industri.

Perubahan cuaca menjadi lebih panas itu membuat wilayah-wilayah tropis terancam kekeringan, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan memicu penyakit yang bisa berubah menjadi wabah. El Nino bisa memperburuk keadaan ini.

Lebih dahsyat

Menurut NOAA, El Nino tahun ini bakal menjadi El Nino yang lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bayangkan apa yang bisa terjadi tahun ini dan nanti jika saat terakhir kali fenomena ini mengharu biru dunia pada 2014-2016 saja sudah merusak banyak hal.

Kerusakan itu, mulai dari siklus pangan yang kacau di Afrika Selatan, sehingga produksi pangan anjlok ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir, sampai memicu kebakaran hutan terburuk di Indonesia yang membuat negara-negara tetangga terusik, sehingga menjadi masalah kawasan, bahkan memicu wabah penyakit di beberapa tempat.

Salah satu alasan mengapa El Nino kali ini bisa lebih dahsyat, adalah karena terjadi bersamaan dengan pemanasan

global yang kian akut.

Dalam kaitan itu, badan-badan kemanusiaan sampai mengingatkan bakal menimbulkan situasi rawan pangan di berbagai tempat, termasuk Asia Tenggara, dan sanitasi serta wabah penyakit di Afrika dan Amerika Selatan.

Kabar baiknya, El Nino adalah fenomena yang bisa diprediksi, sehingga dampak buruknya bisa ditekan karena masyarakat dan pemerintah di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, semakin siap menghadapinya.

Tiga hari lalu, pada 27 Agustus 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa sampai Oktober nanti, Sumatera bagian tengah hingga Selatan, Riau bagian Selatan, Jambi, Lampung, Banten, dan Jawa Barat, berpotensi menjadi daerah-daerah di Indonesia yang terkena dampak terparah fenomena El Nino.

Sebelum itu, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi skenario terburuk akibat El Nino, termasuk dampaknya terhadap ketahanan pangan, di antaranya dengan menetapkan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, sebagai enam provinsi penjaga pasokan beras nasional terjaga selama El Nino.

Pemerintah juga menyiapkan sembilan skema antisipasi iklim ekstrem akibat El Nino, yang di antaranya adalah men-

gidentifikasi dan memetakan lokasi terdampak kekeringan, mempercepat pola tanam, meningkatkan ketersediaan air, menyediakan benih pertanian, program 1.000 hektare, dan menyiapkan lumbung pangan hingga tingkat desa.

Tentu saja itu belum cukup karena El Nino juga memicu bencana alam yang bakal menuntut langkah tanggap darurat yang menyeluruh, termasuk anggaran yang cukup dan petugas penyelamat yang sigap mengatasi bencana apa pun, sehingga tidak merusak banyak hal, termasuk meminimalkan korban jiwa.

Apalagi situasi yang terjadi di Eropa, Hawaii, dan banyak tempat di dunia saat ini, mengajarkan kepada Indonesia, agar terus menaikkan level kesiapan pada tingkat paripurna, bukan saja untuk melawan atau menjinakkan bencana, namun juga bagaimana malapetaka tidak menciptakan dampak yang terlalu buruk kepada manusia dan pencapaian kehidupannya.

Namun, jika melihat apa yang dilakukan berbagai lembaga dan badan nasional, mulai dari Kementerian Pertanian sampai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tengah menyiapkan langkah menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, Indonesia sejauh ini tampaknya siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk akibat El Nino. (jafar m sidik/ing)

Title	Harga Beras Naik Alarm Ketahanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	1 Part 1	
Author	Hendro Husodo, Ririn Nur Febriani/PR	

Harga Beras Naik Alarm Ketahanan Pangan

KETAHANAN pangan Indonesia kini tengah menghadapi ujian. Sesuai prediksi pakar agroklimatologi, fenomena kekeringan ekstrem atau El Nino pada 2023 sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Fenomena ini akan berlanjut hingga akhir siklusnya, yaitu hingga pertengahan 2024.

EL Nino berdampak pada cadangan bahan pangan yang salah satunya adalah beras. Adanya kekeringan ini bisa menyebabkan produksi beras kita hilang hingga 1,2 juta ton. Padahal, kontrak beras impor sebanyak 400.000 ton dari jatah pengadaan luar negeri sepanjang 2023 belum terealisasi. Hal ini membuat cadangan beras pemerintah atau CBP pada tahun ini menghadapi tekanan. Hiruk pikuk Pemilu

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Luas Panen Padi per Tahun

Januari-April 2023
4,51 juta hektare

2022: **10,45 juta hektare**
2021: **10,41 juta hektare**

Produksi Panen Padi per Tahun

Mei-Agustus 2023
4,51 juta hektare

2022: **54,75 juta ton**
2021: **54,42 juta ton**

Produksi Beras per Tahun

Januari-September 2023
27,878 juta ton

2022: **31,54 juta ton**
2021: **31,36 juta ton**

Daerah Penghasil Beras Januari-April 2023

- Jawa Timur: 4.769,08 ton
- Jawa Tengah: 4.434,64 ton
- Jawa Barat: 3.887,54 ton
- Sulawesi Selatan: 1.902,33 ton
- Sumatra Selatan: 1.286,56 ton
- Lampung: 1.137,59 ton
- Sumatra Utara: 891,44 ton
- Nusa Tenggara Barat: 883,91 ton
- Banten: 774,5 ton
- Aceh: 618,08 ton

VOLUME EKSPOR BERAS

Indonesia 2.839 ton sepanjang periode Januari-Oktober 2022. Jumlah tersebut turun 3,82% dari periode yang sama tahun 2021.



VOLUME IMPOR BERAS INDONESIA Kuartal I 2020–Kuartal IV 2022*

■ Nilai impor beras nasional periode Januari-Oktober 2022 mencapai 137,42 juta dolar AS, turun 5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

■ Tiga tahun terakhir volume impor beras Indonesia mencapai level tertinggi pada kuartal III 2022, yakni 162,220 ton. Jumlah tersebut melonjak 116% dibanding kuartal sebelumnya, serta naik 76,3% dibanding kuartal III tahun 2021.



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN

Title	Harga Beras Naik Alarm Ketahanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	1 Part 2	
Author	Hendro Husodo, Ririn Nur Febriani/PR	

Harga Beras Naik

(Sambungan dari hal. 1 kol. 2)

2023 menambah tekanan pada ketahanan pangan RI.

Harga beras pun terus tinggi. Harga beras mengalami kenaikan sejak beberapa pekan terakhir di pasaran Kota Cimahi. Kenaikan harga beras terpantau di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Selasa (5/9/2023).

Rerata pedagang menjual beras melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Contohnya saja beras medium dijual Rp 13.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 11.000 per kilogram. Sementara HET beras medium sebesar Rp10.900 per kilogram.

Begitu pun untuk beras premium kini dijual Rp 14.500 per kilogram, harga normal kisaran Rp 12.500 per kilogram. Harga tersebut melebihi HET yang sudah ditetapkan yakni Rp 13.900 per kilogram.

Pedagang beras bernama Moreno (33), mengatakan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak bulan Juli 2023.

"Memang ada kenaikan harga beras sudah sejak Juli, bulan Agustus paling tinggi. Beda sehari ada perubahan harga naik terus," ujarnya.

Kenaikan harga beras tentu menuntut adanya solusi yang jitu agar tidak muncul permasalahan serius. Pemerintah sudah melakukan antisipasi. Melalui Perum Bulog, pemerintah menargetkan impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023 untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan, tidak akan ada impor tambahan beras.

Dia menyampaikan tantangan saat ini yaitu konsisten menjaga kebutuhan impor. Jangan sampai negara sudah percaya diri untuk tidak impor, tetapi berujung tetap melakukan impor. "Kalau butuh impor, kami akan impor, jadi sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Hingga kini, impor beras yang telah terealisasi Bulog sebanyak 1,6 juta ton beras dari total penugasan 2,3 juta

ton, terdiri atas 300.000 ton dari sisa penugasan pada 2022 dan 2 juta ton dari penugasan 2023. "Sudah datang untuk stok (tahun) ini 1,3 juta ton dari 2 juta ton, itu sudah kami kuasai. Tinggal masuk 700.000 ton, sisanya 400.000-an ton terus bertahap," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim, pasokan beras dalam keadaan aman hingga Desember tahun ini. Bahkan, diprediksi memiliki kelebihan pasokan lebih dari 2,7 juta ton pada September 2023.

"Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800.000 hektare (ha), masih cukup untuk kebutuhan kita di atas 2 juta (ton)," ujarnya. Meski demikian, Syahrul menyebut pemerintah tetap akan waspada. Apalagi, ada terjadi El Nino.

Menurut Syahrul, El Nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton. "Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas dari El Nino sekitar 300.000 ton sampai 1,2 juta ton," ujarnya seperti dilaporkan kontributor "PR" **Satrio**

Widianto.

Syahrul mengklaim sudah berkeliling ke 7 provinsi yang akan mempersiapkan lahan cadangan untuk menambal gagal panen tersebut. Masing-masing 1 tempat di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan, 3 di Jawa, serta 1 di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada daerah penyangga, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Banten, dan Lampung.

Alarm

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons kebijakan India yang menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurut Zulhas, hal ini menjadi alarm agar Indonesia segera merealisasikan swasembada pangan.

Zulkifli mengingatkan agar RI tak perlu bergantung terus pada impor. "Kita harus swasembada pangan. Walaupun Menteri Perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut, Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor

dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta *trade balance* atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapenas.

Kendati begitu, dia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai. "Jika saat ini India meng-*hold* eksportnya ke beberapa negara, memang bukan Indonesia dalam posisi meminta beras dari India," katanya.

Arief menegaskan, pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel. Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500.000 ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan Pak Presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief. (**Hendro Husodo, Ririn Nur Febriani/PR**)***

Title	Kukar Siapkan Asuransi untuk Petani	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Tribun Kaltim	
Page	1 Part 1	
Author	Aul	

Kukar Siapkan Asuransi untuk Petani

► Dicairkan Jika Ratusan Hektare Padi Gagal Panen



Kemarin kita tinjau ternyata masih ada sumber air walaupun kecil, jadi ini masih bisa dioptimalkan dengan menggunakan pompa air

MUHAMMAD TAUFIK
Kepala Dinas Pertanian dan
Pernakan Kukar

TENGGARONG, TRIBUN-Ratusan hektare padi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terancam gagal panen karena kemarau berkepanjangan. Meski begitu petani tidak perlu khawatir, karena Dinas Pertanian dan Pernakan (Distanak) Kukar menyiapkan asuransi. Kepala Dinas Pertanian dan Pernakan (Distanak) Kutai Kartanegara, Muhammad Taufik mengatakan, ada 200 hektare lahan pertanian padi yang berpotensi gagal panen atau puso.

● BersambungHal 7

Title	Kukar Siapkan Asuransi untuk Petani	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Tribun Kaltim	
Page	1 Part 2	
Author	Aul	

Kukar Siapkan Asuransi untuk Petani

• Sambungan Hal 1

"Jadi baru ada indikasi, tapi jumlahnya tidak banyak. Di bawah 200 hektare," ujar Taufik, Selasa (5/9/2023).

Melihat kondisi tersebut, Distanak Kukar bergerak cepat untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kodim 0906/KKR, telah melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah lahan pertanian di Kukar.

Dari hasil peninjauan tersebut, Distanak telah menentukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi terjadinya gagal panen. "Kemarin kita tinjau ternyata masih ada sumber air walaupun kecil, jadi ini masih bisa dioptimalkan dengan menggunakan pompa air," ungkapnya.

Taufik berpesan, bagi petani yang mulai mengalami kekeringan agar segera berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sehingga dapat dibantu melakukan pengairan lahan dengan menggunakan pom-

pa air yang telah disiapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar. "Mudah-mudahan bisa membantu, walau mungkin jangkauannya tidak luas," tambahnya.

Selain itu, Distanak Kutai Kartanegara mengusulkan pemberian kompensasi berupa asuransi kepada petani. Asuransi tersebut akan diberikan apabila petani di Kutai Kartanegara gagal panen akibat musim kemarau yang tengah melanda Provinsi Kalimantan Timur.

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi mulai bulan Agustus hingga Oktober, Benua Etam dilanda musim kemarau. Hal ini dipicu karena fenomena el nino. Sehingga memungkinkan terjadinya gagal panen, sumber air baku mengering hingga kebakaran hutan dan lahan. "Salah satu upaya kami adalah mensosialisasikan program asuransi usaha tani," kata Kepala Distanak Kutai Kartanegara, M Taufik kepada TribunKaltim.

Mengantisipasi fenomena ini, Distanak Kutai Kartanegara mulai melakukan monitoring dan pendataan. Taufik mengungkapkan, sudah ada beberapa petani di desa-desa yang melapor ke peme-

rintah terkait musim kemarau. Beberapa petani bahkan sangat terdampak fenomena ini. "Asuransi petani adalah hal yang bisa menjadi jawaban jika terjadi gagal panen, petani bisa diupayakan untuk mendapatkan kompensasi," jelas Taufik.

Mengingat tingginya manfaat asuransi yang merupakan program nasional ini, Distanak mulai melakukan pendataan ulang. Pendataan ulang tersebut untuk mengetahui berapa banyak petani yang belum memiliki asuransi. Sembari mengimbau para petani untuk memperstapakan kolam-kolam kecil sebagai sumber alternatif perairan.

Dengan perkiraan berlangsungnya musim kemarau ini hingga Oktober, Taufik memperkirakan padi terancam gagal panen. Dikarenakan masa pertumbuhan yang tengah berlangsung. Taufik tidak menampik bahwa faktor alam ini akan mempengaruhi harga pangan di pasaran. "Ini bisa menimbulkan inflasi. Untuk itu kita terus mendorong petani agar bisa melakukan statistik sehingga bisa mengantisipasi kekeringan ini. Terutama di daerah pedalaman yang akan kesulitan pasokan pangan," pungkasnya. (aul)

Title	Lotim Dipastikan Aman dari Ancaman Kerawanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	8	
Author	Rus	

Lotim Dipastikan Aman dari Ancaman Kerawanan Pangan

Selong (Suara NTB)-

Musim El Nino yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini membuat aktivitas produksi pangan, utamanya padi menurun. Kondisi ini diduga memicu terus melonjaknya harga beras. Meski begitu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memastikan Lotim masih cukup aman dari ancaman kerawanan pangan.

Menjawab *Suara NTB*, Selasa (5/9), Kepala DKP Lotim, Drh. Achsan Nasirul Huda mengaku sudah keliling mengecek kondisi pangan masyarakat di pasar-pasar. Diakui, selama beberapa hari terakhir ini harga beras sebagai pangan utama masyarakat Lotim terus meningkat.

DKP melihat stok pangan masyarakat sejauh ini masih mencukupi. Di samping itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) juga terus melakukan kegi-

atan Operasi Pasar (OP). Stok cadangan pangan yang tersimpan di Bulog disebut juga masih relatif aman sampai beberapa bulan ke depan.

"Kita terus Koordinasi dengan Bulog dan kita datang ke kios-kios penjual pangan di pasar-pasar," terangnya. Soal harga saat ini premium sudah tembus Rp 13 ribu lebih per kilogram. Sedangkan medium Rp 12 ribu per kilogram. Harga dari Bulog sendiri Rp 9.450 Per Kilogram.

Saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Presiden Jokowi juga memastikan stok beras cukup dari pusat sampai daerah. Bera- pa jumlah kenaikannya saat ini terus terpantau. Gejolak harga terlalu tinggi langsung disikapi sehingga tidak terjadi inflasi yang berlebihan.

Dari Badan Ketahanan Pangan Nasional juga sudah siap

akan salurkan beras dari Cadangan Pangan Nasional ke masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini di luar operasi pasar. Pendistribusian nanti lewat Dinas Sosial yang akan diberikan kepada warga sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlahnya 147.122 penerima manfaat dengan jumlah beras sebanyak 4.416 ton dan yang akan disalurkan selama tiga bulan. Masing-masing Kelompok Penerima Manfaat (KPM) 10 kg. "Kalau kurang juga akan Bulog akan datangkan beras dari luar daerah," ungkapnya menambahkan.

Menurut Kadis DKP, produksi memang berkurang karena berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian, jumlah yang tanam padi berkurang. "Insya Allah tidak sampai rawan pangan karena stok ada," demikian. **(rus)**



(Suara NTB/Ist)

CEK PASAR - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Achsan Nasirul Huda mengecek stok beras di pasar.

Title	Poktan Terima Bantuan Mesin Pompa Air	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Tangerang Raya	
Page	5	
Author	Ian/ris	

Poktan Terima Bantuan Mesin Pompa Air

ANTISIPASI FENOMENA EL NINO



PANDEGLANG | TRM

Guna mengantisipasi fenomena El nino di Provinsi Banten, Kementerian Pertanian mengunjungi Kabupaten Pandeglang yang didampingi oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten. Pasalnya, Banten termasuk kedalam salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian terluas.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi fenomena el nino salah satunya, bantuan pembangunan sumur bor dan mesin pompa air. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung usaha pertanian yang dilakukan kelompok petani di daerah irigasi potensial yang mengalami krisis air sebagai dampak fenomena El Nino.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar tanaman

wilayah pertanian di Provinsi Banten tidak mengalami krisis. Upaya antisipasi itu sudah dilakukan sejak bulan Mei hingga Agustus 2023.

"Dalam rangka pengendalian dan antisipasi El nino yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Banten dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mengadakan gerakan pengendalian dampak perubahan iklim," katanya, kemarin.

Disebutkannya, terdapat

dua unit mesin pompa yang sudah diserahkan pada kelompok tani yang berada di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang.

"Dua unit mesin pompa air ini kita serahkan hari ini kepada kelompok. Diharapkan bisa untuk menyalurkan air bagi lahan petani dengan luasan kurang lebih bisa mencapai 25 hektare. Dan mudah-mudahan nanti nya bisa menyelamatkan tanaman padi petani," ujarnya.

Tidak hanya Kecamatan Angsana saja yang memperoleh bantuan mesin pompa air dan pembuatan sumur. Akan tetapi ada beberapa Kecamatan lainnya di Kabupaten Pandeglang yang sudah mendapatkan bantuan mesin pompa air. Salah satunya Kecamatan Carita, Kecamatan Cikeusik.

"Selain menyerahkan bantuan pompa mesin air. Kami juga bersama dengan

pihak kementerian meninjau lokasi sumur pompa air di Kecamatan Carita," pungkasnya.

Bukan saja bantuan pompa air yang sudah diberikan oleh Distan Banten untuk mengantisipasi fenomena el nino tersebut. Melainkan, pihaknya juga sudah menggelar kegiatan gerakan penanganan (PPHT) DPI pembersihan saluran parit (irigasi cacai) di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.

Bantuan Dem area DPI sumur pantek di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang dan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) pembinaan menerapkan PHT pada lokasi endemis OPT WBC.

Sedangkan pada APBD perubahan sudah memproyeksikan bakal membangun 150 sumur dalam guna mengantisipasi fenomena el nino. "Para petani segera

mendaftarkan diri dalam program asuransi usaha tani padi (AUTP). Sehingga, saat terjadi gagal panen para petani tidak begitu merugi," harapnya.

"Segera daftarkan asuransi untuk lahan pertaniannya agar nanti kalau terjadi gagal panen tidak terlalu merugi," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Perbenihan pada Kementerian Pertanian Dr.Yudi Sastro menyebut, bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat stimulan bagi para petani.

"Bantuan yang diberikan dari pemerintah ini sifatnya hanya stimulan untuk membantu petani guna mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino," katanya.

Selain Kementerian Pertanian dan Distan Provinsi Banten kegiatan tersebut turut dihadiri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. (ian/ris)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMERTAN

Title	Rp400 Juta Untuk AUTP	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Inilah Koran	
Page	4	
Author	Ant	

Rp400 Juta Untuk AUTP

PEMKAB Cirebon mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta lebih untuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk luas lahan sawah 11.500 hektare agar petani tidak terlalu rugi ketika gagal panen akibat musim kemarau maupun dampak lain seperti serangan hama.

Oleh : Ahmad Sayuti

Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Samsina mengaku pihaknya berupaya agar petani ikut asuransi. Dengan demikian, ketika kemarau panjang dan gagal panen petani tidak mengalami kerugian.

"Tahun ini kita mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sekitar 11.500 hektare atau Rp400 juta lebih untuk AUTP," kata di Cirebon, Senin (4/9).

Ia mengatakan program AUTP itu bagi masing-masing petani yang daftar untuk mendapatkan asuransi sebesar Rp180 ribu per hektare yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah daerah dan pusat.

"Total Rp180 ribu per hektare untuk AUTP. Di mana Rp36 ribu dari Pemkab Cirebon dan yang Rp144 ribu dari kementerian," katanya.

Ia mengatakan program AUTP itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam membantu petani agar tidak mengalami banyak kerugian saat musim kemarau, apalagi saat ini seba-

gian wilayah Cirebon dilanda bencana kekeringan.

Menurut dia adanya AUTP itu petani di Cirebon akan merasa aman untuk tetap memproduksi padi dalam rangka memenuhi pasokan beras di tingkat daerah.

"Itu sudah digelontorkan semuanya, dihitungnya per hektare. Jadi, setiap hektare bisa

ada satu sampai dua petani, karena berbeda-beda," katanya

Ia menyampaikan, jajarannya juga terus berupaya meminimalisasi dampak kekeringan yang terjadi di lahan pertanian wilayah Kabupaten Cirebon.

Salah satunya, lanjut dia, dengan mengimbau petani untuk merawat dan menjaga padi

yang sudah ditanam agar terus tumbuh sampai bisa panen.

"Petani harus memanfaatkan sumber air yang ada, kalau bisa dilakukan pemompaan, maka dijaga. Apabila untuk yang sudah menanam padi, untuk tanam bulan Juli sebentar lagi sudah mulai panen," katanya.

Ia menilai kekeringan selalu menjadi persoalan klasik

yang setiap tahun saat musim kemarau selalu terjadi di Kabupaten Cirebon. Untuk itu,

pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, solusi yang bisa dilakukan sekarang dengan memperbaiki saluran irigasi menuju areal sawah kare-

na beberapa titik telah terjadi pendangkalan dan menghambat pasokan air.

"Kalau masalah kekeringan di Kabupaten Cirebon tidak hanya sekarang, tahun ke belakang saat musim hujan kebanjiran, dan musim kemarau mengalami kekeringan, dilematnya seperti itu, harus ada upaya," katanya. (ant)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Tak SAda Kejelasan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Surya	
Page	4	
Author	Cw	

Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Tak Ada Kejelasan

► KPI Lumajang Jengah hingga Ajukan Praperadilan

LUMAJANG, SURYA - Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Lumajang mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang atas kasus tindak pidana korupsi bibit Pisang Mas Kirana. Permohonan praperadilan tersebut kini telah disidangkan pertama kali pada Selasa (5/9). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua I Nyoman Ary Mudjana.

Sebelumnya, KPI Lumajang telah menggugat Kejaksaan Negeri (Menarik) Kabupaten Lumajang lantaran ingin mengetahui kejelasan

penanganan kasus korupsi Pisang Mas Kirana.

Sebagai informasi, kasus tindak pidana korupsi bibit Pisang Mas Kirana sejatinya telah bergulir sejak tahun 2020 silam. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai status hukum kasus tersebut.

"Kalau segera ada penetapan tersangka ya tetapkan, kalau sampai SP3 (surat perintah pemberhentian penyidikan) ya umumkan. Kami sebagai masyarakat mempunyai hak untuk uji terha-

dap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan (Kejari Lumajang)," ujar Ketua KPI Lumajang, Indra Hosi Efendy ketika dikonfirmasi usai persidangan.

Hosi menjelaskan, permohonan praperadilan turut diajukan dengan termohon di antaranya Jaksa Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan

Korupsi, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam sidang perdana tersebut, pihak termohon yakni Jaksa Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tidak hadir.

Sementara itu, Hosi berharap kasus korupsi bibit Pisang bisa ditangani secara benar oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang.

"Kami lebih ke arah materinya

dan mempertanyakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang dalam menangani kasus ini. Kepastian hukum harus ada. Kalau saya lihat sudah dua tahun kasus ini dengan kerugian Rp 800 juta yang kami pertanyakan," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Persidangan praperadilan selanjutnya dijadwalkan pada 19 September 2023. KPI Lumajang ingin pihak Kejaksaan Negeri Lumajang hadir dalam sidang.

"Dengan tidak hadirnya pihak Kejari Lumajang ya jelas kecewa, ada apa ini sebenarnya," jelas Hosi.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejaksa-

an Negeri Kabupaten Lumajang, Yudi Teguh Santoso memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran pihaknya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Lumajang siang tadi.

"Kejaksaan selaku termohon tidak menghadiri gugatan praperadilan karena masih menyiapkan bukti-bukti yg akan dibawa ke persidangan," tutur Yudi ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, mengenai perkembangan terkini penanganan kasus dugaan korupsi bibit Pisang Mas Kirana, Yudi belum bisa memberikan keterangan rinci.

"Nanti tak tanya bidang pidsus dulu ya," tutupnya. (ew)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pentingnya Penghiliran Pangan
Date	6 September 2023
Media	Harian Jogja
Page	4
Author	JIBI/Bisnis Indonesia



Kementerian Pertanian

Pentingnya Penghiliran Pangan



Rifa Naufalin
Guru Besar Teknologi Pangan Fakultas
Pertanian Universitas Soedirman

Penghiliran sektor pangan akan menjadi fokus pemerintah pada 2023. Penghiliran sektor pangan yaitu pada berbagai komoditas di antaranya di bidang hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Komoditas penghiliran unggulan di Direktorat Jenderal Perkebunan di antaranya adalah sawit, kopi, kakao, minyak atsiri, dan kelapa. Sedangkan, untuk komoditas penghiliran utama yaitu bawang merah, cabai, pisang, nanas dan beraneka tanaman obat. Penghiliran merupakan strategi pendekatan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memiliki potensi untuk membantu pengendalian inflasi.

Pendekatan ini dianggap

sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bahkan memiliki potensi signifikan dalam pengendalian inflasi. Penghiliran, yang melibatkan proses pengolahan dan peningkatan nilai produk pertanian, memiliki tujuan mewujudkan produk olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, penghiliran memiliki peran penting dalam memperkuat kestabilan pasokan pangan. Melalui tindakan penghiliran, potensi kenaikan harga yang tajam dapat ditekan, sehingga harga-harga pangan cenderung lebih stabil.

Selain itu melalui penghiliran dapat menjadi salah satu upaya untuk memvariasikan produk pangan yang dikonsumsi dan tidak bergantung pada satu jenis saja serta dapat membantu menekan fluktuasi harga tertentu. Dengan adanya keberagaman produk yang dapat dipasarkan, peningkatan harga pada satu produk pangan tertentu tidak akan langsung berdampak besar pada inflasi keseluruhan.

Salah satu permasalahan terkait dengan pemasaran dapat diatasi dengan adanya penghiliran. Penghiliran memfasilitasi produk pertanian untuk mencapai pasar dalam kondisi lebih optimal,

mengurangi pemborosan dan potensi kerugian selama proses distribusi.

Dengan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan pangan, biaya produksi dan distribusi dapat ditekan, yang pada akhirnya berdampak pada harga akhir produk dan membantu dalam mengendalikan inflasi.

Di samping itu, penghiliran sektor pangan juga memberi peluang besar untuk memicu pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan bagi para petani dan pelaku usaha dalam sektor pangan.

Penghiliran menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan memberikan nilai tambah pada produk, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan produk baru yang bisa dipasarkan di pasar internasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, maka program tersebut menjadi strategi yang tepat untuk diimplementasikan.

Penghiliran menjadi hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan peluang pasar yang lebih luas.

Produk yang telah diolah akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.

Kementerian Pertanian telah mendorong pengembangan penghiliran dan ekspor pangan lokal. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian nasional dengan mendorong para pelaku usaha pangan mikro menengah berkontribusi pada peningkatan kualitas produk olahan pangan berorientasi ekspor.

Dengan demikian, langkah ini tak hanya menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan juga memberikan kontribusi substansial pada ekonomi nasional.

Bank Indonesia telah berkomitmen memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi *volatile food* (VF) dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitas pasar murah, koordinasi penguatan dan perluasan kerja sama antardaerah (KAD), serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi. Pangan memegang peranan yang cukup besar terhadap inflasi nasional. Inflasi lebih didorong sektor

pangan (*volatile foods*) dan barang-barang yang harganya diatur pemerintah (*administered goods*).

Sejalan dengan upaya tersebut, program penghiliran sektor pangan telah diinisiasi sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) se-Jawa telah memperkenalkan dua program unggulan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional.

Adanya program tersebut berperan dalam penurunan inflasi pada 2022 dan diharapkan dapat menjadi program yang tepat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Pengendalian inflasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam hal ini, Bank Indonesia telah dan akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong perkembangan ekonomi yang sehat melalui langkah-langkah yang efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama di sektor pangan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan.

Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan berakibat pada semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, Bank Indonesia menyadari pentingnya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Keduanya perlu diintegrasikan dengan baik guna mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang. BI berkomitmen untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap menjaga stabilitas harga.

Dalam konteks ini, pengendalian inflasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi perkembangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

(JIBI/Bisnis Indonesia)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMERTAN

Title	BPS Nilai Ekspor Sumsel Juli 2023 Capai 548,86 Juta Dolar AS	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

BPS: Nilai Ekspor Sumsel Juli 2023 Capai 548,86 Juta Dolar AS

NERACA

Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Juli 2023 mencapai 544,87 juta dolar AS, turun 5,57 persen jika dibandingkan dengan ekspor Juni 2023 senilai 548,86 juta dolar AS.

Kepala BPS Sumsel Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto dalam keterangan di Palembang, Senin (4/9), mengatakan penurunan nilai ekspor itu disebabkan turunnya nilai ekspor migas menjadi 38,33 juta dolar AS atau turun 6,18 juta dolar AS, jika dibandingkan periode Juni 2023 senilai 44,51 juta dolar AS.

Namun, ia menjelaskan ekspor nonmigas periode Juli 2023 mengalami kenaikan 0,51 persen atau 2,59 juta dolar AS menjadi 506,53 juta dolar AS, jika dibanding pada periode Juni 2023 sebesar 503,95 juta dolar.

"Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ekspor bahan bakar mineral mencapai 218,38 juta dolar AS, atau mengalami kenaikan 23,68 juta dolar AS atau 12,16 persen, dari periode Juni 2023 senilai 194,70 juta dolar AS, serta ekspor karet dan barang dari karet mencapai 93,23 atau naik 4,25 juta atau 4,77 persen, dari bulan sebelumnya 88,99 juta dolar AS" jelasnya.

Ia mengatakan secara kumulatif nilai ekspor Sumsel pada periode Januari hingga Juli 2023 mencapai 4,01 miliar dolar AS, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 senilai 4,21 miliar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 4,84 persen atau 203,60 juta dolar.

"Negara menjadi tujuan ekspor terbesar adalah Tiongkok sebesar 179,55 juta dolar AS, India sebesar 65,59 juta dolar AS, dan Malaysia sebesar 54,77 juta dolar AS," katanya.

BPS Sumsel juga mencatat nilai impor pada Juli 2023 mencapai 68,60 juta dolar AS atau naik 49,19 persen jika dibandingkan Juni 2023 senilai 45,98 dolar AS juta.

Ia menjelaskan hal itu disebabkan oleh kenaikan impor migas dan nonmigas, dengan rincian impor migas naik sebesar 0,91 juta dolar AS atau 94,85 persen menjadi 1,88 juta dolar AS, serta impor nonmigas naik sebesar 21,70 juta dolar AS atau 8,21 persen menjadi 66,72 juta dolar AS.

"Kenaikan impor nonmigas terutama disumbang oleh komoditas karet dan barang dari karet mengalami kenaikan 7,90 juta dolar AS menjadi 8,26 juta dolar AS," jelasnya. ● ant

Title	Harga Makin Mahal, Stok Beras Diklaim Aman	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Bari/ant	

Harga Makin Mahal, Stok Beras Diklaim Aman

NERACA

Jakarta - Harga beras makin mahal. Berdasarkan data dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), harga beras medium sudah mencapai Rp12.300-12.500 per kg. Dengan kata lain, harga yang diterima konsumen di pasar-pasar wilayah akan jual lebih tinggi. Sementara pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di zona 1 maksimal Rp10.900 per kg.

Tak hanya itu, stok beras yang tersedia di PIBC juga hanya 25,8 ribu ton yang mana jauh di bawah batas aman sebesar 30-35 ribu ton per hari. Akan tetapi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa stok beras nasional berada dalam kondisi aman. Bahkan, pihaknya juga akan mendatangkan kembali 400 ribu ton beras hingga akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,52 juta ton saat ini. "Insya Allah aman (stok cadangan

beras), kami jaga," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seperti dikutip *Antara*, kemarin. Arief mengatakan bahwa CBP yang mencapai 1,52 juta ton tersebut dapat dipastikan memenuhi kebutuhan pangan nasional, terlebih terdapat tambahan beras impor 400 ribu ton hingga akhir tahun.

Ia menjelaskan Bapanas sejak awal 2023 merencanakan untuk pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog. Hal itu menurut dia, bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan. Arief menambahkan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi saat ini, bukan karena tidak adanya stok, tetapi karena produksi dalam negeri yang memang belum mencukupi. "Kalau beras itu kuncinya ada diproduksi, bahkan penggiling padi saat ini sangat perlu pasokan, karena memang tidak ada bahannya," katanya.

Menurut dia, Bapanas mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mendistribusikan bantuan beras kepada 21,3 juta ke-

luarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM mendapatkan sebanyak 10 kilogram beras selama tiga bulan. "Ada 640 ribu ton beras yang didistribusikan untuk bantuan sesuai perintah Presiden," tutur Kepala Bapanas Arief.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRRI pada Senin (4/9), Bapanas menyatakan bahwa ketersediaan 12 komoditas diproyeksikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir Desember 2023. Adapun ke-12 komoditas itu termasuk beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi-kerbau, dan gula konsumsi juga diprediksi aman dengan catatan membutuhkan pasokan impor.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ia menegaskan bahwa stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga akhir tahun. "Lebih dari

cukup," kata Zulhas. Mendag mengatakan bahwa kondisi stok beras saat ini yang mencapai 1,6 juta ton lebih baik daripada kondisi tahun lalu. "Tahun lalu hanya ada 500 ribu ton, kita khawatir. Tapi, sekarang ada 1,6 juta ton," katanya.

Oleh karena itu, Zulhas berharap masyarakat tidak panik dan khawatir terhadap persediaan beras karena sudah terjamin stoknya oleh pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah menambah cadangan beras yang ada menjadi 2 juta ton dengan menunggu impor sisanya sebanyak 400 ribu ton.

Penambahan stok beras tersebut adalah untuk mencegah munculnya dampak psikologis masyarakat terhadap kondisi stok beras dan menanggulangi potensi dampak fenomena El-Nino terhadap suplai makanan pokok tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyetujui penguatan stok beras dengan menambah stok beras menjadi 2 juta ton dalam rapat terbatas sebelumnya.

Zulhas mengatakan bahwa Kemendag mulai mendistribusi-

kan bantuan beras bagi keluarga penerima manfaat di berbagai daerah pada September ini. Setiap paket bantuan tersebut terdiri dari 10 kg beras. Distribusi tersebut digelar lebih awal yakni pada September 2023 dibanding rencana sebelumnya, yaitu pada Oktober 2023, untuk membantu menurunkan harga beras.

Selain itu, Zulhas mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan selalu siap mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam memastikan ketersediaan pangan di masyarakat. Ia menjelaskan, kewenangan pangan, termasuk soal harga komoditas pokok, saat ini sudah tidak lagi berada di bawah Kemendag, melainkan sudah di bawah Bapanas.

Meski begitu, dia mengatakan tidak akan mengelak dari hal tersebut karena merupakan bagian dari tugasnya sebagai menteri. "Kemendag sebenarnya tugasnya jadi pendukung, walaupun di mata publik, kalau harga naik tetap tanggung jawabnya Kemendag," katanya. *● bari/ant*

Title	Kerjasama Pangan Indonesia-Kamboja	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro	

Kerjasama Pangan Indonesia-Kamboja

NERACA

Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden membicarakan berbagai hal termasuk menjalin kerjasama ketahanan pangan khususnya mengenai beras.

"Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun dan sebaliknya Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk," ujar Presiden Jokowi.

Bagi Presiden Jokowi, kerjasama ini sangat penting, juga sangat strategis mengingat kedua negara sama-sama bergerak pada sektor pertanian. Komunikasi dengan kamboja tak hanya mengenai ekspor dan impor melainkan juga masalah pangan secara keseluruhan. "Ini adalah kerja sama yang strategis bukan hanya mengenai ekspor impor tetapi ini juga bicara mengenai masalah ketahanan pangan," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta

Convention Center (JCC) pada hari ini, Selasa, 5 September 2023. Perhelatan yang dihadiri 11 negara ASEAN dan sembilan negara mitra ini akan berlangsung sampai 7 September 2023.

Terkait dengan pangan, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, memastikan 12 komoditas pangan pokok dalam menghadapi cuaca ekstrem el nino masih tercukupi dengan baik. Kecukupan tersebut tak lepas dari peranan semua pihak dan juga kolaborasi hebat antar lini. Termasuk sinergitas antara pemerintah dengan para petani.

"Semua kecukupan ini merupakan arahan dari bapak presiden yang selalu bilang ke kami agar menjaga 12 komoditi yang ada. Alhamdulillah beras kita sesuai neraca kumulatifnya memiliki over stock sampai 7 jutaan dan ini data BPS bukan data kementerian," ujar Syahrul.

Selain beras, Syahrul mengatakan bahwa ada komoditas jagung yang memiliki stok di atas 5 juta dan kedelai 1,8 juta. Demikian juga dengan bawang merah yang saat ini dalam kondisi aman, cabai besar 16 ribu ton, daging sapi, telur, gula kristal putih dan minyak goreng juga dalam kondisi aman.

"Tentu saya dalam posisi dan fungsi saya fokus pada ketersediaan. Dan

dilihat dari ketersediaan kita saat ini aman sekali. Data BPS yang terakhir dampak el nino itu hanya mencapai 70 ribu hektar dari 10 juta hektar lebih," jelas Syahrul.

Syahrul mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sembilan langkah dalam mengidentifikasi dan mapping kekeringan. Semua dibagi daerah kategori merah, kuning, dan hijau dengan objek metode masing masing daerah.

"Hijau berarti airnya sangat baik itu harus dioptimalkan, ada daerah kuning airnya pas pas oleh karena itu intervensi teknologi harus masuk, ada daerah merah kita sudah canangkan pendekatan tertentu," kata Syahrul.

Adapun upaya yang saat ini dilakukan antara lain memperbaiki embung, parit, sumur dalam, sumur resapan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diperkuat oleh daerah. Di samping itu ada juga benih benih tahan kering yang sudah diintervensi pad setiap provinsi kabupaten.

"Minimal ada 1000 hektar yang kita harus bisa paksakan agar menjadi model lumbung pangan di masing-masing daerah. Namun yang juga harus waspada adalah dampak el nino ini adalah hama yang membuat produktivitas menjadi rendah. Karena itu kita harus sikapi dengan membuat lumbung pangan daerah," ungkap Syahrul.

rul.

Dalam mengantisipasi dampak El Nino, Syahrul mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan lumbung pangan di daerahnya masing-masing. Sebab, dampak El Nino bisa sangat berbahaya jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat. "Lumbung dibutuhkan bagi kita dalam menghadapi El Nino. Setiap daerah harus memiliki stok yang banyak. Bila buffer stock tidak kuat, El Nino bisa sangat berbahaya," ungkap Syahrul.

Sehingga dalam hal ini Syahrul meminta pemerintah daerah untuk serius hadapi El Nino. Apalagi cuaca ekstrim ini bisa sangat berdampak terhadap pasokan pangan.

"Tugas utama pemerintah adalah menyediakan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Kalau kondisi pangan tidak baik, sama saja usaha kita menjadi nol. Buat apa kita punya jalan dan segala fasilitas bagus tapi tidak ada makanan untuk rakyat," tegas Syahrul.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Fadry Djufry mengungkapkan diselenggarakannya forum diskusi ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang strategis dan aplikatif untuk membantu pemerintah dalam merespon dampak El Nino pada semua komoditas pertanian. ● gro

Title	TEBAKAU GARANGAN WONOSOBO	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Neraca/Haris Hafizudri	



NERACA/Anarfoto/Kris Elizudri/Spt

TEBAKAU GARANGAN WONOSOBO : Warga menyelesaikan proses pembuatan tembakau Garangan di Desa Setieng, Kejajar, Wonosobo, Jateng, Selasa (4/9/2023). Tembakau Garangan merupakan tembakau khas Wonosobo yang diproses dengan cara dirajang tipis, dipadatkan dan dibakar menggunakan kayu bakar selanjutnya dijemur beberapa hari, harga jualnya berkisar Rp100 ribu - Rp500 ribu per rigen (lima lembar tembakau) tergantung kualitas.

Tittle	Harga Beras Naik, Jangan Panik	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Solopos	
Page	1 Part 1	
Author	Galih Aprilia Wibowo	

Harga Beras Naik, Jangan Panik

GALIH APRILIA WIBOWO

SOLO-Masyarakat diimbau tidak panik dengan harga beras yang cenderung naik belakangan ini, apalagi sampai lantas memborong beras karena panik alias *panic buying*.

Hal ini disampaikan Kepala Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Solo Andy Nugroho saat diwawancarai *Espos*, Selasa (5/9/2023). Andy juga menguraikan harga beras akan kembali stabil pada panen raya awal 2024 mendatang. "Tidak perlu *panic buying*, karena memang sebenarnya barangnya tersedia," terang Andy.

Ia juga mempersilakan masyarakat datang ke Kantor Bulog Solo atau saat ada kegiatan pasar murah dari Bulog. Dalam kegiatan itu harga beras yang ditawarkan Bulog lebih rendah daripada harga pasaran. Stok beras di gudang Bulog Solo saat ada lebih dari 17.000 ton. Ketersediaan stok tersebut masih cukup untuk penyaluran bantuan pangan mulai September serta

melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Stok beras di gudang Bulog tersebut adalah hasil penyerapan dari petani lokal Soloraya ditambah cadangan untuk menghadapi fenomena El Nino. "Dari lokal maupun tambahan suplai cadangan kami untuk menghadapi El Nino, itu ada impor. Ini tetap kami prioritaskan untuk penyaluran itu

memakai lokal dulu, kalau memang kurang pakai impor," tambah Andy.

Andy menjelaskan persentase stok beras impor dan serapan dari petani lokal di gudang Bulog masing-masing 50%. Pihaknya tidak memungkiri jika penyerapan produksi panen lokal belum maksimal.

BERSAMBUNG KE HAL. 7

Title	Harga Beras Naik, Jangan Panik	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Solopos	
Page	1 Part 2	
Author	Galih Aprilia Wibowo	

Harga Beras Naik, Jangan Panik

[Sambungan dari hal 1]

Karena itu ada tambahan cadangan dari hasil impor. Andy menjelaskan target penyerapan Bulog Solo pada 2023 ini sebanyak 50.000 ton, baik dari skema *public service obligation* (PSO) dan komersial.

Saat ini Bulog Solo telah menyerap kurang lebih sebanyak 30.000 ton beras.

Di sisi lain kenaikan harga beras berimbas pada para pelaku usaha kuliner di Soloraya yang membuat mereka harus bersiasat. Salah satunya dilakukan oleh pedagang ayam geprek, Novi, yang mengaku memilih mengurangi porsi satu paket nasi dan ayam geprek. Hal ini ia lakukan karena dampak kenaikan harga beras yang mencapai Rp13.500/kilogram (kg) padahal biasanya hanya berkisar Rp10.000/kg hingga Rp11.000/kg. Selain itu ia mengeluhkan harga kebutuhan pokok lainnya yang naik, misalnya gula dan cabai. Harga telur dan daging ayam juga fluktuatif. "Kenaikan beras sangat terasa dampaknya. Kami mau naikkan harga juga susah kami siasati ayamnya, kami kibalkan, sama tepungnya agak *dibanyakin*," terang Novi kepada *Espos*.

Ketua Paguyuban Gotong Royong PKL Selter Manahan Solo, Koko Kuncoro, mengaku juga ancap-ancang menaikkan harga menu makanan ketika harga beras tak kunjung turun. Namun, hingga saat ini ia memilih belum

menaikkan harga makanan yang ia jual. "Mungkin nanti kalau harga beras naik lagi yang nanti dinaikkan harga menunya," kata dia.

Salah satu pemilik katering asal Klaten, Yulia, mengaku lebih memilih menaikkan harga makanan dibandingkan mengurangi porsi. Misalnya harga satu paket menu dibanderol dari harga Rp18.000 menjadi Rp19.000. Selain itu, menurutnya konsumen juga kadangkala memilih menu tanpa nasi. Maka, hal ini juga belum berpengaruh banyak di warung makan miliknya setiap hari selain usaha katering. "Kadang konsumen juga enggak makan nasi saja, ada selat ada sup," ujar Yulia. Walaupun harga-harga kebutuhan pokok yang naik, hal ini masih bisa Yulia siasati. Karena kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut tidak terjadi bersamaan. Yulia juga memilih membeli beras dari petani langsung, sehingga bisa menekan biaya produksi yang harus ia keluarkan.

Untuk kalangan petani, dampak kenaikan harga beras ini bervariasi. Di Wonogiri sejumlah petani mengaku tidak bisa mendapatkan untung banyak. Ini lantaran hasil panen mereka tidak optimal karena hama penyakit dan kurang air selama masa tanam. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Wonogiri, Dwi Sartono, mengatakan harga gabah basah di Wonogiri saat ini lebih dari

Rp6.000/kg. Harga itu karena produksi gabah dan beras secara umum baik di Wonogiri maupun di daerah lain menurun.

"Misalnya di Klaten, banyak petani yang hasil panennya berkurang karena hama tikus. Sedangkan di Wonogiri banyak yang panennya tidak optimal karena kekurangan air. Di sini banyak pertanian padi tadah hujan. Kemarau terjadi lebih awal," kata Dwi. Dengan kondisi itu, petani tidak bisa mendapatkan untung banyak dari kenaikan harga gabah. Banyak pula petani yang sudah panen dan menjual gabahnya lebih dulu sebelum harga gabah melonjak.

Dia memaklumi petani lebih memilih menjual gabah segera mungkin. Hal itu karena mereka sudah mengeluarkan biaya produksi banyak dan ingin segera balik modal atau membayar utang yang pada saat itu digunakan untuk modal produksi. "Kenyataannya memang begitu. Bahkan, sekarang petani sudah ada yang menjual padi mereka dengan sistem ijon. Padi yang belum merunduk pun sudah dijual. Ini menurut saya justru rugi," katanya.

Dwi juga menyayangkan petani yang justru tidak bertanam baik padi atau tanaman pangan lain saat kemarau seperti ini. Menurut dia, seharusnya saat-saat seperti ini justru momentum terbaik untuk menanam. Lahan atau sawah jangan sampai dibiarkan tidak produktif. "Coba dalam masa seperti ini menanam tanaman

yang relatif sedikit membutuhkan air. Soalnya, dengan kenaikan harga pangan, saya meyakini harga komoditas pertanian lain juga akan turut terkerek, setidaknya sampai kemarau ini selesai," ujar Dwi.

Sementara KTNA Kabupaten Sukoharjo menyebut harga beras di Kabupaten Jamu tersebut kini membaik. Kenaikan harga beras yang dibeli dari petani disebut lebih tinggi dibanding biasanya. Sementara di sisi lain penjual makanan matang utamanya nasi sayur ancap-ancang akibat kenaikan harga beras tersebut.

Ketua KTNA Kabupaten Sukoharjo, Sukirno kepada *Espos* menyebut kenaikan harga beras saat ini masih fluktuatif. Di samping itu belum seluruh petani di Sukoharjo panen. Tetapi ia mengklaim sementara ini harga gabah di kalangan petani Sukoharjo lumayan bagus.

Fenomena menarik terjadi di Sragen. Tanaman padi yang baru berumur 65 hari dan baru mulai berbunga ternyata sudah laku dijual dengan harga Rp15 juta per patok dan dibayar secara tunai. Di wilayah Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Sragen, ada 10 patok milik tiga orang petani yang dijual dengan harga Rp15 juta. Di wilayah Desa Pelemgadung, Karangmalang, Sragen, justru banyak yang sudah laku dengan harga sampai Rp16 juta per patok.

Padahal tanaman padi itu masih membutuhkan waktu

sampai 25 hari atau sebulan baru bisa siap panen. Para pedagang beras Sragen dan luar Sragen berebut mendapatkan padi pada musim kemarau. Mereka sampai melakukan sistem bayar jauh sebelum panen agar mendapatkan gabah.

Ketua Kelompok Tani Ngudi Luhur Plumbungan, Karangmalang, Sragen, Suharno, saat ditemui wartawan, Selasa, mengaku menggarap sawah seluas tujuh patok dengan ukuran per patok 3.300 meter persegi. Dia mengatakan dari tujuh patok itu, empat patok di antaranya sudah terjual tunai dengan harga Rp15 juta per patok dan dibayar tunai beberapa hari lalu. "Ya, baru kali ini ada pedagang yang berani berspekulasi. Tanaman padi baru *mrapu* atau berbunga sudah berani membayar tunai. Padahal kan belum tahu hasilnya karena panennya baru 25 hari mendatang. Ada 10 patok milik tiga petani anggota Poktan Ngudi Luhur yang sudah laku dengan harga sama Rp15 juta per patok. Pedagang yang berani itu dari Sragen juga," ujar Suharno.

Dia menerangkan harga Rp15 juta per patok itu merupakan rekor harga tertinggi yang dinikmati petani pada musim kemarau 2023 ini. Dia mengatakan biasanya padi di Plumbungan ini rata-rata laku Rp12 juta dan kalau baik bisa sampai Rp13 juta. Dia kaget selisihnya lebih tinggi Rp2 juta. "Harga gabah saat ini tinggi, sampai Rp7.000/

kg. Bahkan teman-teman petani itu bilang ke depan bisa sampai Rp18 juta per patok. Waktu sekarang gabah menjadi primadona dan menjadi rebutan pedagang karena yang tanam padi sedikit," jelasnya. Dia berharap harga tinggi ini bisa terus bertahan lama sehingga petani benar-benar diuntungkan. Dia harus menjamin kecukupan air selama 25 hari ke depan atau sampai panen biar produksi gabahnya bisa maksimal.

Petani lain dari Plumbungan, Priyono, 47, juga senang karena tiga patok sawahnya laku senilai Rp15 juta per patok. Dia mendapatkan pembayaran secara tunai pada Senin (4/9/2023) lalu. Dia mengatakan pedagang yang nekat beli tanaman padi yang baru berumur 65 hari ini karena takut tidak dapat barang. Dia mengatakan padi sekarang benar-benar menjadi rebutan. "Alhamdulillah air tercukupi dan hama terkendali. Yang lain belum dijual karena menunggu harga naik lagi. Ini benar-benar harga tertinggi selama saya tanam padi di Plumbungan ini. Di wilayah Gumantar, Pelemgadung, ada yang laku sampai Rp16 juta per patok. Petani sekarang untung," ujarnya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno, mengatakan meskipun petani belum panen, kenyataannya padi belum waktunya panen sudah laku. (Muhammad Diky Praditia/Magdalena Naviriana Putri/Tri Rahayu)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Badan Pangan Nasional Inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan
Date	6 September 2023
Media	Sinartani
Page	10
Author	Sinartani



Kementerian Pertanian



WUJUD KOMITMEN CEGAH FOOD WASTE

Badan Pangan Nasional Inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan

"Zero Waste to End Hunger"

Gerakan Selamatkan Pangan berkaitan erat dengan dua target pembangunan global, yaitu SDGs ke-2, Zero Hunger (tanpa kelaparan) dan SDGs 12.3 Pengurangan Food Loss and Waste, sehingga tagar yang diusung "Zero Waste to End Hunger".

Secara global, Food Loss and Waste (FLW) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Menurut FAO (2011), sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Di sisi lain, ancaman krisis pangan dan masalah kerawanan pangan dan gizi masih menjadi tantangan yang harus diatasi. FAO memperkirakan, pada tahun 2022 sekitar 783 juta orang di dunia mengalami kelaparan dan 2,4 miliar orang (kebanyakan perempuan dan orang yang tinggal di pedesaan) tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi, aman dan cukup sepanjang tahun (The State of Food Security and Nutrition in The World, 2023).

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% food waste per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030. Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung capaian target SDGs ke-2, Zero Hunger (tanpa kelaparan). Indonesia berkomitmen dalam pencapaian target SDGs 12.3 sebagaimana dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, khususnya pada Prioritas Nasional ke-1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Selanjutnya komitmen tersebut dijabarkan dalam program prioritas ke-3 peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, melalui kegiatan prioritas ke-5 peningkatan tata kelola sistem pangan nasional serta arah kebijakan pengelolaan food waste.

Urgensi Selamatkan Pangan

Menurut kajian Bappenas (2021), FLW di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23-48 juta ton per tahun, setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun, yang berarti masing-masing orang menyumbang lebih dari 1 (satu) kwintal sampah pangan per tahun. Jika kita cermati, timbulan FLW tersebut masih ada yang dalam kondisi baik dan aman, yang jika dikelola dengan baik masih bisa diselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui upaya food rescue atau dikenal dengan penyelamatan pangan. Menurut Bappenas (2021) bahwa potensi timbulan pangan FLW tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi Indonesia.

Sementara itu, di Indonesia masih terdapat 74 kabupaten/kota yang rentan rawan pangan (FSVA, 2022), 21,6% yang mengalami stunting (SSGI,

2022) dan sebanyak 28,1 juta jiwa atau 10,21% penduduk Indonesia yang mengkonsumsi energi (kalori) kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif dan produktif (BPS, 2022).

Timbulan FLW juga berdampak pada kerugian ekonomi sekitar Rp213-551 triliun per tahun atau setara 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Terhadap lingkungan, timbulan FLW berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang diestimasi sebesar 1,702,9 Mt CO₂ EK, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia.

NFA Inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan Food Waste, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi food waste. Melalui Gerakan Selamatkan Pangan, pangan berlebih dapat dimanfaatkan untuk turut mendukung upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi di Indonesia.

Fokus utama gerakan ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu: (1) mencegah terjadinya kemubadziran/pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan (2) fasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan food truck serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta penggiat Selamatkan Pangan. Langkah ini terpantau secara langsung melalui platform aplikasi <https://sbp.badanpangan.go.id>. Piloting di wilayah Jabodetabek dimana hingga akhir Agustus 2023 menunjukkan bahwa jumlah pangan yang berhasil diselamatkan sejak diluncurkan pada Desember 2022 mencapai 49,9 ton. Hal ini selaras dengan hierarki upaya selamatkan pangan, prioritas pertama, yaitu mencegah terjadinya food waste dan prioritas kedua, yaitu mendonasikan pangan berlebih.

Pangan Berpotensi Food Waste, dikenal sebagai "Pangan Berlebih" merupakan pangan yang masih dalam kondisi baik dan aman, namun berpotensi terbuang atau dimusnahkan jika tidak dimanfaatkan, yang terdapat di hotel, restoran, catering, retail, industri pangan, toko makanan dan/atau pusat perbelanjaan, tetapi pangan ini tidak termasuk left over food (pangan sisa). Sehingga GERAKAN SELAMATKAN PANGAN adalah upaya penyelamatan pangan



berpotensi food waste oleh para pihak yang bersumber dari penyedia pangan/ donatur untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan disertai upaya sosialisasi dan promosi pencegahan food waste.

industri makanan dan pusat perbelanjaan yaitu HIPINDO, APRINDO, PHRI, APJI, GAPMMI, APPBI dan tiga penggiat selamatkan pangan atau bank pangan, seperti Food Bank of Indonesia, FoodCycle Indonesia dan Surplus Indonesia.

Indonesia, dalam hal ini Bapak Kepala Badan Pangan Nasional pada Leadership Dialog dalam forum United Nations Food System Summit (UNFSS) 2 Stocktaking movement di Roma, Italia tanggal 26 Juli 2023 lalu menekankan bahwa sangat penting bagi negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and food waste. Berdasarkan Food Waste Index Report 2021, from the United Nations Environment Programme (UNEP), sekitar 14% dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) dan 17% pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste). Salah satu langkah yang perlu kita lakukan adalah bergerak menyesuaikan gaya hidup dan pola perilaku konsumsi kita agar tidak boros pangan. Untuk itu, beliau menekankan bahwa Upaya Gerakan Selamatkan Pangan ini harus intensif kita suarakan dan gerakan di 38 Provinsi dan 514 Kab/Kota secara masif.

Untuk itu pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan melalui alokasi dana dekonsentrasi di 12 (dua belas) provinsi. Ruang lingkup kegiatan difokuskan pada upaya koordinasi dan sosialisasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, provinsi pelaksana kegiatan dapat mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya pencegahan food waste kepada para pihak baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, swasta/pelaku usaha, bank pangan/penggiat selamatkan pangan, civitas akademika, komunitas, media dan Masyarakat.



Sumber: NFA menuju United States Environmental Protection Agency

Kolaborasi Pentahelix cegah Food Waste

Keberhasilan penanganan Food Waste memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (Academics, Business, Community, Government, and Media), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan serta melakukan upaya intervensi. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan melibatkan beragam mitra kerja sektor pentahelix. Dengan sektor usaha atau bisnis, NFA telah melakukan penandatanganan Gerakan Selamatkan Pangan dengan 9 mitra kerja, yaitu sembilan mitra yaitu enam asosiasi di bidang ritel, perhotelan, restoran, catering,

Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi -
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi



BADAN PANGAN NASIONAL
NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Bangkitkan Kembali Peran Penyuluh	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	7	
Author	Ikbal/yul	

Anton Apriyantono, Mantan Menteri Pertanian: Bangkitkan Kembali Peran Penyuluh

Situasi ketersediaan pangan kekinian yang menimbulkan kekhawatiran semua pihak bukan hanya dialami negara kita namun di seluruh dunia. Beras sebagai komoditas pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat produksinya diprediksi akan turun sebagai dampak dari perubahan iklim yaitu fenomena El Nino atau kekeringan berkepanjangan yang mengancam lahan pertanian.

Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu 2004 – 2009 era Presiden SBY ini menyoroti secara khusus pentingnya penyuluhan pertanian di samping faktor-faktor lain yang harus dikerjakan. Akselerasi peran penyuluh sebagai ujung tombak alias garda terdepan yang mengawal produksi pangan sangat krusial dan perlu dioptimalkan lagi.

Setelah terbitnya undang-undang otonomi daerah, kewenangan untuk menggerakkan penyuluh bergeser dari Kementerian Pertanian ke daerah masing-masing. Pada daerah-daerah

tertentu yang anggarannya terbatas menimbulkan penurunan kinerja penyuluh karena kurangnya program serta dana untuk menjalankan program tersebut.

Di lapangan Anton melihat peran penyuluh sekarang ini terlihat kurang memiliki alat atau program dan cenderung mengurus hal-hal bersifat administratif. Misalnya, mendata CPCL serta alokasi pupuk bersubsidi serta bagi-bagi benih dan alat mesin pertanian. Hal ini tentunya berakibat pada pendampingan teknis langsung ke petani menjadi kurang maksimal. "Di daerah,

banyak petani yang menanyakan mengenai program serta pertemuan dengan penyuluh yang minim, bahkan sampai banyak petani tidak mengenal penyuluh yang ada di daerahnya," katanya.

Anton menyarankan program-program yang telah dijalankan dulu seperti PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) yang merupakan fasilitasi bantuan permodalan bagi petani, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga petani melalui Gapoktan perlu dihidupkan kembali dengan modifikasi atau disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah penguatan program sekolah lapangan (SL-PTT) dalam rangka proses transfer ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas SDM petani dalam berusaha tani. "Program-program seperti ini akan menjadi pegangan bagi penyuluh untuk mendampingi petani sekaligus melakukan evaluasi program di lapangan," kata Anton.

Untuk itu Anton menegaskan perlunya membangkitkan kembali



peran penyuluh dengan alat atau program yang bisa membuat mereka bergerak dengan lebih leluasa. Akselerasi alias percepatan peran penyuluh menjadi faktor penting yang dapat membantu peningkatan produksi pertanian demi mencapai kedaulatan pangan kedepan.

Anton mengajak, semua pihak untuk berkolaborasi dan sinergi membangun pertanian ketimbang kontra. Apalagi kemampuan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras sudah mendapat pengakuan dunia. "Kita mempunyai kemampuan, bahkan bangsa lain memberikan apresiasi terhadap pertanian Indonesia. Banyak negara-negara dunia bertanya bagaimana strategi Indonesia bisa mencapai swasembada. Ini menjadi pengakuan dari dunia. Kita mampu, tapi kita justru ribut sendiri," tuturnya. **Ikbal/Yul.**

Title	Bangun Ekosistem Ketersediaan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	6	
Author	Herman/yul	

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi:

Bangun Ekosistem Ketersediaan Pangan

Menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menjadi salah satu peran Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA). Namun diluar itu, NFA juga memiliki peran lain yaitu mengatasi kerawanan pangan dan gizi, juga penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Bicara mengenai beras sebagai makanan pokok masyarakat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ *National Food Agency* (NFA), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan saat ini di lapangan sedang terjadi kekurangan Gabah Kering Panen (GKP).

"Selalu yang disalahkan penggiling padi baik besar maupun kecil. Sebenarnya mau besar atau kecil penggiling padi tidak ada masalah yang penting ada gabahnya," kata Arief saat bincang santai puncak HUT ke 53 Tabloid Sinartani di Saung Aki Jayamamur, Karawang, Selasa (29/8).

Stok Beras

Arief menegaskan, tugas Badan Pangan Nasional pada pasca panen sampai ketersediaan. Karena itu, soal beras pihaknya telah menetapkan stok beras di Bulog harus sebanyak 1,6 juta ton. "Yang kita butukan pada awal tahun itu adalah bagaimana Badan Pangan menyiapkan stok beras. Apalagi kita sudah memproyeksikan akan ada penurunan produksi sampai dengan akhir tahun. Kalkulasinya jelas," tegasnya.

Dengan kondisi perberasan yang terjadi saat ini, perhitungan Bapanas perlu ada tambahan impor sebanyak 2 juta ton. Angka tersebut sudah merupakan hasil perhitungan dan melihat beberapa faktor. Misalnya, kondisi lahan pertanian yang semakin menurun.

Selain itu, dalam neraca pangan, diketahui produksi padi menurun, tetapi konsumsi naik. Jadi, gap produksi dan konsumsi makin besar. Hitungan Badan Pangan Nasional saat ini gap-nya sudah di atas 800 ribu ton. Jika kemudian ada program bantuan pangan sebanyak 640 ribu ton, maka perlu ada tambahan beras sebanyak 1,4 juta ton.

"Jika Pemerintah ingin mempunyai cadangan pangan (beras) pada akhir 2023 sebanyak 1 juta ton, makatinggalmenambahkan saja," kata Arief. Namun lanjut Tjiptaning, pilihannya ada diversifikasi pangan karbohidrat, mempercepat produksi dan impor. "Kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada kepentingan apapun, karena stok akan masuk ke Bulog," tegasnya.

Dengan kondisi produksi padi yang menurun dan kemungkinan harga beras akan naik, Arief



mengatakan, dirinya sejak awal sudah menyampaikan bahwa pada Oktober, November, dan Desember akan ada bantuan pangan sebanyak 10 kg dalam 3 bulan untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Nah, yang membedakan kita sekarang dengan yang dahulu ialah hari ini kita punya stok. Sebanyak 800 ribu ton serapan lokal, sisanya impor," tegasnya.

Mengenai naiknya harga gabah yang saat ini mencapai Rp 7.300/kg, Arief mengatakan, di satu sisi memang memberatkan pengusaha penggilingan padi. Namun di sisi lain, justru menguntungkan petani. Di sisi lain juga akan berdampak pada 270 juta masyarakat yakni kenaikan harga beras. "Bagi 21,3 juta KPM pemerintah telah memberikan bantuan pangan," katanya.

Guna mengatasi persoalan perberasan yang selalu berulang, Arief mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem. Misalnya, ke depan diperlukan tambahan lahan produksi seluas 500 ribu ha agar Perum Bulog tidak berpikir impor. "Harus ada yang kita perjuangkan saat ini yakni produksi. Kalau kita terus menerus seperti ini, tidak ada lahannya, benih tidak dapat, pupuk kurang, sulit bagi kita," katanya.

Untuk saat ini menurut Arief, yang harus menjadi fokus ialah peningkatan produksi pangan. Secara umum, diakui, memang

pada semester 1 produksi padi cukup banyak, tapi semester 2 produksi akan turun sedikit. "Kondisi ini memang sudah nature dari produksi padi kita," katanya.

Salah satu pemikiran yang bisa menjadi alternatif adalah cross border ke negara lain. Apalagi jika intensifikasi dan ekstensifikasi juga tidak berjalan baik, maka bagi Arief tidak masalah Pemerintah Indonesia melakukan cross border. Jika produksinya berlebih, maka bisa dijual di pasar dunia.

Swasembada Karbohidrat dan Protein

Karena itu, ia menganggap, *food research* sangat penting. *Food research* bukan hanya pada komoditas beras, tetapi juga komoditas strategis lainnya, terutama sumber protein. "Saya juga menawarkan kalau boleh swasembada bukan beras, tapi karbohidrat. Bahkan swasembada protein," katanya.

Bahkan Arief menilai, akan sangat baik jika swasembada, baik karbohidrat maupun protein disesuaikan dengan kearifan pangan lokal. Misalnya, wilayah yang sumber proteinnya banyak ikan, maka arah swasembadanya adalah ikan, bukan protein lain. Bahkan jangan dipaksakan wilayah tersebut mengonsumsi ayam, telur atau daging sapi.

Jadi jika Pemerintah Indonesia mau bertransformasi, maka harus

menetapkan komoditas strategis. Komoditas yang memang sulit diproduksi di dalam negeri, menurut Arief, sebaiknya tidak menjadi prioritas pemerintah untuk swasembada.

Menurut Arief, peran Badan Pangan Nasional bukan hanya pada ketersediaan dan stabilisasi, pihaknya juga bertugas mengatasi kerawanan pangan dan gizi, serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Karena itu, pihaknya kini tengah mendetailkan tugas Badan Pangan Nasional.

Misalnya, soal kerawanan pangan dan gizi seperti apa. Begitu juga masalah keamanan pangan, sejauh mana tugas Badan Pangan Nasional agar tidak bertabrakan dengan BPPOM. "Jadi kita jangan sampai terjebak dalam satu hal yaitu stabilisasi dan ketersediaan, tapi kita masih punya yang lain," katanya.

Bahkan, saat ini pihaknya concern terhadap beberapa daerah rawan pangan yang justru berada di daerah sentra produksi. Salah satu contohnya, kasus stunting dan gizi buruk di Blitar, Jawa Timur. Padahal daerah tersebut merupakan penghasil telur terbesar di Indonesia.

"Saya juga berbicara dengan Bupati Indramayu, banyak masyarakatnya kekurangan makan. Padahal kita tahu produksi padi Indramayu yang dibawa ke Jakarta dalam 1 hari mencapai 300 truk," tuturnya. **Herman/Yul**

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERAN

Title	Bersama Sinar Tani, NFA Gelar GPM di Bumi Perjuangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	9	
Author	Sinartani	



Bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Tabloid Sinartani menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Karawang, Jawa Barat. GPM yang digelar di halaman Kantor Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakarta ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT ke-53 Tabloid Sinar Tani.

Koordinator Substansi Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional, Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan Badan Pangan Nasional/NFA bersinergi dengan Tabloid Sinartani dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pangan pada masyarakat agar memperoleh harga pangan yang murah.

"Karena itu disini kita hadirkan beberapa vendor mitra kerja dari Badan Pangan Nasional, seperti Perum Bulog, IdFood, Berdikari, dan mitra kerja lainnya yang selalu membersamai kami dalam melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah," ujarnya saat pembukaan GPM.

Yudhi berharap masyarakat yang ada di Kelurahan Jayakarta bisa memperoleh aksesibilitas pangan dengan harga murah dan terjangkau, karena harga bahan pangan dalam GPM adalah dibawah harga pasar.

Sementara itu Pemimpin Umum Tabloid Sinartani, Memed Gunawan berharap apa yang diinginkan oleh Badan Pangan Nasional dalam menggelar Gerakan Pangan Murah dapat terwujud. "Apa pun akan kita lakukan agar pangan kita ini bisa stabil harganya, bisa tersedia setiap saat dan tetap melimpah," tambahnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan untuk menjaga stabilitas pangan Badan Pangan

Bersama Sinar Tani, NFA Gelar GPM di Bumi Perjuangan



Nasional melakukan serangkaian langkah aksi diantaranya Gerakan Pangan Murah (GPM)

"Bersinergi dengan pemerintah daerah, BUMN/BUMD pangan, asosiasi, dan pelaku usaha, NFA menjaga daya beli masyarakat dengan gencar melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah," ungkap Arief.

Harga pangan yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Desa Jayamakmur

dibawah harga pasar, mulai dari telur ayam Rp 27 ribu/kg, beras SPHP Rp 9 ribu/kg, gula Manis Kita Rp 14.000/kg, Minyak Goreng Kita Rp 13.500/liter, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Selain berbagai kebutuhan pokok tersebut, dalam Gerakan Pangan Murah juga dijual berbagai jenis sayuran segar dan sayur hidroponik dengan harga terjangkau hingga berbagai produk olahan pangan dari para petani/keompok tani di sekitar Karawang.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simbolis penyerahan bantuan paket pangan kepada 53 masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar desa Jayamakmur, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Beberapa vendor yang menggelar stand Gerakan Pangan Murah diantaranya Taiwan Technical Mission (TTM) Karawang, Pemuda Tani Karawang, Nuorma Farm, Batamindo, Kelompok Wanita Tani Karawang, dan lain sebagainya.



BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Title	Data Stok Beras Penggilingan Padi, Kementan Gandeng Satgas Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	19	
Author	Yul	

Data Stok Beras Penggilingan Padi, Kementan Gandeng Satgas Pangan

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Mabes Polri mempererat kerjasama pendataan penggilingan padi dan stok beras sebagai upaya bersama menghadapi tantangan dan krisis global. Kerjasama ini di antaranya meliputi pendataan stok padi yang ada di penggilingan seluruh Indonesia.



Diketahui, berdasarkan hasil survei BPS tahun 2020, jumlah penggilingan padi di Indonesia mencapai 169.788 unit dengan rincian: penggilingan berskala kecil sebanyak 161.400 unit, penggilingan skala menengah 7.332 unit dan penggilingan berskala besar sebanyak 1.056 unit.

"Saya mohon kepada seluruh jajaran kementan untuk memperkuat kolaborasinya dengan jajaran polri karena yang kita hadapi ini

adalah el nino dan krisis lainnya," ujar Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam launching pendataan penggilingan dan stok beras di Jakarta, Selasa, (29/8).

Mentan mengatakan sejauh ini pihaknya sudah membagi wilayah dengan 3 zona. Pembagian zona terutama dalam menghadapi cuaca ekstrim el nino atau musim kering panjang yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang.

Zona pertama, kata Mentan

adalah zona merah yang berstatus defisit, zona kedua adalah zona kuning yang memiliki sumber air cukup dan terakhir zona hijau yang memiliki air melimpah atau dalam kata lain zona yang harus di booster (diperkuat).

"Saya sudah membagi wilayah dengan zona. Dari 38 provinsi katakan lah yang merah, papua, bali dan banten. Tapi yang lain kan banyak yang kuning dan sebagian lainnya banyak yang hijau, itulah yang kita booster," katanya.

Berikutnya kata Mentan, pemerintah sudah memiliki skema bernilai ekonomi bagi para petani yang ingin mengembangkan usahanya. Skema tersebut adalah skema kredit KUR yang bisa diakses semua orang dalam memperkuat modal usaha. Berdasarkan catatannya, penggunaan KUR sangat membantu karena memiliki bunga rendah.

"Oleh karena itu dengan satgas saya berharap kita naik kelas. Caranya kita pakai KUR sebagai akses modal petani. Dan dari apa yang kami gunakan selama ini yang macet itu

hanya 0,03, jadi sebenarnya sudah oke kita pakai KUR. Sama halnya dengan penggilingan kita pakai KUR saja pak," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian tengah mengerjakan realisasi penanaman padi di 6 Provinsi dengan luas lahan mencapai 500 ribu hektar. Di antaranya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Juga ada daerah Pendukung lainnya seperti Provinsi Lampung.

Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengaku siap membantu tugas pemerintah, dalam hal ini memberi dukungan penuh terhadap jalannya program Kementan. Di antaranya adalah mengamankan stok beras melalui pendataan penggilingan padi di seluruh Indonesia.

"Kami satgas pangan siap membantu pemerintah melaksanakan pengawasan terkait bagaimana stok beras dan distribusinya," katanya. Karena itu, ia berharap teman-teman di kepolisian membantu pendataan penggilingan ini sebagai pusat informasi pemerintah agar data yang dimiliki tidak salah. Terutama di Polres untuk mengecek penggilingan sampai pada distribusinya. **Yul**

Title	Dorong Ekspor, Perkuat Hilirisasi	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	2	
Author	Sinartani	

M A N M E N Y A P A



Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian RI

Dorong Ekspor, Perkuat Hilirisasi

Saya ingin berpesan kepada semua pelaku usaha pertanian. Ke depan kita sudah harus melakukan hilirisasi pertanian untuk menunjang pertumbuhan dan pendapatan negara. Mari bersama perkuat pertanian Indonesia, tak hanya di hulu, namun sampai ke hilirnya beserta turunannya.

Bagi generasi muda sudah saatnya terjun geluti dan kembangkan pertanian, demi masa depan pertanian kedepannya. Kontribusi aktif generasi muda sangat dibutuhkan, karena akan semakin memperkokoh dan memperkuat pertanian dari hulu hingga hilir.

Sehat harus dari pikiran dan hati, hanya bisa sehat kalau makanannya juga sehat. Karena itu makanan menjadi hal yang paling penting dijaga ketersediaannya. Ditambah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang memenuhi gizi yang ada.

Salah satu upayanya dengan mempertahankan pangan lokal, makanan lokal bagian dari budaya bangsa yang harus kita jaga bersama. Saya berharap dapat memantik ide-ide kreatif dan semangat yang tinggi dalam membangun sektor pertanian, khususnya hilirisasi pertanian.

Perbaiki hidupmu dengan pertanian, lapangan kerja yang paling besar adalah pertanian, dan pertanian mendorong perekonomian negara dari semua produk turunan pertanian. Pertanian dibutuhkan dunia.

Karena itu, Kementerian Pertanian terus melakukan upaya peningkatan volume ekspor dan penambahan negara tujuan ekspor agar dapat mengejar target ekspor komoditas pertanian tahun 2023. Jadi pemerintah dan pelaku usaha dan lainnya harus bekerja sama, membagi tugas sehingga target kita bisa tercapai.

Sebelumnya Wapres RI Ma'ruf Amin juga telah mengingatkan kita tidak hanya menjadi negara pengimpor, tetapi juga pengeksport. Apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah, tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM.

Arahan Wapres itu menjadi pendorong kita semua untuk meningkatkan ekspor pertanian dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk. Karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Menjadi suatu kebanggaan karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras.

Dengan hilirisasi pertanian kita akan mampu menembus pasar ekspor. Kita sudah menargetkan ekspor komoditas pertanian di tahun 2023 ini sebesar Rp 900 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 658,18 triliun.

Sepanjang masa pandemi COVID yang membuat berbagai sektor mendapatkan pertumbuhan negatif, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahan sektor pertanian berhasil tumbuh 1,75% dibandingkan tahun 2019.

Sampai saat inipun, sektor pertanian masih memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS pada tanggal 7 Agustus 2023, sektor pertanian menyumbang 13,35% dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II tahun 2023. **

Title	Kementan Akselerasi Investasi Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	15	
Author	Humas PPVTPP	

Kementan Akselerasi Investasi Pertanian

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) untuk menarik investasi. Dengan UU tersebut banyak perubahan yang terjadi, terutama dalam perijinan investasi. Guna menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman-Perijinan Pertanian (PVT-PP) kini menyiapkan satu Buku Pintar Investasi Pertanian Indonesia sebagai upaya memudahkan penanam modal berinvestasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyo mengatakan, Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna tentang kondisi perekonomian tahun 2023 menegaskan, peningkatan investasi pada 2023 merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi karena merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.

"Sampai saat ini sektor pertanian masih berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sumber penyedia pangan, sumber devisa nasional, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan utama rumah tangga pertanian," kata Kasdi saat membuka Workshop Akselerasi Investasi Pertanian melalui Kolaborasi Pemangku Kepentingan di Jakarta, Rabu (30/8). Workshop ini merupakan bagian dari rencana revisi Buku Pintar Investasi Pertanian Indonesia.

Kasdi mengungkapkan, selama Pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi bantalan perekonomian nasional. Terlihat dari, PDB Triwulan II 2020 tumbuh 16,24 persen, bahkan sejak tahun 2010 sektor pertanian konsisten menjadi kontributor utama kedua PDB nasional. Selain itu, nilai ekspor 2021 mencapai Rp 625,04 triliun, meningkat 38,69 persen dibandingkan tahun 2020. Nilai ekspor pertanian selama periode Januari-Nopember 2022 sebanyak Rp 606,34 triliun atau meningkat 14,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2021.

Data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi triwulan II tahun 2023 sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) sebesar Rp 38,7 triliun atau sebesar 5,7% dari total Investasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dimana untuk PMDN sebesar Rp 22,8 triliun dan PMA sebesar Rp 15,9 triliun.



Untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha di sektor pertanian, para investor perlu diberikan panduan-panduan berinvestasi di pertanian. "Penting bagi Kementan untuk memberikan Panduan Berinvestasi di Pertanian yang bisa memberikan gambaran bagi pelaku usaha untuk berinvestasi pertanian, ujar Kasdi.

Kepala Pusat PVTTP, Kementerian Pertanian, Leli Nuryati berharap mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk dalam upaya mendorong investasi pertanian, baik pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. "Dengan adanya perubahan proses perizinan dan paradigma dalam kemudahan memberikan izin di sektor pertanian, investor akan merasa terbantu, baik kemudahan, kecepatan hingga aspek lainnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian (PSEKP), Sudi Mardianto menyampaikan, bagi investor masalah perizinan dan koordinasi menjadi pertimbangan utama. "Faktor keamanan, kestabilan, dan kebijakan yang terukur harus menjadi perhatian dalam implementasi UU Cipta Kerja," kata Sudi.

Dari workshop ini, disepakati untuk menyusun panduan berinvestasi dalam bentuk buku yang akan memuat potensi, peluang, regulasi, insentif investasi, mekanisme berinvestasi serta kesesuaian lahan sesuai dengan komoditas prioritas pertanian.

Adanya perubahan perijinan, Sudi berharap buku Investasi Pertanian Indonesia ini memberikan gambaran ada perubahan paradigma dalam perijinan pertanian. Dengan demikian, investor akan merasa terbantu, baik kemudahan, kecepatan hingga aspek lainnya.

Humas PPVTPP

Title	Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	4	
Author	Cah/yul	

Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Pangan



Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Pangan menjadi tema besar Gebyar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Tabloid Sinar Tani. Kolaborasi tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai kalangan, baik dari DPR RI, unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, swasta dan organisasi petani pada puncak syukuran dirgahayu tabloid tercinta di Desa Jayamakmur, Kecamatan Kertajaya, Kabupaten Karawang, Selasa (29/8).

Berdiri pada 27 Agustus 1970, Tabloid Sinar Tani kini telah menginjak usia 53 tahun. Gebyar 53 Tahun Tabloid Sinar Tani di Karawang bukan hanya sekadar ungkapan rasa syukur, tapi juga mengusung semangat dan tekad banyak tokoh berkolaborasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Beberapa tokoh penting, petani-petani inspiratif, serta perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta juga hadir.

Dari mulai, Anggota DPR RI Herman Khaeron; Kepala Pusat Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi; Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, Bustanul Arifin Caya; Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Menteri Pertanian periode 2004-2009 Anton Apriyantono, serta mantan Dirjen Tanaman Pangan yang juga pernah menjabat Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso.

Dari pihak swasta hadir, Direktur Utama PT. Agri Makmur Pertiwi, Junaidi Sungkono; Sekjen Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Adhie Widhiarto; Ketua Umum Asosiasi Cabai Indonesia, Abdul Hamid; Direktur Utama PT. AIMS, Benediktus Tommy, Direktur Utama PT. Sorgha Sorghum Sejahtera, Diana Widi Astuti, serta para anggota MPPI, serta KCD dan Penyuluh Pertanian se Kabupaten Karawang.

Dalam Gebyar 53 tahun Sinar Tani ini digelar berbagai kegiatan. Diantaranya, *Farm Field Day* yang diikuti anggota DPR RI Herman Khaeron, Dirut PT. Agri Makmur Pertiwi, Junaidi Sungkono, Pemimpin Tabloid Sinar Tani, Memed Gunawan dan Mulyono Machmur. Untuk masyarakat, digelar juga Gelar Pangan Murah dari Badan Pangan Nasional yang menjual

aneka sembako murah mulai dari telur, minyak goreng, tepung, beras, gula, daging ayam, daging sapi, aneka frozen food, hingga sayur mayur segar.

Gebyar 53 tahun Sinar Tani juga menjadi ajang Badan Pangan Nasional berkampanye Stop Boros Pangan dan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat. Bapanas juga memberikan bantuan kepada dhuafa dan anak yatim piatu yang diserahkan langsung Kepala Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. Tak hanya itu, ada pula pembagian 1.500 batang bibit buah seperti petai, rambutan, durian, hingga jambu kristal dari Direktorat Perbenihan Hortikultura, Ditjen Hortikultura.

Pimpinan Umum Tabloid Sinar Tani, Memed Gunawan mengatakan Sinar Tani merasa bangga dan terhormat dapat berkarya selama 53 tahun dalam mendukung petani-petani Indonesia. "Namun, kami sadar bahwa perjalanan masih panjang. Karena itu, kami memilih tema kolaborasi untuk tahun ini, karena kami percaya bahwa hanya melalui kerja sama yang erat antara semua pihak, kita bisa mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," ucapnya.

Gebyar ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga langkah konkret dalam membangun kerjasama yang lebih kuat untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh. Semangat kolaborasi yang tercermin dalam acara ini diharapkan akan menjadi inspirasi bagi seluruh komunitas pertanian di Indonesia, serta mendorong terwujudnya perubahan nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Pangan sebagai Hak Azasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menilai, pangan merupakan hak azasi bagi setiap

orang. Karena itu, dengan lahirnya UU Pangan tahun 2012, kebijakan pangan yang pemerintah terapkan sebatas sampai pada keluarga, kini pangan harus sampai pada individu, pangan juga harus bergizi, seimbang dan beragam. "Jadi pangan tidak hanya cukup, tapi harus tersedia," katanya.

Dengan pentingnya persoalan pangan, Herman menegaskan, sesuai amanah UU Pangan dibentuklah Badan Pangan yang bertugas mengawal pangan. Pada tahun 2017, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Pangan Nasional. "Tugas Badan Pangan mengawal pangan agar tetap tersedia. Jadi spiritnya adalah terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan," tegas Herman yang pernah menjadi anggota Komisi IV tersebut.

Jika melihat persoalan pangan, khususnya produksi, Herman menegaskan, mau tidak mau pemerintah harus mengambil berbagai langkah. Sebab, kemampuan produksi saat ini agak mengkhawatirkan dengan adanya perubahan iklim. "Kekawatiran terhadap El Nino berarti pangan kita tidak cukup survive untuk konsumen yang hampir 230 juta," ujarnya.

Herman yang juga Ketua Umum MPPI ini menilai, tema Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Pangan pada HUT Sinar Tani ke-53 ini sangat tepat. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, menurutnya, Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri, apalagi kini APBN-nya hanya sekitar Rp 13 triliun. Jadi, perlu kolaborasi dengan Kementerian/lembaga lain, termasuk pihak swasta dan media massa.

Sementara itu mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono mengajak, semua pihak untuk berkolaborasi dan sinergi membangun pertanian ketimbang kontra. Apalagi kemampuan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras sudah mendapat pengakuan dunia.

Bahkan semasa menjabat sebagai menteri, Indonesia pernah mendapat kesempatan berbicara dalam pertemuan Menteri Pertanian se dunia, bersama Amerika Serikat, Brasil, Rusia dan Uni Eropa untuk menjelaskan strategi mencapai swasembada beras.

"Kita mempunyai kemampuan, bahkan bangsa lain memberikan apresiasi terhadap pertanian Indonesia. Banyak negara-negara dunia bertanya bagaimana strategi Indonesia bisa mencapai swasembada. Ini menjadi pengakuan dari dunia. Kita mampu, tapi kita justru ribut sendiri," tuturnya. Gsh/Yul

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN**

Title	Menengok Dusun Sodong Penghasilan Baglog Jamur	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	20	
Author	Djoko W/Herman	

Menengok Dusun Sodong Penghasil Baglog Jamur

Melihat kebutuhan baglog sebagai media budidaya jamur yang sangat tinggi, beberapa warga Dusun Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang mencoba memproduksi baglog jamur. Bukan hanya untuk keperluan sendiri, bahkan diantara mereka ada yang sudah menjualnya ke berbagai kota di Jawa Tengah. Seperti apa usaha UMKM Baglog di Dusun Sodong?



Bagian paling repot, ribet dan rumit dalam budidaya jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) adalah menyiapkan baglog sebagai substrat tempat tumbuh jamur. Karena harus menyiapkan bahan-bahan seperti serbuk kayu, sekam atau dedak, kalsium karbonat juga inoculan.

Belum lagi alat-alat untuk fermentasi dan oven sterilisasi yang wajib ada pada pembuatan baglog. Hal ini semakin membuat para pembudidaya jamur banyak yang memilih untuk menggunakan baglog siap pakai.

Tidak terkecuali di Dusun Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang dikenal sebagai sentra budidaya jamur tiram di Jawa Tengah. Dengan menggunakan baglog siap pakai membuat budidaya jamur tiram disana menjadi lebih mudah dan cepat.

Masuknya budidaya jamur ke dusun Sodong dimulai pada tahun 2024 yang diperkenalkan oleh relawan sosial dari gereja setempat. Warga dusun Sodong yang awalnya bertanam jagung, ubi-ubian dan sayur mayur ini tertarik budidaya jamur karena jamur dapat tumbuh subur dan memberikan penghasilan menjanjikan bagi para warga.

Dalam waktu singkat, hampir sebagian besar petani di Dusun Sodong memiliki kumbung jamur sebagai tempat budidaya. Tercatat sekitar 80% total 141 kk di Dusun Sodong aktif berbudidaya jamur.

Widodo, salah seorang

pendahulu budidaya Jamur di Dusun Sodong mengatakan, pada awalnya para petani hanya membudidayakan jamur tiram dan jamur kuping. Sedang baglog, atas petunjuk pendamping kegiatan, dibeli dari Kaliurang, Yogyakarta. Namun dengan semakin banyaknya permintaan baglog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat membuat beberapa warga berinisiatif untuk mencoba membuat baglog sendiri.

Pada saat ini tak kurang dari 40 petani yang mempunyai oven sendiri yang digunakan mensterilisasi baglog. Sebagian besar dari mereka memproduksi baglog hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang dapat berkembang, sebagai UMKM produsen baglog secara komersial hanya 7 orang saja.

Astabikri yang merupakan generasi kedua UMKM Baglog Munjul Laras mengatakan, usaha produksi baglog jamur di desa Sodong gampang-gampang susah. Gampangnya dijelaskan pria yang akrab disapa Asta ini karena seluruh kebutuhan produksi sudah ada supplier yang memasok. Mulai dari serbuk kayu, kayu bakar, kantong plastik, kalsium karbonat siap diantar. Tenaga kerja trampil juga banyak tersedia di Desa Sodong.

Jaga Kualitas

Namun ia mengakui, kesulitannya terletak pada usaha baglog sama dengan berbisnis barang hidup. Untuk itu, kualitas harus benar-benar terjaga agar konsumen tidak

kecewa. Karena itu, Asta memberi garansi baglog tidak tumbuh diganti baru. "Saya harus pandai membangun jaringan konsumen, sehingga produksi baglog cepat



tersalur. Kalau terlalu lama di gudang bisa-bisa inoculum mati sia-sia," katanya. Kadaluwarsa baglog menurut Asta hanya 4 bulan.

Asta mengungkapkan, biasanya satu log jamur tiram bisa menghasilkan sampai 3 ons atau lebih, sedangkan untuk jamur kuping sendiri bisa sampai 3,5 ons atau lebih per 1 log plastik. Saat ini UMKM Munjul Laras memproduksi 1000 baglog setiap hari. Sebulan rata-rata 26.000 baglog. Untuk itu Asta dibantu 6 tenaga kerja trampil. "Mereka saya bayar secara borongan. Setiap orang rata-rata dapat membawa pulang Rp 75.000-100.000/hari," katanya.

Menurut Asta, hasil budidaya

jamur kuping lebih banyak dibanding jamur tiram. Namun risiko yang dihadapi pembudidaya lebih besar dibanding jamur tiram. Pasalnya jika sudah terkena penyakit, jamur kuping akan lebih sulit penanganannya. Oven untuk sterilisasi baglog milik Asta dapat menampung 1.750 baglog. Untuk bahan bakar para produsen baglog di Sodong masih menggunakan kayu bakar.

Selama ini UMKM Asta telah berhasil melayani pelanggannya seantero Jawa Tengah. Mulai dari Blora, Pati, Kendal, Pekalongan, Karanganyar, Sukoharjo, Magelang dan Purworejo. Disamping seluruh wilayah Kabupaten Semarang, Salatiga dan sekitarnya. Untuk harga baglog, UMKM Munjul Laras mematok harga Rp 1.800/baglog untuk wilayah Kabupaten Semarang dan sekitar, dan Rp 2.100/baglog untuk luar kota.

"Harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim. Minimal order 1000 baglog untuk dalam kota, dan 1.500 baglog untuk luar kota," kata Asta. Saat ini ada sekitar enam produsen baglog lain yang ada di Dusun Sodong. Konsumen dapat memilih mana yang paling cocok. Rata-rata para produsen menetapkan harga jual dan melayani dengan cara yang hampir sama. Karena mereka tergabung dalam paguyuban Jejamuran atau Sodong Lestari.

Djoko W/Herman

"Saya harus pandai membangun jaringan konsumen, sehingga produksi baglog cepat tersalur. Kalau terlalu lama di gudang bisa-bisa inoculum mati sia-sia,"

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Merdeka Award, SYL Raih Penghargaan Program Inovatif	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	19	
Author	Yul	



Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerima penghargaan pada acara Merdeka Awards Kategori Program Inovatif untuk Negeri. Kementerian Pertanian dinilai berhasil melakukan terobosan dan inovasi yang berdampak positif terhadap kinerja pertanian di Indonesia.

Merdeka Award, SYL Raih Penghargaan Program Inovatif

Penghargaan ini diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, pelaku bisnis, hingga institusi yang berhasil memberi sumbangsih bagi kemajuan negeri dan kemanusiaan.

Saat menerima penghargaan secara langsung di SCTV Tower Jakarta, SYL menyebut penghargaan ini sama maknanya dengan menghargai kinerja pertanian selama ini, penghargaan ini dianggap Mentan juga sebagai cara dalam menghargai kerja keras para petani di lapangan.

"Menghargai pertanian adalah suatu kewajiban, kita tidak bisa hidup tanpa pertanian, pertanian itu kekuatan dan sumber daya paling besar bagi bangsa ini, penghargaan ini sangat berarti bagi kami, dan kami dedikasikan penghargaan ini untuk para petani," kata SYL usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut ia menyampaikan inovasi dan teknologi sangat penting untuk dilakukan, karena kedepan sektor pertanian akan menghadapi tantangan dan tekanan yang cukup besar, sehingga upaya

penanggulangan yang komprehensif dan kolaboratif wajib untuk dilakukan.

"Pertanian sangat diperlukan dalam situasi saat ini, untuk itu dalam membangun pertanian kedepan kita butuh semangat dan inovasi untuk menghadirkan teknologi yang lebih bermanfaat dalam pembangunan pertanian kedepan," ungkapnya.

Penghargaan Program Inovatif Untuk Negeri ini diberikan atas dasar tiga penilaian, Kementan dinilai memiliki program dan terobosan seperti Taxi Alsintan, Petani Milenial, dan Aplikasi Pesan Alsintan Via Online yang dianggap memiliki kriteria sebagai Program Inovatif Kemandirian Ekonomi, Program Inovatif Bidang Pelayanan Publik, dan Program Inovatif Pendukung Digitalisasi.

Menurut Pemimpin Redaksi Merdeka.com, Darajatun, negeri ini butuh banyak inspirasi. Semangat berinovasi harus terus dijaga, sehingga semakin banyak orang tergerak untuk memberikan kebaikan. Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dengan cara

mengapresiasi para inspirator yang bergerak atas nama kemajuan negeri seperti halnya yang dilakukan Kementerian Pertanian.

"Kami nilai Kementan memiliki program dan inovasi yang sangat baik dalam pemberdayaan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani selama ini, seperti Taxi Alsintan misalnya, program ini kami nilai sangat baik dalam mendukung aktivitas petani dilapangan dan sangat baik dalam melatih kemandirian petani," ungkapnya.

Sebagai informasi penghargaan ini memiliki 6 kategori yakni Program Penguatan Ekspor Daerah, Program Desa Wisata, Program Reformasi Birokrasi, Program Pemberdayaan UMKM, Program Inovatif untuk Negeri, Sosok Inspiratif untuk Indonesia.

Lebih lanjut Dorajatun mengatakan penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi lebih banyak pihak dalam berinovasi. "Apresiasi dan penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi semua pihak agar terus berinovasi dan menginspirasi untuk Indonesia," katanya. **Yul**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Mewujudkan Generasi Sehat, Aktif dan Produktif dengan Konsumsi Pangan B2SA	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	9	
Author	Sinartani	

Mewujudkan Generasi Sehat, Aktif dan Produktif dengan **Konsumsi Pangan B2SA**

Konsumsi makanan yang beraneka ragam sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi, karena pada dasarnya tidak ada satu jenis makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang lengkap. Berbagai studi menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya manusia memerlukan minimal lebih dari 40 jenis zat gizi setiap hari untuk tetap sehat, aktif dan produktif.

Oleh karenanya, peng-
anekaragaman konsumsi pangan menjadi upaya penting yang dilakukan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU Pangan Nomor 18/2012 Pasal 60 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda berkewajiban mewujudkan peng-
anekaragaman konsumsi Pangan dengan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Penganekaragaman pangan yang dimaksud adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Penganekaragaman konsumsi pangan sangat potensial dilakukan di Indonesia mengingat keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat melimpah dengan potensi pangan lokal nusantara yang beragam spesifik wilayah di Indonesia. Dengan potensi pangan beragam yang melimpah seyogyanya pola konsumsi pangan penduduk Indonesia juga mengarah pada komposisi yang

beragam dan berkualitas. Namun hingga kini, pangan lokal yang tersedia melimpah tidak selalu dikonsumsi masyarakat secara beragam dan bergizi seimbang, maka edukasi pentingnya konsumsi pangan B2SA menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Istilah Pangan B2SA merupakan istilah yang secara jelas dalam UU Pangan. Pangan Beragam artinya aneka ragam kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan air serta beranekaragam dalam setiap kelompok pangan. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya, baik antar kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan) maupun dalam setiap kelompok pangan harus bermacam-macam, karena setiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga dengan menerapkan konsumsi makanan yang beragam, kebutuhan gizi kita



dapat terpenuhi dengan baik. Bergizi Seimbang artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh yang dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. Aman artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan -
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Konsumsi pangan B2SA itu sangat mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali makan, kita dianjurkan mengonsumsi pangan B2SA dengan porsi yaitu $\frac{1}{3}$ isi piring makan adalah pangan pokok, $\frac{1}{3}$ isi piring adalah sayuran, $\frac{1}{6}$ isi piring adalah lauk pauk, dan $\frac{1}{6}$ isi piring makan adalah buah-buahan. Jika konsumsi pangan setiap kali makan sesuai dengan porsi maka pola konsumsi pangan B2SA mendorong pematapan penganekaragaman konsumsi pangan.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dalam upayanya terus mendorong masyarakat untuk membudayakan konsumsi pangan B2SA berbasis pangan lokal. Upaya nasional ini tentunya akan tercapai jika dilakukan oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu, konsumsi pangan B2SA harus dimulai dari keluarga, generasi muda, remaja, seluruh golongan usia dan seluruh lapisan masyarakat. Konsumsi pangan B2SA itu tidak mahal karena berbasis pada potensi lokal. Mari kita galakkan konsumsi pangan B2SA tentunya dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di sekitar kita.

#MakanEnakMakanSehatMakanB2SA
#SehatDenganPanganLokal
#PanganKuatIndonesiaBerdaulat



Title	P4S Pak Datuak Hasilkan Barista Lokal Berkualitas Internasional	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	14	
Author	Cha/cah	

P4S Pak Datuak Hasilkan Barista Lokal Berkualitas Internasional

Dalam upaya untuk mengangkat potensi kopi lokal ke tingkat internasional, P4S Pak Datuak telah berhasil menciptakan barista lokal yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga siap bersaing di panggung internasional.

Attila Majidi, SP, Ketua P4S Pak Datuak telah lama dikenal sebagai Datuk Sibungsu dari Solok Selatan, bukan hanya seorang pemimpin adat Minangkabau, tetapi juga seorang visioner di dunia kopi.

Kecintaannya pada kopi diawali ketika dirinya menjadi Penyuluh Pertanian kontrak hingga bersentuhan dengan bisnis kopi.

Baginya, kopi bukan sekadar minuman, melainkan cinta yang tak pernah berhenti. Bersama dengan 4 kelompok tani dan 7 pelaku usaha lainnya, ia telah mengubah dunia kopi di daerahnya menjadi sebuah cerita sukses yang tak terduga.

Tak hanya bergelut di bisnis,

dirinya juga berkeinginan menghasilkan kompetensi SDM pertanian yang handal, salah satunya barista Lokal Berkualitas Internasional.

Karena itu, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Pak Datuak yang dipimpin Attila Majidi, SP, berkomitmen untuk melakukan pelatihan barista.

Peserta terpilih dalam pelatihan ini telah melewati proses seleksi ketat, yang memastikan mereka adalah individu berbakat dengan semangat tinggi untuk mengeksplorasi potensi tersembunyi mereka di dunia penyeduhan kopi.

Dalam upaya untuk meraih pemahaman yang mendalam tentang seni menjadi seorang barista, peserta



tidak hanya diberikan pelajaran tentang cara menyeduh kopi dengan sempurna, baik dengan mesin canggih maupun secara manual, tetapi juga memperoleh wawasan yang kaya tentang budidaya kopi, pengolahan kopi, teknik sangrai yang memukau, dan tentu saja, seni

menyeduh kopi yang luar biasa.

Pada akhirnya, para peserta akan memiliki kemampuan untuk menghadirkan kelezatan dalam setiap cangkir kopi yang mereka buat, dan juga mampu memahami nuansa cita rasa kopi dengan teknik cupping yang canggih. **Cha/Gsh**

Title	Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Indonesia	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	13	
Author	Rizky Purwantoro	

Urgensi Adanya Regulasi Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Indonesia

Oleh : Rizky Purwantoro*)

Diperlukan regulasi untuk pengaturan kesehatan hewan, termasuk pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, berdasarkan hukum yang ada. Regulasi ini penting agar hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit tidak membahayakan manusia, hewan, atau ekosistem di Indonesia.

Namun, saat ini, belum ada peraturan yang mengatur hal ini secara khusus, sehingga standar persyaratan teknis kesehatan hewan bisa berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota di satu pulau.

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur hal ini. Proses penyusunan regulasi ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan.

Penyusunan rancangan regulasi menghadirkan beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, memberikan kepastian hukum terkait pengaturan lalu lintas hewan, produk hewan, dan penyakit hewan. Kedua, menjadi acuan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan persyaratan kesehatan hewan, memastikan keseragaman di seluruh wilayah.

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit

Hewan Antar Wilayah Dalam Satu Pulau memiliki tujuan jelas. Pertama, menciptakan keseragaman persyaratan teknis di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, melindungi kesehatan hewan dan mencegah penyebaran Penyakit Hewan dalam satu wilayah, termasuk lalu lintas antar wilayah di pulau Indonesia.

Dengan demikian, regulasi ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan hewan, menghindari penyebaran penyakit, dan menciptakan keseragaman dalam pengaturan lalu lintas hewan dan produk hewan di seluruh negeri.

Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar Wilayah Dalam Satu Pulau mengatur bahwa untuk mengawasi pergerakan hewan, produk hewan, dan potensi penyebaran penyakit, diperlukan sertifikat veteriner, rekomendasi pemasukan hewan, serta pertimbangan berdasarkan jenis hewan, produk, dan situasi penyakit.

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa dokumen dan kondisi fisik hewan di pos pemeriksaan kesehatan hewan yang dioperasikan oleh instansi terkait di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Laporan mengenai pengawasan ini disampaikan secara berkala melalui sistem informasi kesehatan hewan.

*) Perancang Peraturan perundang-undangan,
Biro Hukum Kementerian Pertanian

Title	Peran Pemda sangat Penting	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	5	
Author	Yul	



**Kepala Pusat Penyuluh Pertanian,
Bustanul Arifin Caya:**

Peran Pemda sangat Penting

Peran penyuluh sebagai orang paling depan dalam mewujudkan kedaulatan pangan menjadi sangat penting. Sayangnya, sejak era otonomi daerah peran penyuluh berkurang. Padahal peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk menggerakkan penyuluh pertanian.

Kepala Pusat Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bustanul Arifin Caya mengakui, sejak Otonomi Daerah, pemerintah pusat tidak lagi mempunyai tongkat di lapangan. Karena itu untuk menggerakkan fungsi penyuluh di daerah, pihaknya membuat program dan kegiatan yang mengikutsertakan penyuluh pertanian.

Salah satunya mendorong kembali Sekolah Lapangan (SL) sebagai alat bagi penyuluh pertanian berhubungan dengan

petani. "Kita dituntut meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Tapi jika tanpa inovasi teknologi akan sulit. Karena itu, kita mengadakan SL untuk petani yang nantinya mendapat pendampingan dari penyuluh," katanya.

Karena itu, Bustanul berharap adanya dukungan Pemda. Bahkan dirinya juga berharap penyuluh pertanian di daerah juga ikut menggaungkan Perpres No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian. "Jangan hanya digaungkan di pusat, tapi juga di pemerintah provinsi dan kabupaten," ujarnya.

Dengan adanya dukungan Pemda, Bustanul berharap nantinya ada keberpihakan dari daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyuluh pertanian. "Kalau anggarannya nol, bagaimana penyuluh mau bergerak. Bagaimana produksi pangan juga bisa meningkat. Adanya SL juga kegiatan menjadi terukur, penyuluh tidak hanya memberikan pendampingan tapi juga alat untuk transfer teknologi," katanya. **Yul**

Title	Soal Beras Mudah Diselesaikan Kalau Kita Mau	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	7	
Author	Indri/yul	



Ketum Perpadi, Sutarto Alimoeso :

Soal Beras Mudah Diselesaikan, Kalau Kita Mau

Polemik soal pangan, khususnya beras, selalu menjadi persoalan yang kerap muncul di dalam negeri. Bagi Sutarto Alimoeso, mantan Dirjen Tanaman Pangan dan Direktur Utama Perum Bulog, menyelesaikan persoalan pangan, khususnya beras, tidak lah sulit. Syaratnya satu, semua pihak mau menyelesaikan semua persoalan dari A sampai Z.

Sebagai negara kepulauan, menurut Sutarto, salah satu kuncinya dalam mengatasi persoalan pangan adalah pemerintah harus mempunyai stok. Dalam UU Pangan sudah

ada amanah bahwa bukan hanya pemerintah pusat yang mempunyai stok pangan (beras), tapi juga pemerintah daerah. "Sekarang ini Pemda tidak punya stok," ujarnya.

Guna mewujudkan kedaulatan pangan, saat menjadi Dirut Perum Bulog, Sutarto berupaya mengubah paradigma bahwa pemerintah harus mempunyai stok paling tidak 10 persen dari kebutuhan nasional. Sebab, jika kurang dari angka tersebut, maka kondisinya tidak aman. "Per Juli ini kita hanya punya stok 600 ribu ton, ini bahaya. Padahal waktu saya, mencapai 2,6 juta ton," katanya.

Jika melihat kondisi di lapangan, Sutarto melihat persoalannya tidak banyak berbeda. Namun persoalan tersebut harus diselesaikan bersama-sama, baik melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kalangan penyuluh pertanian. Selain itu, selama ini sudah banyak data dan pengalaman, serta model pembangunan yang sudah dibuat pendahulu-pendahulu. "Ini juga

harus dilihat. Jangan dilihat bahwa yang dulu itu jelek semua," katanya.

Bahkan Sutarto menilai, model Bimbingan Massal (Bimas) merupakan pola pembangunan pertanian yang sangat baik. Ada kegiatan monitoring dan evaluasi, kemudian program memperbaiki tanah pertanian, serta program lainnya, termasuk pendampingan dari penyuluh pertanian. "Tanpa pendamping persoalan pangan tidak akan selesai. Hulu hilir harus dilihat bersama," ujarnya.

Sutarto mengatakan, isu El Nino yang datang pada Agustus ini tidak perlu dibesar-besarkan, juga tentang India dan Thailand yang tidak akan ekspor beras. Dengan isu tersebut justru mempengaruhi keadaan perberasan di lapangan. "Tidak usah dibesar-besarkan suatu isu, tapi kita harus bergerak," tegasnya. **Indri/Yul.**

Title	Strategi Cerdas Hadapi El Nino	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	3	
Author	Sri Mulyani	

Climate Smart Agriculture

Strategi Cerdas Hadapi El Nino



Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Climate Smart Agriculture menjadi senjata ampuh dalam menghadapi ancaman seperti El Nino.

Perubahan iklim, seperti El Nino, bisa menyebabkan musim kemarau panjang di Indonesia. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu perairan yang meningkatkan suhu dan kelembaban atmosfer, menyebabkan kekeringan parah. Ancaman ini berdampak pada produktivitas padi dan ketahanan pangan. Untuk mengatasinya, diperlukan penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) yang mengurangi penggunaan air, pupuk kimia, dan pestisida, meningkatkan hasil yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kementerian

Pertanian telah melakukan CSA melalui Program SIMURP sejak 2019 untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani serta mengurangi emisi gas rumah kaca demi ketahanan pangan berkelanjutan.

Produktivitas di demplot SIMURP (CSA) lebih tinggi dibandingkan dengan non CSA selama tahun 2020-2022, dengan selisih rata-rata 0,44 ton/ha (2020), 0,64 ton/ha (2021), dan 0,65 ton/ha (2022). Data ini sejalan dengan hasil KSA oleh BPS di tingkat kabupaten. SIMURP juga mendukung pertumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani dan

Kelompok Wanita Tani, melibatkan petani muda untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan keluarga petani.

Penerapan CSA mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan hasil pengukuran tahun 2021 di 68 demplot di 17 Kabupaten di 8 provinsi. Rata-rata potensi pemanasan global (GWP) menurun 37% dibandingkan dengan perlakuan konvensional.

Teknologi AWD pada CSA juga menghemat air di demplot di Subang, Jawa Barat, dengan penghematan 21% (lokasi utara) dan 12% (lokasi selatan) dibandingkan metode konvensional pada musim tanam 2022/2023.

Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi CSA dapat dilakukan sesuai kondisi lapangan, diantaranya melalui:

1. Teknologi hemat air melalui sistem irigasi berselang (Intermittent) atau Irigasi basah kering/Alternate Wetting and Drying/ Macak-macak.
2. Penggunaan bahan organik melalui pupuk organik. Penggunaan organik yang ramah lingkungan perlu ditingkatkan. Pembuatan pupuk organik dapat menggunakan sumber-sumber bahan organik di sekitar lahan pertanian
3. Pemupukan berimbang. Agar mendapatkan pupuk yang berimbang tentunya diperlukan penentuan takaran N, P, dan K melalui uji tanah. Pengujian tanah dapat dilakukan dengan alat Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) untuk lahan irigasi serta Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR) untuk lahan rawa.
4. Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.

Penerapan CSA menjaga keberlanjutan dan ketahanan pangan di tengah dampak perubahan iklim.

Penulis : Sri Mulyani
Penyuluh Pada
Pusat Penyuluhan
BPPSDMP



Sampaikan Pendapat, Kritik, Saran dan Dukungan Anda tentang Pembangunan Pertanian melalui WA, SMS ke: 087881605773 atau email ke: sintani@cbn.net.id. Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda. SMS terpilih akan dimuat pada WA atau SMS Cangkul.



Ada 2 persoalan food waste di Jawa Barat yang tidak semata-mata soal konsumsi melainkan juga distribusi.

Di TPS BALE RESI RW 02 Kampung Cilebak Desa Ranca Manyar mengolah sampah organik dapur (s.o.d)/ food waste dengan Maggot BSF untuk mengurangi beban kegiatan sehari-hari.

Maggot BSF mampu mengurai sampah dalam 1 hari atau lebih cepat (1 ton Maggot BSF 1 ton sampah organik). Lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas, per meter persegi lahan bisa 10-20 kilo food waste dan bisa vertikal ke atas untuk efisiensi lahan.

Selain itu Maggot BSF bernutrisi tinggi buat pakan ternak dan ikan seperti ayam yang dipelihara warga, bertelur lebih banyak karena dikasih makan Maggot BSF. 80% hingga 100% pakan lele di video ini memakan maggot bsf, sehingga maggot bsf lebih bernilai.

Maggot BSF memakan semua sampah organik terutama yang lembut-lembut. sehingga food waste sangat cocok. Maggot BSF hidup di proses dekomposisi mesophilic untuk medium tempat hidupnya, tidak bisa hidup di tempat sampah saja (tanpa kondisi suhu meso).

Dampak secara sosial (Perwakilan Kepala Desa Rancamanyar, Kasie

Pemerintahan dan Kepala Dusun): Karena proses ini mengurai sampah organik, pengelolaan Maggot yang berakhir sebagai pakan lele salah satunya ini positif bagi masyarakat dan tidak memakan biaya yang besar.

Pengurangan sampah tahun 2022 (15,17%) menurut data MENLHK masih belum mencapai target Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 (30%).

Presentase food waste terbesar di Bandung dan Kabupaten Bandung : kawasan komersial, Pasar tradisional (80% organik), rumah tangga. Maka Kawasan Komersial dan pasar tradisional (pengurus dan pedaganganya) harus diedukasi untuk mengelola sampah secara

mandiri karena amanat konstitusi, tentunya disertai pemberian fasilitas dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Agar Para pegiat Maggot BSF bisa sustain s.o.d wajib tidak dikirim ke TPS melainkan ke para pegiat Maggot BSF, maka target pengurangan sebagaimana perpres tersebut akan tercapai bahkan melebihi target. (Ardhie Elmedian)

Selamat Ulang Tahun yang ke 53 kepada Sinar Tani, semakin sukses dan tentunya mari kita terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Pangan Kuat Indonesia Berdaulat. (Nita Yulianis, Direktur Kawaspadaan Pangan dan Gizi BAPANAS)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN**

Title	Sukses Kembangkan Sapi Potong di Garut	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	18	
Author	Nattasya/cah	

Faqih Ibrahim, Sukses Kembangkan Sapi Potong di Garut

Awalnya, Faqih memutuskan terlibat dalam peternakan setelah bisnis keluarganya di bidang tersebut mengalami kegagalan.

Mental Muhammad Faqih Ibrahim, seorang peternak milenial, diuji ketika ia bergabung dengan program Petani Milenial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di ladang bisnis sapi potong yang ditekuninya, Faqih, pemilik Solter Farm, menciptakan kandang seluas lebih dari 500 meter persegi di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sebagai tempat eksperimennya. Di sinilah dia menggabungkan formula terbaik untuk menggemukkan 35 ekor sapi yang dimilikinya.

Kisah perjalanan Faqih dalam dunia peternakan ini dimulai dari titik pahit saat bisnis keluarganya hancur pada tahun 2015, ketika sapi-sapi yang ditanamkan oleh ayahnya

habis akibat kesalahan dalam manajemen penjualan. Bagi Faqih, tahun 2015 menjadi titik baliknya dalam menjalani karir peternakan yang penuh tantangan.

Dengan tekad untuk tidak terpuruk lebih lama, Faqih Ibrahim mulai membangun kembali bisnis ayahnya sejak momentum Idul adha 2016. Melalui kepercayaan pelanggan dan peningkatan tata kelola penjualan dan sistem kandang, bisnisnya mulai pulih.

Setelah pengalaman pahit itu, Faqih terus mengembangkan diri dengan mempelajari berbagai aspek manajemen peternakan yang baik. Pada tahun 2022, pada usia 25 tahun, ia bergabung dengan program Petani Milenial. Di program ini, ia tidak hanya meningkatkan keterampilan di kandang, tetapi juga

mendapatkan peningkatan dalam aspek bisnis, digitalisasi, jaringan, analisis pasar, dan akses permodalan melalui program KUR.

Setelah satu tahun bersama Petani Milenial, Faqih Ibrahim memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang standarisasi dalam pengelolaan kandang dan pemberian pakan. Dia mengatakan, "Dulu, memberi pakan hanya sekadar membuat sapi kenyang, tapi akhirnya sapi membengkak." Sekarang, ia bahkan mampu mencatat karakteristik setiap sapi di kandangnya, memungkinkan optimasi dalam proses penggemukan. Faqih juga telah memahami komposisi pakan yang

baik untuk sapi-sapinya.

Dengan pengetahuan dan dukungan dari program Petmil Jabar, Faqih berhasil mengembangkan SolterFarm ID menjadi penyedia ternak dan pakan ternak yang sukses. Usahanya yang dulunya menghasilkan omzet ratusan juta rupiah, kini telah mencapai omzet miliaran rupiah dalam waktu singkat.

Faqih optimis tentang masa depan SolterFarm Indonesia, "Biasanya ratusan juta, sekarang menjadi miliaran, dan kami berharap SolterFarm Indonesia akan memberikan kontribusi besar bagi industri peternakan di Indonesia," harapnya **Nattasya/Gsh**



Title	Wujudkan Kedaulatan Pangan Tak Bisa Sendiri	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	5	
Author	Yul	



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron: Wujudkan Kedaulatan Pangan **Tak Bisa Sendiri**

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi pegangan pemerintah dalam memberikan kecukupan pangan bagi masyarakat. Meski sudah 10 tahun lebih regulasi tersebut ada, namun bangsa Indonesia hingga kini masih berjuang untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Harusnya mendorong penanaman pangan yang banyak dibutuhkan Masyarakat," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Herman adalah program diversifikasi pangan. Dirinya menilai, program tersebut saat ini tidak berjalan baik. Padahal jika pemerintah menggenjot program diversifikasi, maka akan banyak masyarakat bergeser dari konsumsi beras ke umbi-umbian. "Ini juga akan mendorong swasta berinvestasi ke komoditas pangan umbi-umbian. Sekarang kan terlalu fokus pada tanaman padi," ungkapnya.

Jika melihat persoalan pangan saat ini, khususnya produksi, Herman menegaskan, mau tidak mau pemerintah harus mengambil berbagai langkah strategis. Sebab, kemampuan produksi pangan saat ini agak mengkhawatirkan dengan adanya perubahan iklim. "Kekhawatiran terhadap El Nino berarti pangan (beras) kita yang 33 juta ton itu tidak cukup survive untuk menopang konsumen yang hampir 230 juta," tambahnya.

Dengan produksi padi yang terbatas dan stok beras di Bulog minim, Herman menilai cukup wajar jika adanya kekhawatiran terhadap stok pangan, sehingga kemudian ada keinginan untuk impor beras. Namun untuk impor beras pun diakui tidak mudah. Pasalnya, beberapa negara produsen beras juga sudah mulai menyedot ekspor. "Jika semua stop ekspor, kita harus kembali ke UU Pangan, wujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan," katanya. **Yul**

Apalagi saat ini bangsa Indonesia tengah dilanda ancaman perubahan iklim dengan adanya El Nino (kemarau berkepanjangan). Kondisi tersebut perlu diantisipasi, karena berdampak pada penurunan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi pangan pokok bagi bangsa Indonesia.

Salah satu amanah yang ada dalam UU Pangan tersebut yakni kelembagaan pangan atau Badan Pangan baru lahir 2021 dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional baru dilantik pada tahun 2022.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menilai, pangan merupakan hak azasi bagi setiap orang. Karena itu, dengan lahirnya UU Pangan tahun 2012, kebijakan pangan yang pemerintah terapkan sebatas sampai pada keluarga, kini pangan harus sampai pada individu, pangan juga harus bergizi, seimbang

dan beragam.

"Jadi pangan tidak hanya cukup, tapi harus tersedia," tegasnya saat Gebyar HUT ke-53 Tabloid Sinar Tani yang berlangsung di Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (29/8).

Dengan pentingnya persoalan pangan, Herman menegaskan, sesuai amanah UU Pangan dibentuklah Badan Pangan yang bertugas mengawal pangan. Pada tahun 2022, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Pangan Nasional. "Tugas Badan Pangan mengawal pangan agar tetap tersedia. Jadi spiritnya adalah terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan," tegas Herman yang pernah menjadi anggota Komisi IV tersebut.

Karena itu Herman yang juga Ketua Umum MPPI ini menilai, tema Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Pangan pada HUT Sinar Tani ke-53 ini sangat tepat. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, menurutnya,

Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri, apalagi ini APBN-nya hanya sekitar Rp 13 triliun. Jadi, perlu kolaborasi dengan Kementerian/ lembaga lain, termasuk pihak swasta dan media massa.

"Enaknya Kementerian Pertanian sebenarnya waktu saya jadi Pimpinan Komisi IV DPR RI. Saat itu anggaran Kementerian Pertanian sebanyak Rp 23 triliun, plus subsidi pupuk Rp 28 triliun, dan Rp 22 triliun untuk subsidi pangan di Bulog. Jadi besar sekali," tuturnya.

Bahkan dibandingkan PDB untuk mempertahankan sektor pangan, Herman menilai, anggaran tersebut juga masih sangat kecil, karena idealnya paling tidak sebanyak Rp 88 triliun. Misalnya, pemerintah harus melakukan intensifikasi pertanian. Sebab tugas Kementerian Pertanian dibentuk untuk mempertahankan keberlanjutan pangan.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga harus melakukan ekstensifikasi. "Jangan membuka lahan Gunung Mas untuk menanam singkong dong.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Tingkatkan Daya Saing, Petani UPLAND Dilatih Manajemen Korporasi	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	11	
Author	UPLAND	

Tingkatkan Daya Saing, Petani UPLAND Dilatih Manajemen Korporasi



Kelembagaan petani memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Banyak sumberdaya pedesaan yang dapat dikelola dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan posisi tawar petani atau kelompok tani di Indonesia.

Dalam rangka merealisasikan target tujuan UPLAND Project Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan kelembagaan bagi para petani di Indonesia. Para petani yang tergabung dalam kelembagaan tersebut dapat bernaung di bawah program tersebut untuk memasarkan produk mereka ke pasar internasional atau ekspor.

Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Ali Jamil mengatakan, program ini dijalankan dalam rangka peningkatan rantai nilai produk pertanian. Kementan melalui UPLAND Project telah menyelenggarakan pelatihan terkait manajemen ekspor bagi korporasi pertanian yang ada di lokasi UPLAND Project.

Urgensi dibentuknya kelembagaan petani ini karena beberapa faktor. Diantaranya, masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Selain itu, para petani di Indonesia belum banyak terlibat secara utuh para petani dalam kegiatan agribisnis, aktivitas pertanian juga masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).

"Untuk merealisasikan tujuan program untuk peningkatan rantai nilai produk pertanian telah dilakukan pelatihan terkait manajemen

ekspor bagi korporasi petani yang ada di lokasi UPLAND Project," kata Ali Jamil dalam keterangan tertulis, Senin (28/8).

Ali menjelaskan, UPLAND Project adalah program pertanian terpadu yang menyeleraskan antara sektor hulu (*on farm*) dan pascapanen (*off farm*) yang terintegrasi. Karena itu, bukan hanya produksi yang dikejar, tetapi juga memastikan petani bisa mendapatkan hasil penjualan yang terbaik, sehingga akan meningkatkan pendapatannya.

Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi atau Development of Integrated Farming System at UPLAND Area (UPLAND Project), merupakan program dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian atas dukungan dari Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund For Agricultural Development (IFAD).

Hingga kini UPLAND Project juga telah memberikan pelatihan ekspor untuk petani di enam kabupaten yakni Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Subang, Tasikmalaya, dan Sumenep. Dalam pelatihan UPLAND Project, petani diberikan pemahaman tentang manajemen ekspor, pasar internasional dan analisa potensi yang bisa dimanfaatkan oleh petani, khususnya yang berada

dalam bimbingan UPLAND Project. Harapannya produk yang dihasilkan mampu memasuki pasar internasional.

Upaya ini menurut Ali Jamil, dalam rangka meningkatkan daya tawar bagi produk yang dihasilkan petani di Indonesia. Peningkatan posisi tawar ini dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami petani dapat dihindari.

Selain itu, peningkatan kelembagaan petani ini juga dapat menjadi wadah menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian dari pra produksi sampai pemasaran. "Adanya sistem kelembagaan petani ini diharapkan bukan hanya mengejar produksi, tetapi juga memastikan petani bisa mendapatkan hasil penjualan yang terbaik, sehingga akan meningkatkan pendapatannya," kata Ali Jamil.

Lembaga Terintegrasi dan Berdaya Saing

Karena itu, melalui UPLAND Project yang bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund For Agricultural Development (IFAD) diharapkan dapat terwujud sistem kelembagaan yang terintegrasi hingga menuju daya saing pasar internasional. "Kami saat ini menyiapkan kelembagaan

petani yang bernaung di bawah program UPLAND Project. Tujuannya untuk memasarkan produk pertanian ke pasar internasional," katanya.

Sementara itu Pengelola Program atau Project Management Unit (PMU) UPLAND Project Farakka Sari menambahkan, UPLAND Project telah melakukan pelatihan manajemen ekspor secara bertahap di tujuh kabupaten. Pelatihan manajemen ekspor ini diharapkan menjadi fondasi bagi petani yang tergabung dalam korporasi petani untuk bisa memulai menyiapkan kelembagaannya menjadi peng-ekspor.

Beberapa upaya telah dilakukan UPLAND Project untuk bisa mengenalkan produk petani Indonesia di pasar internasional. Diantaranya, membawa produk petani UPLAND Project mengikuti pameran tingkat internasional yang dilaksanakan di Belanda, Turki dan Amerika pada 2022.

"Kami sangat konsen mendorong peningkatan rantai nilai dari produk pertanian supaya memastikan produk petani mendapatkan nilai jual yang terbaik dan meningkatkan pendapatan petani," kata Farakka.

Selain pelatihan manajemen ekspor, petani juga diberikan pemahaman tentang pasar internasional dan analisa. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar internasional, produk petani UPLAND Project juga telah dilakukan standarisasi melalui sertifikasi produk dan juga lahan untuk memastikan produk yang dihasilkan bermutu tinggi, salah satunya adalah sertifikasi organik.

Saat ini, kata Farakka, lebih dari seribu hektar lahan petani UPLAND Project telah mendapatkan sertifikasi organik. Salah satunya, Korporasi Petani Kabupaten Purbalingga yang telah berhasil mengekspor untuk produk lada ke Jepang. Bahkan saat ini telah mendapatkan kontrak untuk menyuplai pasar di Negara Sakura tersebut. Kabupaten Sumenep Jawa Timur saat ini juga telah berhasil mengolah produk bawang merah goreng untuk pasar di Belanda.

UPLAND Project secara masif juga menggelar pelatihan korporasi petani dengan mengikutkan 36 kelembagaan yang digelar di 3 lokasi yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. **UPLAND**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN**

Title	Ubah Gaya Hidup untuk Meredam Perubahan Iklim	 Kementerian Pertanian
Date	6 September 2023	
Media	Sinartani	
Page	12	
Author	Sinartani	

Ubah Gaya Hidup untuk Meredam Perubahan Iklim

Ternyata kita sangat rentan. Kenaikan suhu rata-rata 2 derajat Celcius saja dapat menghancurkan ekosistem global yang berakhir buruk pada kehidupan manusia. Gaya hidup penyebabnya dan gaya hidup pula solusinya.

Menurut data yang dikumpulkan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), badan penelitian iklim pemerintah Amerika Serikat, permukaan laut telah naik hampir 25 sentimeter dalam 140 tahun terakhir. Sekitar sepertiga dari peningkatan itu terjadi hanya dalam 25 tahun terakhir saja.

Menurut Lynas, bila temperatur Bumi naik 2 derajat Celcius, akan terjadi kekeringan parah, kekurangan air, kenaikan suhu air laut dan berbagai bencana yang memporakporandakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Kesepakatan dalam Perjanjian Paris meminta semua negara untuk menjaga suhu tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius.

Dunia perlu mengambil langkah tegas, segera, dan skala besar untuk mengurangi emisi. Hal ini harus dilakukan agar suhu rata-rata global tidak melewati ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius dalam waktu 20 tahun. Kenaikan 1,5 derajat Celsius umumnya dipandang sebagai yang paling bisa diatasi umat manusia, tanpa menderita pergolakan ekonomi dan sosial yang meluas.

Pemanasan global 1,1 derajat Celsius yang sudah terjadi saat ini nyatanya sudah cukup mengakibatkan cuaca buruk yang menyiksa. Jika kita berhasil mengurangi emisi dalam dekade berikutnya, suhu rata-rata masih bisa naik 1,5 derajat Celsius pada tahun 2040 dan mungkin jadi 1,6 derajat Celsius pada tahun 2060 sebelum akhirnya stabil.

Akan berhasilkah kita mengerem agar kenaikan suhu bumi tidak berlanjut? Itu semua tergantung kepada komitmen kita. Kita semua, masyarakat dunia. Namun jika dunia tidak melakukan perubahan, suhu bisa meningkat sampai 2 derajat Celsius pada 2060 dan 2,7 derajat Celsius pada akhir abad ini.

Bill Gates meramalkan bumi akan melampaui kenaikan suhu di ambang batas 1,5 derajat Celcius. Gates menambahkan upaya mitigasi iklim yang tak kunjung jelas itu bisa memperlambat kemajuan dalam memperbaiki kondisi manusia.

Data menunjukkan lebih dari 10% anak meninggal dunia sebelum menginjak usia 5 tahun. Sementara itu, lebih dari 30% tidak cukup makan di beberapa negara. Skenario lain adalah pemanasan 1,5 derajat Celsius menyebabkan 19 hari ekstra panas ekstrem per tahun. Periode hangat terjadi 17 hari lebih lama dari biasanya.

Tentang TerraPower, reaktor nuklir dengan mengembangkan natrium cair untuk pendingin dan

sumber bahan bakar dari uranium, menurutnya mungkin jadi solusi. TerraPower, menurutnya, telah memiliki kemajuan luar biasa.

TerraPower adalah perusahaan rekayasa desain dan pengembangan reaktor nuklir Amerika yang berkantor pusat di Bellevue, Washington. TerraPower sedang mengembangkan kelas reaktor cepat nuklir, namun rencana itu terhambat akibat perang Ukraina, sementara TerraPower berencana menggunakan bahan bakar dari Rusia. Nah!

Tidak tahu apakah itu solusi atau ilusi. Akankan itu benar-benar jadi kenyataan? Itu ibarat memadamkan kebakaran hutan raya di beberapa titik di mana orang kaya berada. Dengan biaya mahal pula. Yang suatu saat akan kembali terbakar karena bencana terus meluas. Upaya manusia yang sangat terbatas itu mungkin akan menyelamatkan sejumlah kecil kelompok manusia dalam jangka pendek saja.

Lalu perusahaan yang memproduksi daging palsu (*fake meat*), seperti Beyond Meat dan Impossible Foods yang sedang dikembangkan, sejauh manakah dia akan mampu menggantikan pangan kebutuhan manusia.

Alternatif daging atau pengganti daging, adalah produk makanan yang terbuat dari bahan-bahan vegetarian atau vegan, yang dimakan sebagai pengganti daging adalah impian yang sungguh ribet. Walaupun produk alternatif daging itu mendekati kualitas jenis daging tertentu, seperti rasa, penampilan, atau karakteristik kimiawi, apakah bisa diandalkan untuk mencegah pemanasan global yang efektif?

Solusi terbaik adalah menjaga alam. Pertanian, peternakan, kehutanan dan ekstraksi bahan bakar fosil yang jadi kambing hitam penyebab emisi gas metan, CO2 serta saudara-saudaranya itu harus dikelola dengan pola yang ramah. Dengan dukungan seluruh dunia, bukan hanya negara yang jadi pemiliknya saja.

Yang lebih rasional adalah manusia mengubah gaya hidup ke arah yang lebih bersahabat. Dan lebih sehat. Inilah yang lebih efektif dalam mengurangi emisi gas di rumah kaca. Karena semua ini akibat gaya hidup manusia yang cenderung boros sumberdaya alam karena mengekstraksi alam secara berlebihan. Maka solusinya adalah kembali ke pola dan gaya hidup yang bersahabat dengan alam.

Menghemat energi di rumah, karena sebagian besar listrik dan panas menggunakan batu bara, minyak, dan gas. Ubahlah sumber energi rumah, beraktivitas dengan



berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Beralih ke kendaraan listrik dan bijak dalam merencanakan dalam perjalanan. Kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang jadi semboyan dalam menggunakan semua barang. Makan lebih banyak sayuran, dan jangan banyak membuang makanan.

Komitmen Indonesia

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisinya dalam kerangka kerja Kesepakatan Kopenhagen dan Perjanjian Paris. Terlepas dari dampak perubahan iklim yang signifikan terhadap negara ini, survey menunjukkan bahwa Indonesia memiliki proporsi yang tinggi dalam hal penyangkalan terhadap perubahan iklim.

Sejak tahun 2010, Indonesia telah secara aktif terlibat dalam program REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), yang memberikan insentif kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka.

Program REDD+ ini tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Program ini terlihat menjanjikan untuk masa depan, tapi implementasinya di Indonesia terhambat oleh berbagai kendala, seperti tata kelola, kapasitas kelembagaan, pendanaan yang tidak

mencukupi, dan masalah tenurial.

Selain REDD+, Indonesia juga memiliki potensi untuk meningkatkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim berbasis hutan lainnya seperti pengelolaan hutan lestari dan wanatani. Hal ini penting karena dapat memastikan bahwa hutan dikelola dengan cara yang menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan sambil tetap menjaga cadangan karbonnya.

Meskipun Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada akhir tahun 2030, Indonesia hanya membuat sedikit kemajuan dalam mengurangi emisi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan finansial, prevalensi pembangkit listrik tenaga batu bara, dan deforestasi yang masih terus berlangsung.

Dari tahun 2014 hingga 2019, emisi Indonesia meningkat sebesar 2,2%. Untuk mengatasi semua tantangan ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap. Untuk mencapai hal ini, diperlukan tindakan yang lebih konkret dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi emisi gas rumah kaca.

**Memed Gunawan/
Diolah dari berbagai
Sumber di Google**

Untuk Info Lebih lanjut bisa mengunjungi website dibawah ini:
<https://tabloidsinartani.com/detail/wacana/agri-wacana/22699-Ubah-Gaya-Hidup-untuk-Meredam-Perubahan-Iklim>